

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknnya Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional Asta Cita, sesuai dengan kewenangan dan kondisi Provinsi Jawa Tengah. RPJMD juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, serta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

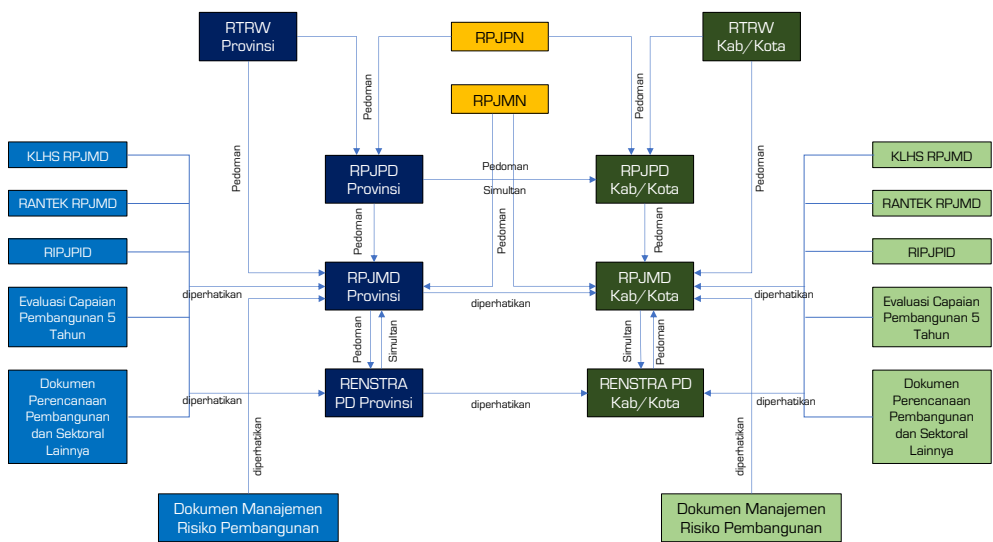
Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024 terutama pada tingkat ketercapaian kinerja daerah dan rekomendasi;
2. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 terutama pada substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah; serta
 4. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2025-2029;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah Pusat;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029; serta
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Tengah meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, termasuk kinerja setiap urusan pemerintahan; gambaran keuangan daerah meliputi realisasi dan proyeksi keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah disertai indikator kinerja dan targetnya; serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.

Bab IV Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pada bab ini diuraikan tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan.

Bab V Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat seluruh program perangkat daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab; serta penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja daerah (IKD).

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan luas daratan ±3.433.732 Ha atau ±25 persen dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa yang berbatasan dengan tiga provinsi, Provinsi Jawa Barat sebelah barat, Provinsi Jawa Timur sebelah timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa.

Letak wilayah Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa, memiliki peran dan posisi strategis dalam konteks pembangunan nasional maupun regional. Secara makro, peran Pulau Jawa dalam pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan adalah sebagai wilayah megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dan Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menjadi wilayah Jawa Tengah sebagai penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional untuk 20 tahun ke depan (RPJPN Tahun 2025-2045). Kebijakan nasional tersebut, dipertegas dalam visi pembangunan Jawa Tengah 20 tahun ke depan yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan (RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045). Kebijakan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembangunan tata ruang Jawa Tengah yang mengarahkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Jawa Tengah yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044).

Secara kewilayahan, Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis karena berada di antara dua kutub pintu gerbang ekonomi nasional (Jakarta dan Surabaya). Wilayah Jawa Tengah memiliki prasarana strategis pendukung perekonomian Pulau Jawa bagian utara dan selatan (arteri primer, kereta api, bandara, dan pelabuhan), memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional dan 11 Pusat Kegiatan Wilayah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, serta memiliki empat sektor strategis yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.



Gambar 2.1.
Letak dan Peran Strategis Provinsi Jawa Tengah

b. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang menjadi potensi produk dan komoditas unggulan untuk dikembangkan dan dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah. Hal ini didukung dengan kondisi topografi Jawa Tengah yang terbagi menjadi tiga wilayah meliputi ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut (dpl) di sepanjang pantai utara (53,3 persen), 100-500 m dpl di bagian tengah (27,4 persen), 500-1.000 m dpl (14,7 persen), di atas 1.000 m dpl (4,6 persen) di bagian tengah. Jawa Tengah dengan topografi yang berbeda-beda menjadi potensi keindahan alam sebagai destinasi wisata seperti wilayah di Kabupaten Wonosobo yang dikenal sebagai wilayah tertinggi di Jawa Tengah atau wilayah pesisir seperti Kabupaten Jepara.

Kondisi tersebut didukung pula dengan kondisi iklim Jawa Tengah yang termasuk kategori iklim tropis basah yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah di wilayah Jawa Tengah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Suhu udara di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 67 persen sampai dengan 87 persen. Curah hujan tertinggi sebesar 2.799 mm dan hari hujan terbanyak sebanyak 161 hari.

Potensi sumber daya alam Jawa Tengah juga salah satunya tergambar dari kondisi geologi di wilayah Jawa Tengah. Kondisi geologi Jawa Tengah ditunjukkan dengan jenis tanah yang meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta grumosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi.

Secara fungsional ekologis berdasarkan wilayah sungai, daerah aliran sungai (DAS), dan cekungan air tanah (CAT), wilayah Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut. Wilayah sungai di Jawa Tengah terbagi menjadi 10 wilayah yaitu Cimanuk Cisanggarung, Jratun Seluna, Bengawan Solo, Progo Opak Serang, Serayu Bogowonto, Citanduy, Pemali Comal, Bodri Kuto, Wiso Gelis, dan Kepulauan Karimunjawa. DAS di Jawa Tengah cukup banyak dengan 18 DAS di

antaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan daya dukungnya dengan luas $\pm 2.334.700,35$ ha atau sekitar ± 71 persen dari total luas Jawa Tengah meliputi DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jawa Tengah, DIY), DAS Bengawan Solo (Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY), DAS Citanduy (Jawa Barat, Jawa Tengah), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jawa Tengah, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono.

Wilayah Jawa Tengah juga memiliki potensi CAT sebanyak 31 CAT, terbagi menjadi 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 19 CAT lintas kabupaten/kota, dan 6 CAT lintas kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain. Potensi air tanah bebas CAT lintas provinsi sebesar 411,15 juta m^3 /tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 6.575,64 juta m^3 /tahun, dan CAT dalam kabupaten sebesar 355,20 juta m^3 /tahun. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 544/29 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Bodri Kuto, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa kewenangan pengelolaan CAT diatur sesuai dengan kewenangan wilayah sungai. Dari 31 CAT yang ada di Jawa Tengah hanya 4 CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu.

Penggunaan lahan di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2021 didominasi oleh pertanian baik lahan basah maupun pertanian lahan kering dengan rincian lahan basah totalnya mencapai 47,96 persen dari total wilayah. Untuk lahan terbangun saat ini mencapai 19,39 persen atau seluas 665.708 ha. Selain itu lahan dengan tutupan vegetasi hutan mencapai 18,86 persen dari total wilayah.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan beragam potensi produk dan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dan dijadikan potensi ekonomi daerah untuk memajukan perekonomian daerah Jawa Tengah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisis potensi sektor-sektor potensial dan unggulan daerah Jawa Tengah yang digambarkan sebagai berikut: 1) sektor potensial meliputi sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; konstruksi; serta jasa pendidikan; 2) sektor unggulan meliputi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; 3) sektor berkembang meliputi sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; serta 4) sektor lainnya yang menjadi sektor terbelakang.

Selain itu, wilayah Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan keanekaragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang melimpah. Dari hulu hingga hilir, setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki keunikan sendiri dalam menghasilkan produk unggulan. Produk unggulan daerah adalah produk yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Sebaran produk unggulan di setiap kabupaten/kota berbasis 10 wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi:

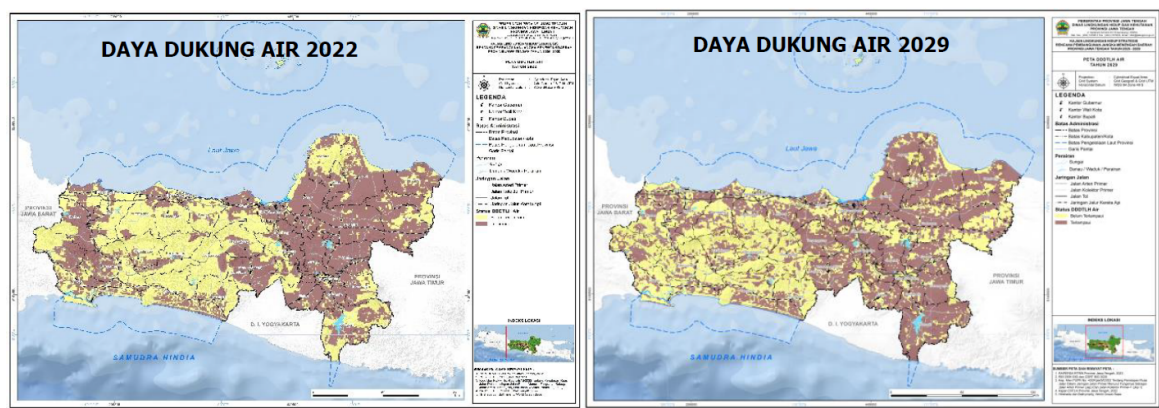
- 1) WP Kedungsepur, dengan produk unggulan yang menggunakan bahan baku lokal beragam seperti kayu, logam, keramik, dan hasil pertanian, dengan potensi besar untuk pengembangan industri kreatif dan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam dan keahlian lokal;
- 2) WP Bregasmalang, memiliki keunggulan dalam bahan baku lokal yang digunakan untuk memproduksi produk unggulan;
- 3) WP Jekuti, memiliki keunggulan produk unggulan yang berasal dari bahan baku lokal antardaerah dan berbahan baku kayu;
- 4) WP Banglor, memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor industri pengolahan kayu;
- 5) WP Subosukawonosraten, memiliki produk unggulan yang bervariasi dari makanan, kerajinan tangan, hingga barang-barang rumah tangga;
- 6) WP Gelangmanggung, memiliki produk unggulan dari bahan baku lokal dengan inovasi dan variasi produk terutama produk makanan, minuman, variasi produk dari industri tembakau lokal, dan produk kerajinan;
- 7) WP Wonobanjar, memiliki potensi produk unggulan dalam industri makanan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat serta menggali inovasi pengolahan bahan pangan seperti tepung mokaf;
- 8) WP Keburejo, memiliki potensi produk unggulan dari bahan baku lokal yang bervariasi terutama produk makan, minuman, dan kerajinan alam;
- 9) WP Petanglong, memiliki potensi keragaman industri lokal dengan inovasi pemanfaatan sumber daya alam lokal serta bahan daur ulang;
- 10) WP Cibalingmas, memiliki potensi produk unggulan yang berasal dari keragaman industri lokal dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang beragam untuk menghasilkan produk berkualitas.

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Selanjutnya, terkait dengan daya dukung dan daya tampung di Jawa Tengah digambarkan dengan kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) yang diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Kelangkaan pangan disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif. Sementara itu, krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.

Daya dukung air mengalami tren penurunan menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan rasio daya dukung air pada tahun 2022 sebesar 0,95 dan diperkirakan menjadi sebesar 0,82 pada tahun 2029. Apabila dilihat dari distribusi wilayah, dari total wilayah Jawa Tengah status daya dukung dan daya tampung air pada tahun 2022 yang sudah terlampaui mencapai 47,55 persen dan yang belum terlampaui sebesar 52,45 persen, dengan defisit sebesar 1.686.637.322,01 m³/tahun. Sedangkan pada tahun 2029, status daya dukung dan daya tampung air diproyeksikan terlampaui mencapai 55,31 persen dan yang belum terlampaui sebesar 44,69 persen dari total wilayah Jawa Tengah dengan defisit sebesar 6.372.532.528,05 m³/tahun. Berdasarkan pemetaan daya dukung dan daya tampung air Jawa Tengah, pada tahun 2022 terdapat 20 kabupaten/kota

dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui, dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 25 kabupaten/kota pada tahun 2029.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.2.
Prakiraan Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029
Business as Usual (BAU)

Konservasi air tanah juga terus diupayakan di tengah tingginya eksploitasi air tanah baik oleh sektor industri, pertanian maupun rumah tangga. Air tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Kondisi yang belum seimbang antara pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan air baku yang belum memadai mengakibatkan potensi air tanah semakin terancam. Pengelolaan air tanah saat ini berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) pada Wilayah Sungai (WS) karena prinsip pengelolaan sumber daya air harus ada keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Air tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan.

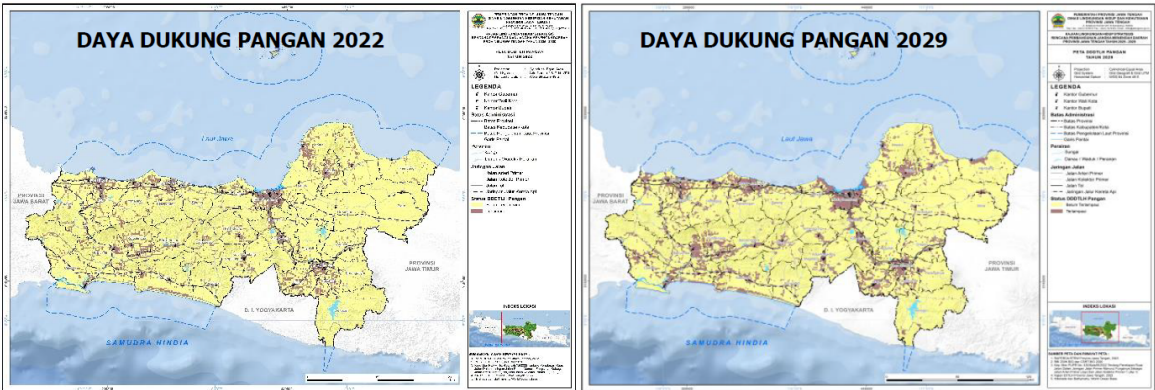
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pemanfaatan air tanah yang berlebihan dapat berdampak pada terjadinya *land subsidence* atau amblesan tanah. Kondisi tersebut saat ini telah terjadi di Jawa Tengah terutama pada wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah. Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi di CAT Jawa Tengah tahun 2023, CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang terdapat zona rusak. Kejadian *land subsidence* juga tercatat terjadi di kabupaten/kota di wilayah pesisir pantai utara di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Amblesan tanah yang terjadi bervariasi dengan laju penurunan 1-20 cm per tahun berdasarkan hasil pengukuran geodetik, geo-hidrologi, geoteknik, dan lain-lain. Meskipun demikian, kejadian *land subsidence* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dikaji secara komprehensif untuk mengetahui faktor utama yang berperan dengan mempertimbangkan kondisi geologi permukaan maupun bawah permukaan. Baik disebabkan oleh faktor antropogenik (aktivitas manusia) seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, efek pembebanan (*loading effect*), maupun faktor penyebab lain yang sifatnya *non-antropogenik*, yaitu kompaksi alamiah dari jenis tanah lunak dan efek *tectonic subsidence* akibat dari pergerakan patahan bumi. Hampir semua kota di pesisir utara Jawa Tengah terbentuk di atas tanah aluvial yang rapuh.

Kondisi air tanah di Jawa Tengah saat ini ditunjukkan dengan Indeks Ketersediaan Air Tanah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 3,08

pada tahun 2019 menjadi 3,65 pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam hal konservasi air tanah dengan menjaga ketersediaan air tanah (indeks batas minimum aman konservasi air tanah di atas 1,67). Capaian ketersediaan air tanah diintervensi melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah sesuai kewenangan serta pembangunan sarana prasarana/infrastruktur konservasi air tanah.

Selanjutnya, berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk dan juga ketersediaan lahan pertanian yang dikendalikan melalui RTRW Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan daya dukung pangan pada tahun 2029 belum terlampaui atau surplus. Diperkirakan pada tahun 2029, rasio daya dukung pangan akan naik dari 1,97 menjadi 2,01 (naik sebesar 2,03 persen). Selain itu daya dukung pangan juga semakin menurun dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Hal tersebut diperparah dengan adanya dampak dari perubahan iklim yang berakibat meningkatnya serangan hama, penyakit, dan kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen. Daya dukung pangan juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan pasokan air yang juga semakin menurun terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi Jawa Tengah khususnya pada ketersediaan dan keterjangkauan atau akses pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan.

Daya dukung pangan Jawa Tengah pada tahun 2029 diproyeksikan memiliki total ketersediaan 5.998.603,24 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.977.399,72 ton beras, sehingga kondisinya surplus sebesar 3.021.203,52 ton beras. Apabila dilihat berdasarkan wilayahnya dari hasil pemetaan dengan sistem grid, terdapat 17,20 persen wilayah dengan daya dukung pangan sudah terlampaui dan 82,80 persen wilayah dalam kondisi daya dukung pangan belum terlampaui. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Apabila dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.3.

**Prakiraan Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029
Business as Usual (BAU)**

Lebih lanjut rincian status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di Jawa Tengah pada tahun 2022 dan 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029

Uraian	2022	2029
Air		
Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	31.032.527.608,75	29.400.411.285,16
Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	32.719.164.930,76	35.772.943.813,21
Selisih (m ³ /tahun)	-1.686.637.322,01	-6.372.532.528,05
Status	Terlampau	Terlampau
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	0,95	0,82
Pangan		
Ketersediaan Pangan Beras (ton/tahun)	5.508.531,00	6.998.603,24
Kebutuhan Pangan Beras (ton/tahun)	2.792.243,71	2.977.399,72
Selisih (m ³ /tahun)	2.716.287,29	3.021.203,52
Status	Belum Terlampau	Belum Terlampau
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	1,97	2,01

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023

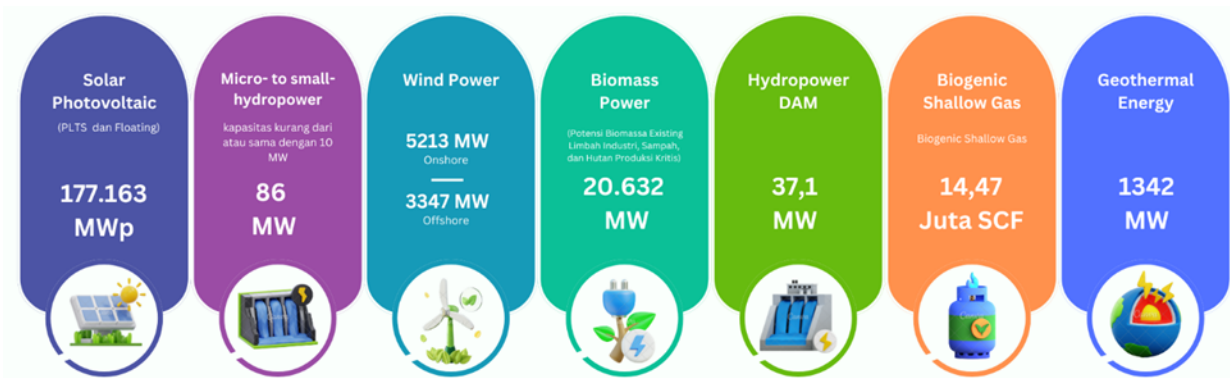
d. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Selanjutnya, gambaran kondisi **ketahanan energi** di Jawa Tengah sebagai berikut. Selain air dan pangan, kebutuhan akan energi di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Di sisi lain porsi EBT dalam bauran energi Jawa Tengah sebesar 18,55 persen (2024). Meskipun persentase porsi EBT dalam bauran energi terus meningkat secara bertahap namun persentasenya masih dibawah energi fosil yang masih mendominasi di atas 80 persen. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil.

Sementara itu, jika mencermati data intensitas energi primer di Provinsi Jawa Tengah menggambarkan angka yang cukup baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional. Capaian intensitas energi primer Provinsi Jawa Tengah (2024) yaitu sebesar 131 Setara Barel Minyak (SBM)/milyar rupiah. Perhitungan intensitas energi berdasarkan PDRB harga konstan. Sedangkan capaian intensitas energi primer nasional pada tahun 2024 sebesar 133 SBM/milyar rupiah. Artinya untuk menghasilkan satu milyar rupiah Jawa Tengah harus mengonsumsi 131 SBM. Sedangkan nasional untuk menghasilkan satu milyar rupiah harus mengonsumsi 133 SBM. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa konsumsi energi Jawa Tengah lebih efisien jika dibandingkan dengan konsumsi energi nasional. Energi pada dasarnya memiliki harga yang mahal karena cadangan yang ada akan semakin menipis. Namun karena adanya subsidi dari Pemerintah Pusat, masyarakat merasa bahwa energi sangat murah dan belum memiliki pola pikir untuk berhemat energi. Sehingga perlu adanya program konservasi energi agar energi dapat dimanfaatkan secara efisien dan mengurangi potensi krisis energi.

Jawa Tengah memiliki banyak potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Sumber energi baru terbarukan

yang banyak dikembangkan di Jawa Tengah berupa energi surya, terjunan air, panas bumi, *bioethanol*, *biofuel*, biomassa, biogas, dan gas rawa. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam pemanfaatan sumber EBT dengan mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Berikut potensi EBT di Jawa Tengah berdasarkan data dari Kementerian ESDM.



Sumber: Kementerian ESDM dan Laporan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4.
Potensi Teknis Energi Baru Terbarukan Provinsi Jawa Tengah

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya lain yang dilakukan di Jawa Tengah adalah mewujudkan kemandirian energi dengan melibatkan peran aktif masyarakat antara lain melalui pengembangan Desa Mandiri Energi (DME). Capaian kinerja DME di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.460 desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting sejumlah 2.268 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting sejumlah 164 desa, dan DME Mapan sejumlah 28 desa. Desa mandiri energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pemerintah desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan transisi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki infrastruktur energi yang cukup beragam mencakup pembangkit listrik berbasis fosil dan nonfosil. Dominasi energi fosil khususnya melalui PLTU berbahan bakar batubara masih besar dengan kapasitas besar yang terpusat di beberapa pembangkit besar seperti PLTU Tanjung Jati (2.644 MW), PLTU Batang (2.000 MW), PLTU IPP Cilacap (1.176 MW), PLTU Jawa 8 (1.000 MW), PLTU Adipala (615 MW), PLTU Rembang (560 MW), dan PLTU Tambak Lorok (110 MW), yang saat ini mengambil porsi 12 persen dari total kebutuhan listrik Jawa – Bali.

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan juga terus dilakukan. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geothermal yang mendukung seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP Gunung Lawu. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar ±60 MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 MW. Pengembangan energi panas bumi di Jawa Tengah tidak hanya berkontribusi pada diversifikasi sumber energi, tetapi juga membantu dalam mencapai target

energi terbarukan nasional. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jawa Tengah diantaranya PLTA Mrica (3x60 MW), PLTA Wadaslintang (2x8,2 MW), PLTA Ketenger (2x3,52 MW), PLTA Garung (2x13,2 MW), PLTA Kedungombo (23 MW), dan PLTA Gajahmungkur (12,4 MW). Keberadaan PLTA di Jawa Tengah tidak hanya membantu dalam penyediaan listrik yang ramah lingkungan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan melibatkan komunitas lokal dan mengadopsi teknologi terbaru, potensi PLTA di Jawa Tengah dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberlanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur gas bumi juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan gas bumi di Jawa Tengah bervariasi, dari *Compressed Natural Gas (CNG) Truck*, *Liquefied Natural Gas (LNG)*, sampai dengan pipa gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah, utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai ±17.500 SR (Sambungan Rumah). Jaringan pipa gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu Cisem Tahap I (Semarang-Batang) telah mendukung industri di Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan pipa transmisi gas Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang dibangun tahun 2024 hingga 2025.

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan pipa gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem (Gresik-Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa Tengah. Kombinasi ini memperkuat fondasi energi provinsi dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.

Keandalan sistem listrik di Jawa Tengah menjadi sangat tinggi dengan angka rasio ketersediaan daya listrik Jawa Tengah saat ini sebesar 1,49 pada tahun 2024. Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki *reserve margin*/cadangan sebesar 49 persen. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri baru dan ekspansi industri eksisting agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di

wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di kawasan industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang *Industrial Park* (KI Segayung), *Grand Batang City* (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), Bukit Semarang Baru *Industrial Park*, Jatengland *Industrial Park* Sayung, *Aviarna Industrial Estate*, KI Candi, dan KI Cilacap. Tantangan ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusi nya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Seiring dengan peningkatan rasio ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah, berbanding lurus dengan tingkat energi terjual listrik di Jawa Tengah. Energi terjual listrik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari data Buku Statistik PLN. Selama kurun waktu 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan energi terjual dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024. Kenaikan tersebut sekitar 54,8 persen dibanding tahun 2014. Kenaikan penjualan listrik menjadi sinyal bahwa perekonomian Jawa Tengah tumbuh dengan baik. Setelah berkontraksi dengan peristiwa Covid-19, aktivitas masyarakat kembali pulih sehingga mendorong peningkatan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan retail.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2024 konsumsi listrik per kapita Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari 585,62 kWh per kapita menjadi 802,05 kWh per kapita. Meskipun demikian kondisi tersebut masih di bawah provinsi tetangga di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (1.410 kWh/kapita), Jawa Timur (1.131 kWh/kapita), DKI Jakarta (3.138 kWh/kapita), dan Banten (3.037 kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita di suatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Kenaikan konsumsi listrik tersebut salah satunya didorong oleh peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Tengah.

Rasio elektrifikasi di Jawa Tengah saat ini telah mendekati 100 persen. Rasio elektrifikasi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah sudah menikmati layanan energi listrik. Rasio elektrifikasi menggambarkan ketahanan energi yang terjangkau dan inklusif melalui pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Tahun 2014 rasio elektrifikasi Jawa Tengah baru mencapai 88,37 persen. Kemudian sampai dengan tahun 2024 rasio elektrifikasi Jawa Tengah telah mencapai 99,99 persen.

Pada sektor pertambangan, praktik baik pertambangan di Jawa Tengah terus didorong melalui penilaian dan penghargaan *Good Mining Practice* (GMP) pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Persentase GMP tahun 2019 sebesar 85 persen sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 63,37 persen karena penilaian Tahun 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih detail berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Praktik pengelolaan pertambangan baik terus

didorong mengingat potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah yang cukup tinggi dan tersebar di 35 kabupaten/kota agar pemanfaatannya tidak merusak lingkungan. Potensi mineral dan batuan dapat digunakan sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun proyek strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk proyek strategis nasional di Jawa Tengah adalah sebesar ± 113 juta m^3 , akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ± 31 juta m^3 . Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, kondisi **ketahanan pangan** Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional mulai tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada tahun 2019, indeks ketahanan pangan Jawa Tengah sebesar 78,85, dan pada tahun 2024 menjadi 85,34, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan Sangat Tahan. Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment (PoU)* atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat mulai tahun 2019. Kondisi PoU Jawa Tengah mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dari penurunan nilai PoU yaitu sebesar 11,61 persen pada tahun 2019 menjadi 10,44 persen pada tahun 2023. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin menurun.

Gambaran terkait **ketahanan air** di Jawa Tengah ditunjukkan dengan ketersediaan air khususnya untuk air baku. Kapasitas air baku di Jawa Tengah sebesar 484,4 juta m^3 /tahun atau 15,36 m^3 /detik pada tahun 2024. Kondisi ketersediaan air di Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 44 bangunan bendungan/waduk (11 waduk besar dan 33 waduk kecil), sehingga pemenuhan kebutuhan air minum di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 50,12 persen menjadi 62,5 persen di tahun 2024. Selain itu, kinerja irigasi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan Provinsi yang telah mencapai 75,95 pada tahun 2021, kemudian terdampak realokasi anggaran akibat Covid-19 sehingga menurun menjadi 68,27 pada tahun 2022 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 69,11 pada tahun 2024. Kondisi sungai baik kewenangan provinsi juga mengalami peningkatan dari 53,16 persen pada tahun 2018 menjadi 52,37 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya cakupan akses air minum yang dikelola secara aman hingga tahun 2024 telah mencapai 40,86 persen, meningkat setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan sebesar 32,24 persen. Hal tersebut selaras dengan meningkatnya cakupan akses jaringan perpipaan yang hingga tahun 2024 telah mencapai 52,48 persen, mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan sebesar 43,74 persen.

e. **Lingkungan Hidup Berkualitas**

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran **kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup** ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 poin, dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 (angka capaian sementara). Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IKLH nasional setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) dikarenakan peningkatan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan.



Sumber: KLHK, 2025
*Capaian IKLH 2024 Provinsi dan Nasional adalah angka sementara

Gambar 2.5.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Keanekaragaman hayati di Jawa Tengah meliputi ekosistem, spesies dan genetik secara langsung dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi. Keberadaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang yang terjaga dengan baik dapat meningkatkan stok hasil perikanan tangkap serta melindungi garis pantai. Sedangkan adanya hutan hujan tropis dapat memproduksi hasil hutan (kayu dan non kayu) sekaligus menstabilkan fungsi hidrologi. Di Jawa Tengah terdapat 110 spesies flora dan 121 spesies satwa yang dilindungi berdasarkan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, dan beberapa di antaranya tergolong satwa dan flora endemik yang terancam punah seperti penyu hijau, owa Jawa, trenggiling, macan tutul, dan elang Jawa, serta flora endemik seperti bunga bangkai raksasa, sarangan, edelweis dan kantung semar. Selain itu, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki sumber daya genetik flora dan fauna lokal unggul sebagai potensi sumber pangan bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman hortikultura antara lain kelapa genjah entog, durian Sambeng, nanas madu Belik, dan ternak seperti sapi peranakan ongole Kebumen, kambing peranakan etawa galur Kaligesing, dan domba Batur. Namun demikian kelestarian keanekaragaman hayati di Jawa Tengah sangat tergantung dari pemanfaatan berkelanjutan dan pengurangan ancaman melalui penggunaan varietas/jenis unggul, pengembangan potensi bioprospeksi pangan dan farmasi, serta rehabilitasi dan konservasi habitat.

Jawa Tengah memiliki kawasan hutan/hutan negara seluas ±767.026,21 ha (termasuk Taman Nasional Laut seluas ±117.033,97 ha) dan hutan rakyat seluas ±682.425,64 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Jawa Tengah seluas

±1.332.417,89 ha. Hutan di Jawa Tengah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan baik manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.

Sementara hutan mangrove di Jawa Tengah pada tahun 2023 seluas 15.089 ha mangrove eksisting dan 44.784 ha potensi habitat mangrove eksisting yang penutupan lahannya telah berubah. Dengan demikian lahan yang dapat dikembangkan untuk mangrove secara total mencapai 59.873 ha di mana sebesar 15.089 ha atau 25,2 persen dalam bentuk ekosistem mangrove, sedangkan 74,8 persen kondisinya dalam bentuk lahan terbuka dan tambak.

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran pada tahun 2023 sebesar 3,39. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar sedang yaitu Sungai Palur. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2023 sebesar 81,39. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 86,35.

Sedangkan **kondisi persampahan** di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbulan sampah di Jawa Tengah. Jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah mencapai 6.363.806 ton/tahun dan pada tahun 2023 mencapai 6.338.109,37 ton per tahun atau turun 0,40 persen dibandingkan tahun 2022. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2023 baru mencapai 3.912.331,17 ton per tahun (61,73 persen) dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.321.899,86 (20,86 persen) dan penanganan sampah sebesar 2.590.431,31 (40,87 persen). Capaian ini naik dari tahun 2022 yang mencapai 3.908.823 ton per tahun atau 61,42 persen dari total sampah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di Jawa Tengah. Meski demikian capaian pengolahan sampah yang meliputi komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (*material recovery*) masih rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022 (SEB Bappenas-Kemendagri). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IPKS) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 49 poin. Sedangkan capaian indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun 2022 sebesar 25 persen (SEB Bappenas-Kemendagri).

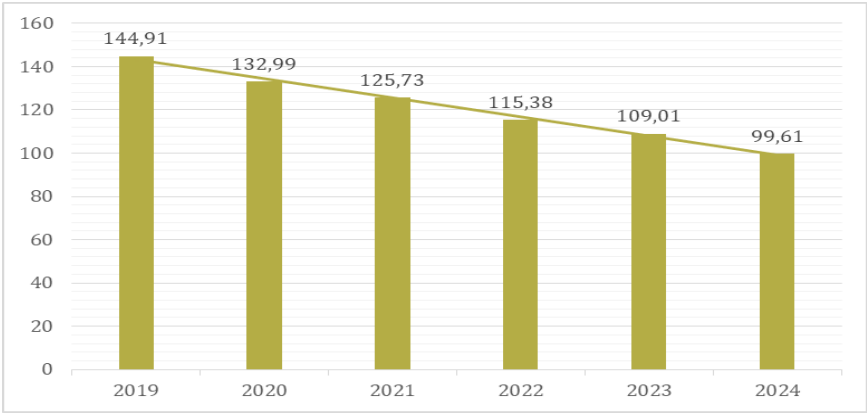
Penanganan sampah di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pengelolaan sampah di TPA. Saat ini sebanyak 37 dari 46 TPA yang ada di Jawa Tengah kondisinya sudah *overload*. Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini menjadi sorotan tersendiri. Selain karena jumlah timbulan yang semakin meningkat dan jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi

TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem *open dumping*. Biaya untuk beralih ke sistem *sanitary landfill*, TPST, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (seperti *waste to energy*) masih cukup tinggi, sehingga sejauh ini alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping*. Selain itu masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai. Penerapan sistem *open dumping* menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tersebut belum sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah yang seharusnya. Dari segi pengurangan sampah, sudah dilakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan TPS3R yang tersebar di Kabupaten/Kota. Konsep pengurangan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA terutama sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2023 jumlah bank sampah di Jawa Tengah mencapai 3.176 unit dan TPS3R sebanyak 427 unit.

Pengendalian pencemaran dari air limbah domestik juga terus diupayakan. Meskipun demikian berdasarkan data BPS, hingga tahun 2024 persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih rendah yaitu 10,84 persen, meskipun sedikit meningkat dibandingkan data lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 capaian sebesar 10,51 persen.

f. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Jawa Tengah merupakan daerah **rawan bencana**. Berdasarkan data sejarah kejadian bencana menunjukkan bahaya yang ada di Jawa Tengah meliputi banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, serta epidemi dan wabah penyakit. Selain bahaya yang telah tercatat, Jawa Tengah juga memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi kelas rendah hingga tinggi dan potensi bahaya likuifaksi kelas sedang hingga tinggi. Dalam enam tahun terakhir Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan menurun dari 144,91 atau kategori tinggi pada tahun 2019 dengan 17 kabupaten/kota pada kategori risiko tinggi menjadi 99,61 atau kategori sedang pada tahun 2024 dengan 35 kabupaten/kota pada tingkat risiko kategori sedang.

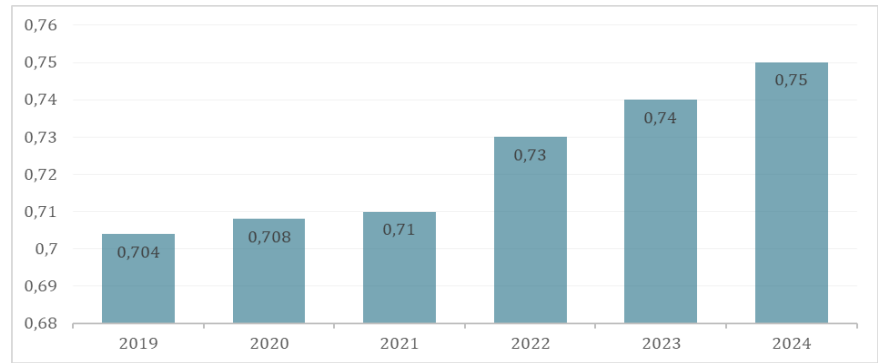


Sumber: BNPB, 2024

Gambar 2.6.
Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3)

Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,704 pada tahun 2019 menjadi 0,75 pada tahun 2024.

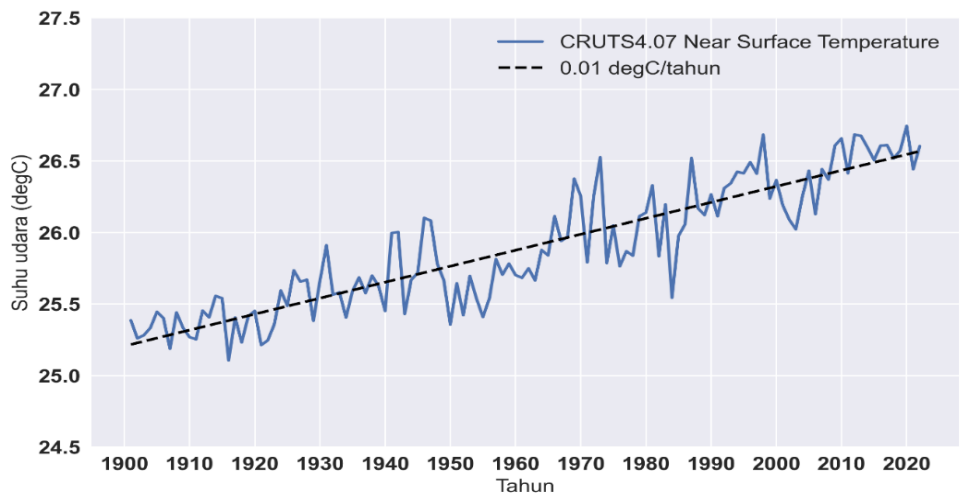


Sumber: BPBD, 2024

Gambar 2.7.
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

Pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru sangat mempengaruhi pembukaan lahan baru dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya bencana, diantaranya banjir maupun banjir bandang, longsor dan kebakaran hutan serta lahan. Diperlukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi di wilayah pertumbuhan ekonomi baru, baik melalui mitigasi struktural maupun nonstruktural untuk menjawab tantangan ke depan akibat alih fungsi lahan maupun fenomena perubahan iklim. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarluaskan literasi mengenai kebencanaan, maupun peringatan dini saat akan terjadi bencana memainkan peran yang sangat penting saat ini untuk mengurangi korban jiwa maupun kerugian ekonomi akibat dampak bencana.

Selain itu, adanya fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Di Jawa Tengah, tren kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi adanya perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan data historis suhu udara rata-rata yang dimiliki yaitu selama periode 1901-2022 menunjukkan suhu udara rata-rata di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,01°C per tahun selama periode historis. Dengan kata lain di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi peningkatan suhu udara rata-rata lebih kurang sebesar 1°C selama pengamatan 120 tahun terakhir.

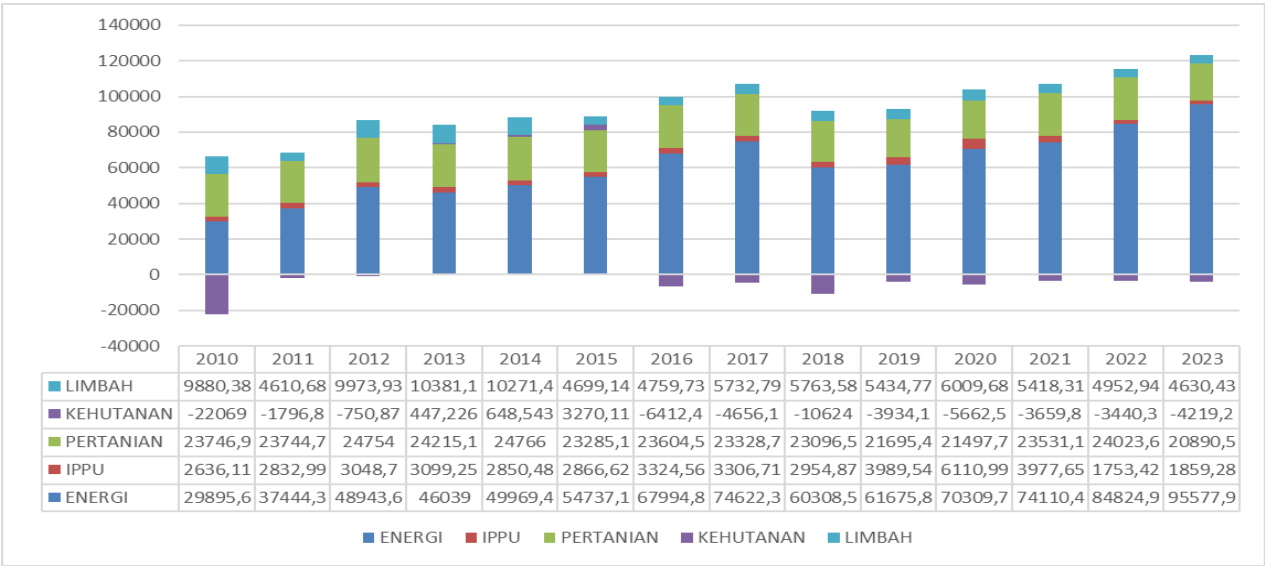


Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.8.
Tren Kenaikan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Provinsi Jawa Tengah

Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan Signsmart KLH, emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 118.738,93 GgCO₂e. Pada tahun 2023, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 95.577,87 GgCO₂e (80,49 persen), dan disusul sektor pertanian sebesar 20.890,54 GgCO₂e (17,59 persen). Peningkatan emisi dari sektor energi salah satunya disebabkan oleh beroperasionalnya PLTU Batang pada tahun 2022.

Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2023 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 219,71 persen dari 29.895,59 GgCO₂e pada tahun 2010 menjadi 95.577,87 GgCO₂e pada tahun 2023. Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat.



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (data diolah dari Signsmart KLH)

Gambar 2.9.
Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2023

Secara akumulasi, berdasarkan AKSARA BAPPENAS, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 mencapai 12,63 juta ton CO₂eq (status data final). Angka ini merupakan kinerja penurunan

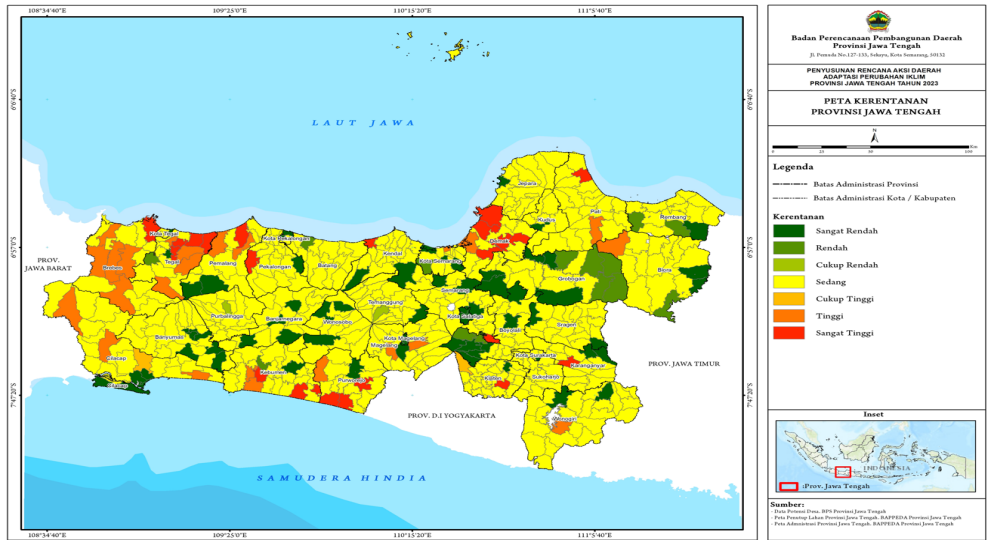
emisi GRK yang dilaporkan oleh provinsi, kabupaten/kota dan pihak nonpemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 4.481 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43 ton CO₂eq/milyar. Penurunan emisi terdiri dari 8 (delapan) sektor, yaitu air limbah, *blue carbon*, energi, industri (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi.

Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama periode 2021-2024 (data *cut off* Desember, 2024) di antaranya air limbah, *blue carbon*, energi, kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. Penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor transportasi sebesar 12.611.103,13 ton CO₂e atau 52 persen, sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 7.463.131,31 ton CO₂e atau 31 persen, dan sektor pertanian sebesar 2.615.587,15 ton CO₂e atau 11 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah *blue carbon* sebesar 45.160,23 ton CO₂e atau 0,19 persen.

Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana. Risiko bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah juga disebabkan oleh adanya perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut di wilayah Pantai Utara Jawa, dan cuaca ekstrem. Dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh wilayah Pantai Utara Jawa terutama Tanjung Emas, Demak, Pekalongan yang merupakan wilayah terdampak rob. Adanya pertumbuhan industri di Pantai Utara Jawa Pekalongan, Batang, Demak, Kota Semarang juga akan memperparah kondisi rob di wilayah tersebut. Sehingga perlu adanya kebijakan terkait pembatasan kegiatan industri di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Dampak lain adanya perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- Terjadinya kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan kerusakan tambak di daerah pesisir;
- Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk;
- Peningkatan intensitas cuaca ekstrem, memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan malaria;
- Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasaan flora dan fauna.

Berdasarkan *Indonesian Journal of Oceanography* (2021), terjadi peningkatan nilai muka air laut sejak tahun 1993 sekitar 37,545 mm per tahun. Tren kenaikan tercepat muka air laut di Laut Jawa mencapai nilai 72,313 mm pada tahun 2015-2016, sedangkan tren paling lambat terjadi pada tahun 2002-2005 sekitar 16,7 mm. Perubahan tren muka air laut yang ekstrim terjadi pada tahun 1996-1998 dan pada tahun 2010-2016 dikarenakan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Kenaikan muka air laut akan berdampak pada terjadinya intrusi air laut atau rob. Penyebab peningkatan kenaikan muka air laut, khususnya pada Provinsi Jawa Tengah, dipengaruhi oleh perubahan iklim serta amblesan tanah dampak dari penyedotan air tanah. Hasil kajian kerentanan iklim Jawa Tengah menyebutkan bahwa dari 576 kecamatan di Jawa Tengah terdapat 23 kecamatan (4 persen) di Jawa Tengah berada pada kategori kerentanan sangat tinggi dan 24 kecamatan (4 persen) berada pada kategori kerentanan tinggi. Sedangkan mayoritas kecamatan berada pada kategori kerentanan sedang sebanyak 442 kecamatan (77 persen).



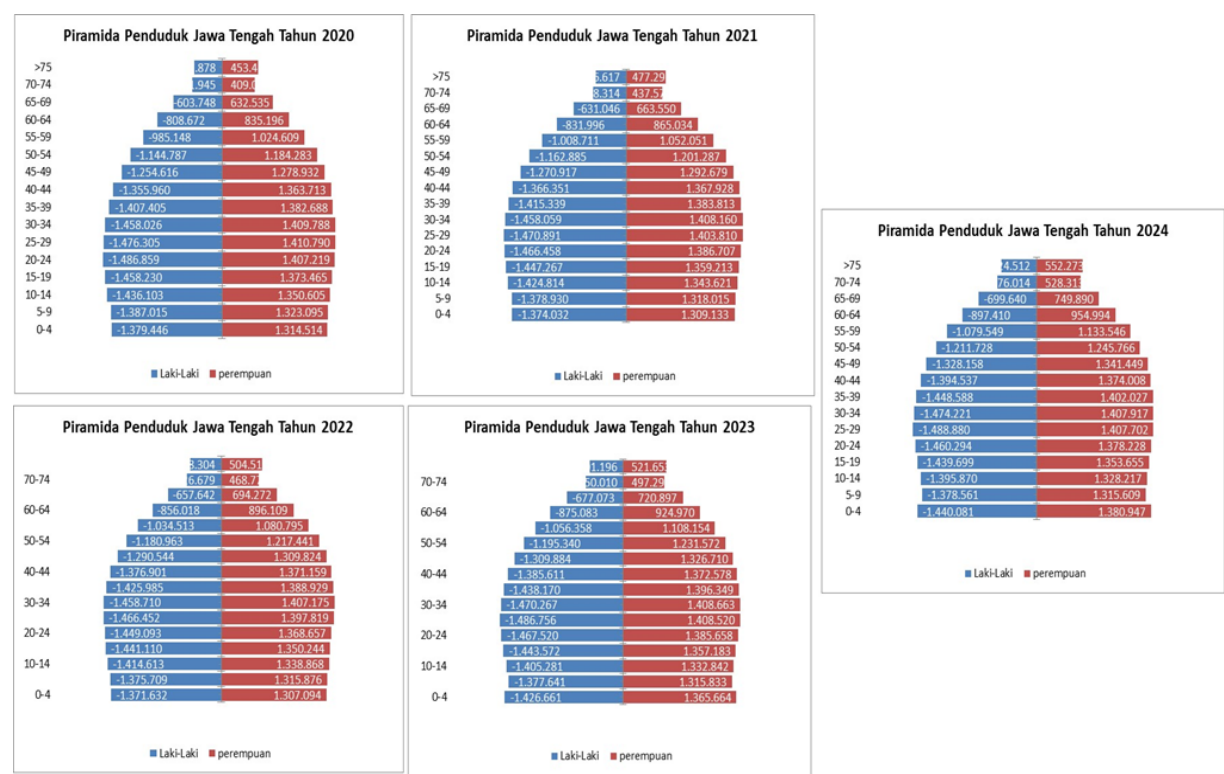
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.10.

Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah

g. Demografi

Kondisi demografi ditunjukkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 1.376.248 jiwa atau 3,77 persen. Dari sisi komposisi penduduk, Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki-laki dengan rasio kelamin rata-rata diatas 50 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan mengalami tren meningkat dari 43,16 di tahun 2020 menjadi 44,50 di tahun 2024. Peningkatan angka ketergantungan ini disumbang oleh jumlah penduduk lansia yang kian meningkat yaitu dari 7,72 persen di tahun 2020 menjadi 9,05 persen di tahun 2024. Dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Gambar 2.11.
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Kondisi demografi Jawa Tengah didukung dengan kinerja kependudukan yang digambarkan dari beberapa indikator kependudukan antara lain *Total Fertility Rate* (TFR), *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR), *Unmetneed* KB, dan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). Kondisi demografi Jawa Tengah didukung dengan kinerja kependudukan yang digambarkan dari beberapa indikator kependudukan antara lain *Total Fertility Rate* (TFR), *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR), *Unmetneed* KB, dan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). TFR Jawa Tengah berdasarkan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) periode 2021-2024 mengalami tren makin menurun sejak tahun 2022 setelah mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 1,91 menjadi 2,09 dan tahun 2024 TFR menjadi sebesar 2,03. Kondisi ini menggambarkan kebijakan pengendalian penduduk berhasil bahkan melampaui *replacement level* 2,1. Namun kondisi ini sekaligus menjadi peringatan jika TFR terus menurun akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pasokan sumber daya manusia produktif Jawa Tengah di masa yang akan datang. Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Jawa Tengah turut berperan penting dalam keberhasilan pengendalian penduduk di Jawa Tengah sehingga perlu untuk terus didorong. Capaian mCPR Jawa Tengah selama tahun 2021-2024 tercatat mengalami peningkatan dari 53,8 tahun 2021 menjadi 65,5 di tahun 2024. Seiring dengan makin meningkatnya mCPR perlu juga diwaspadai masih banyak pula pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meski tidak ingin memiliki anak atau menjarangkan kelahiran (*unmetneed*) yang tentu akan berpotensi pada meningkatnya kelahiran sewaktu waktu. Perkembangan *unmetneed* KB tercatat tahun 2022 sebesar 11,05 naik dari tahun 2017 yang sebesar 10,8, namun pada tahun 2023 turun menjadi sebesar 8,58 dan naik kembali menjadi 9,3. Selain itu terkait dengan perkembangan penduduk, tingginya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (*Age Specific*

Fertility Rate/ASFR 15-19 tahun) juga berpengaruh bagi kondisi kependudukan. Tidak hanya dari sisi kuantitas (menambah jumlah penduduk) tetapi juga kualitas. Dari sisi kualitas, kelahiran di usia 15-19 tahun (usia dini) dapat meningkatkan risiko kematian ibu melahirkan, anak yang dilahirkan prematur, berpotensi *stunting* dan beban psikologis bagi perempuan. Capaian ASFR 15-19 tahun Jawa Tengah periode 2021-2024 mengalami perkembangan tren yang meningkat jika diukur dari tahun 2021. Tercatat tahun 2021 sebesar 9,1 dan tahun 2024 sebesar 13,7. Meski masih tinggi capaian tahun 2024, namun dua tahun terakhir telah mengalami perbaikan dari kondisi tertinggi di tahun 2022 yang sebesar 23,09.

Karakteristik penduduk Jawa Tengah dikenal beragam. Berbagai macam suku tinggal di wilayah Jawa Tengah dengan segala perbedaan yang cukup beragam. Suku terbanyak yang tinggal di Jawa Tengah adalah suku Jawa yang mendiami sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Suku lainnya antara lain suku Sunda Priangan yang sebagian besar tinggal di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat (Cilacap dan Brebes), suku Cina yang cukup banyak tinggal di Kota Semarang, suku Batak, Madura, Arab, Betawi, Melayu, dan suku lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dari kepercayaan atau agama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam, diikuti dengan agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Di wilayah Jawa Tengah juga tercatat ada sebagian kecil penduduk yang menganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa wilayah tercatat memiliki kelompok penduduk tersebut antara lain di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Jawa Tengah juga masih memiliki kelompok masyarakat adat yang masih memiliki dan berpegang pada hukum adat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang masih eksis di Jawa Tengah salah satunya adalah kelompok masyarakat adat *sedulur sikep* atau yang juga dikenal dengan “Wong Samin”. Masyarakat adat tersebut masih mempertahankan dan menjalankan ajaran Samin yang mengembangkan ajaran hidup dilandaskan pada nilai-nilai kesetaraan/kesamaan (egaliter), kejujuran/polos, kesederhanaan, dan kearifan dalam bingkai filosofi kebersamaan dan gotong royong. Kelompok masyarakat adat lain yang masih eksis antara lain masyarakat adat kampung dan hutan adat Jalawastu Brebes yang memiliki adat istiadat *ngasa* dan hukum adat, masyarakat Kalang yang memiliki ritual Kalang Obong, dan masyarakat Bonokeling Banyuman yang memiliki adat istiadat *unggah-unggahan* dan *jaman* pusaka serta hukum adat.

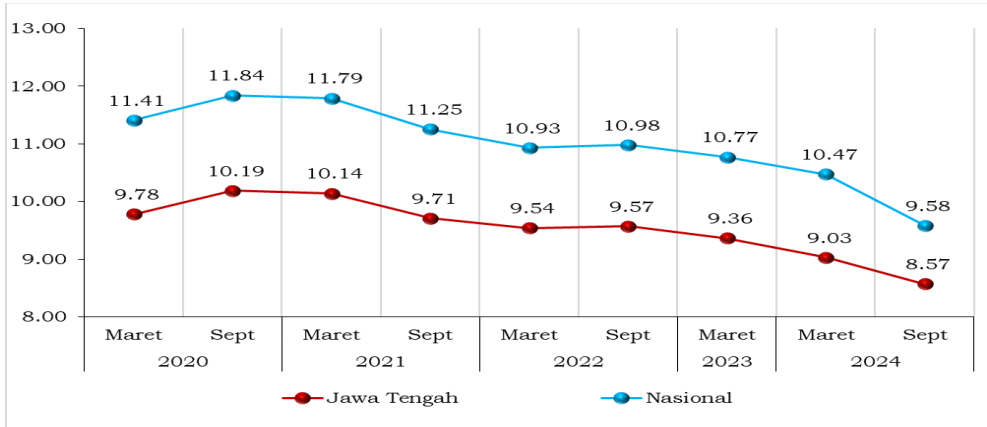
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan salah satunya dengan **kondisi kemiskinan**. Persentase penduduk miskin September 2024 menurun 0,89 persen poin menjadi 9,58 persen dibanding Maret 2024 yang sebesar 10,47 persen dengan jumlah penduduk miskin 3.396,34 ribu orang, turun sebesar 307,99 ribu orang terhadap Maret 2024. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2024 masih dominan di perdesaan yaitu sebesar 10,45 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 8,83 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 151,76 ribu orang dari 1.835,51 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 1.683,75 ribu orang pada September

2024, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 156,23 ribu orang dari 1.868,82 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 1.712,59 ribu orang pada September 2024.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2024
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

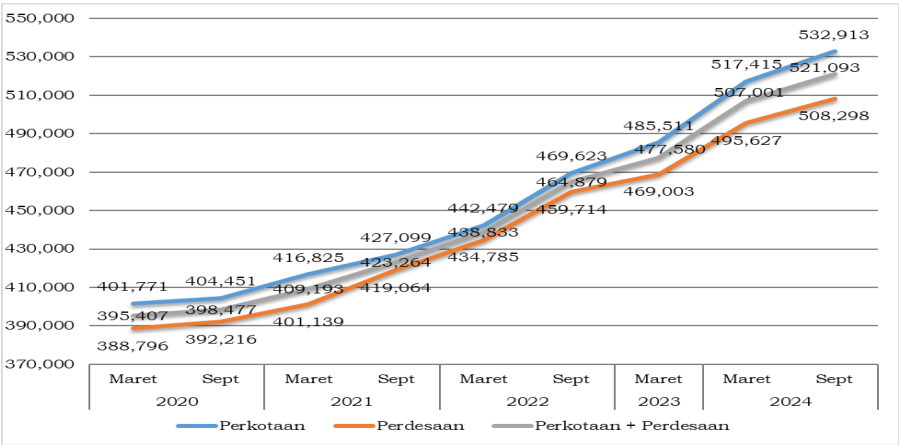
Gambar 2.12.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Persen)

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2024 sebesar Rp521.093 per kapita per bulan, meningkat 2,78 persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp507.093 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan September 2024 meliputi komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp392.697 per kapita per bulan sebesar 75,36 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp128.396 per kapita per bulan sebesar 24,64 persen. Pada periode September 2024 rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,45 orang anggota rumah tangga. Dengan kata lain, besarnya garis kemiskinan rumah tangga di Jawa Tengah secara rata-rata senilai Rp2.318.864 per rumah tangga miskin per bulan. Sementara pada Maret 2024 rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,50 orang, dengan besaran garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 sebesar Rp2.281.505 per rumah tangga miskin per bulan.

Garis kemiskinan di wilayah perkotaan periode September 2024 sebesar Rp532.913 per kapita per bulan atau naik 3,00 persen dari kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp517.415 per kapita per bulan. Sedangkan Garis kemiskinan di perdesaan periode September 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 2,56

persen menjadi sebesar Rp508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp495.627 per kapita per bulan sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

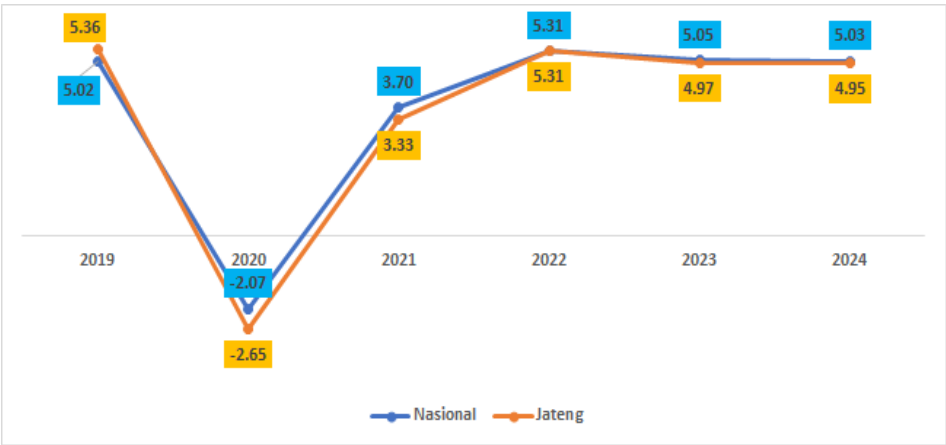
Gambar 2.13.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. P1 pada September 2024 sebesar 1,601, turun sebesar 0,039 dibandingkan Maret 2024. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pedesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,497, sedangkan di pedesaan mencapai 1,723. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 0,422 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. P2 pada September 2024 sebesar 0,365, turun sebesar 0,009 dibandingkan Maret 2024. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan pedesaan, nilai P2 pada periode September 2024 di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode September 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,347 turun 0,002 poin dibandingkan Maret 2024. Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah pedesaan mencapai sebesar 0,386 turun 0,017 poin dibandingkan Maret 2024.

Dari gambaran kemiskinan di atas, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah mengalami perbaikan namun masih diperlukan upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

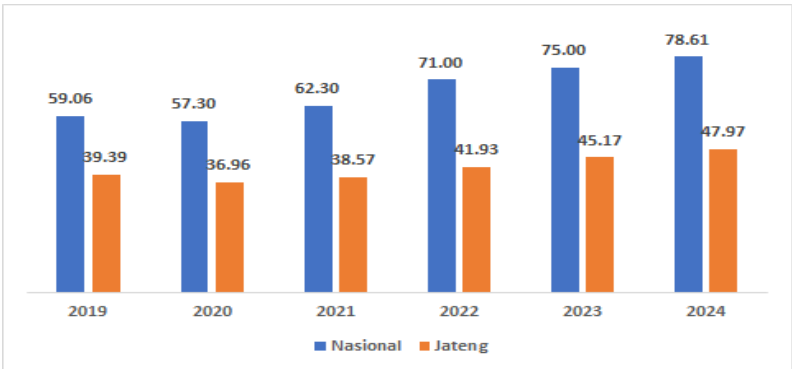
Perekonomian Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,97 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena *el nino* yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian. Pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95 persen di tengah ketidakpastian global walaupun masih di bawah nasional sebesar 5,03 persen. Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan penyumbang empat terbesar pada perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2024 (Persen)

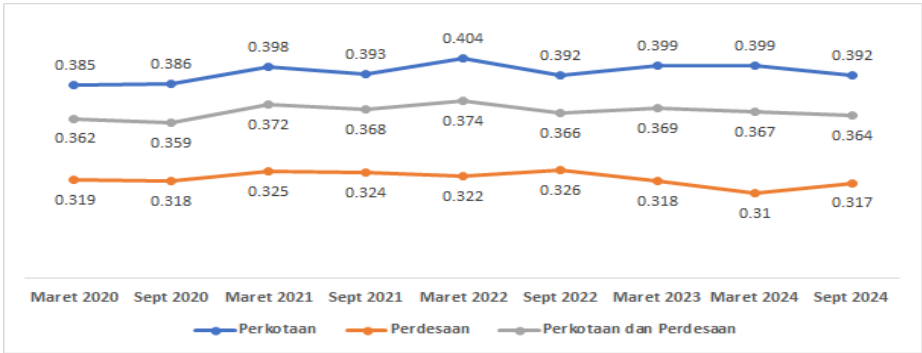
PDRB per kapita Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat, meskipun masih lebih rendah dari PDRB per kapita nasional. Tahun 2024 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,97 juta rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,39 juta rupiah. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, serta percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan pendapatan per kapita Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.15.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2019–2024 (Juta Rupiah)

Rasio Gini. Perekonomian daerah Jawa Tengah selain mampu tumbuh stabil, juga tumbuh merata dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan yang dapat dilihat dari Rasio Gini. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah menunjukkan tren turun. Ketimpangan tertinggi terjadi pada Maret 2022 yaitu sebesar 0,374 dikarenakan pandemi covid-19 dan kemudian berangsur turun menjadi sebesar 0,364 pada September Tahun 2024. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan.

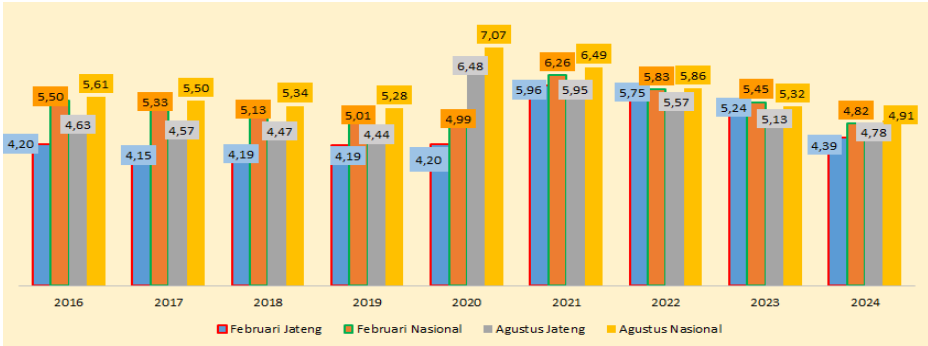


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.16.
Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan tempat tinggal, ketimpangan pengeluaran penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan ketimpangan di kawasan perdesaan. Pada September 2024 tercatat bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan adalah sebesar 0,392, dimana angka ini menurun jika dibandingkan capaian Maret 2024. Sedangkan pada wilayah perdesaan, angka rasio gini September 2024 adalah sebesar 0,317 menurun dibandingkan Maret 2023 dengan capaian sebesar 0,318. Fenomena ketimpangan yang tinggi di kawasan perkotaan juga berlangsung pada tingkat nasional. Hal ini mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan lebih mudah terpapar dampak pelemahan ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Rendahnya kapasitas tabungan/dana darurat serta menurunnya penghasilan di tengah penurunan aktivitas produksi menjadi penyebab rentannya golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil juga berpengaruh terhadap menurunnya pengangguran di Jawa Tengah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT Jawa Tengah pada bulan Agustus 2024 mencapai angka 4,78 persen yang berarti diantara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 4 (empat) orang penganggur. TPT Agustus 2024 turun sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPT nasional bulan Agustus 2024 lebih besar dibandingkan Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.17.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2024 (Persen)

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 4,83 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,71 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki turun sebesar 0,60 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,02 persen poin. Menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 5,19 persen, lebih tinggi dibanding TPT daerah perdesaan yang sebesar 4,29 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik TPT daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dan 0,46 persen poin.

TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang tidak jauh berbeda, baik pada Agustus 2024 maupun pada periode sebelumnya. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan SMA Kejuruan masih menjadi yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,52 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah tercatat bagi mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,59 persen

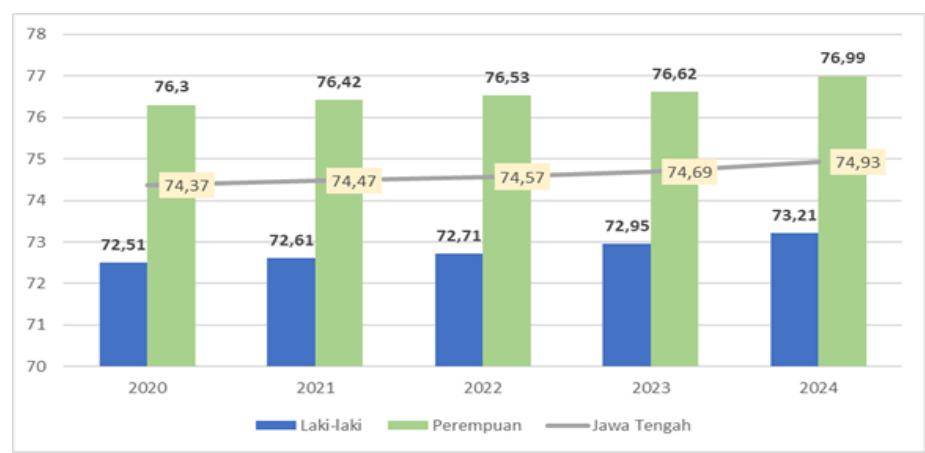
Tabel 2.2.
Karakteristik Pengangguran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Persen)

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019 persen	Agustus 2020 persen	Agustus 2021 persen	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2023-Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78	-0,35
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	4,74	7,13	6,54	5,75	5,43	4,83	-0,60
- Perempuan	4,02	5,57	5,14	5,31	4,69	4,71	0,02
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	5,09	7,73	7,06	7,39	5,46	5,19	-0,27
- Perdesaan	3,77	5,19	4,75	3,63	4,75	4,29	-0,46
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
SD ke Bawah	2,09	3,70	3,70	4,59	2,74	2,59	-0,15
Sekolah Menengah Pertama	4,64	6,40	6,87	5,55	5,04	4,11	-0,92
Sekolah Menengah Atas	6,26	8,41	7,32	7,21	7,09	6,41	-0,68
Sekolah Menengah Kejuruan	9,92	13,20	10,00	8,42	9,89	9,52	-0,37
Diploma I/II/III	3,59	6,46	5,66	2,95	5,09	4,74	-0,35
Diploma IV, S1, S2, S3	5,44	7,01	5,62	4,02	5,60	5,35	-0,25

Sumber: BPS, 2025

b. Kesehatan untuk Semua

Kondisi kesehatan untuk semua di Jawa Tengah diukur dengan kinerja Usia harapan hidup (UHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 74,93 tahun pada tahun 2024.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.18.
Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Angka kematian ibu (AKI) di Jawa Tengah tahun 2024 masih cukup tinggi meskipun angkanya terus menurun. Angka Kematian Ibu tahun 2024 mengalami tren membaik dari tahun 2021 sebanyak 1.011 kasus menjadi 427 kasus pada tahun 2024. Kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Kabupaten Brebes sebanyak 54 kasus, sedangkan kasus terendah di Kota Magelang dan Kota Tegal sebanyak 1 kasus. Penyebab terjadinya kasus kematian ibu antara lain hipertensi, perdarahan, infeksi masa nifas, abortus, jantung, gangguan metabolik, gangguan darah, gangguan ektropik, CA *Vulva Maligna*, TBC/*Pneumonia*, CA otak, krisis *tyroid*, *shock* septik, gagal ginjal, *diabetes milletus on pregnancy* 1, *suspect* jantung dengan obesitas 1, sirosis hepatitis, CA *mammae*, komplikasi nonobstetrik, serta nifas *post SC Morbili*.

Angka kematian bayi (AKB) tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. AKB tahun 2024 sebesar 7,57 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) sebanyak 4.326 kasus menurun dari tahun 2023 sebesar 8,02 per 1.000 KH sebanyak 4.612 kasus. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kematian bayi di Jawa Tengah tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 241 kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan.

Angka kematian balita (AKABA) di Jawa Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tren AKABA dari 8,99 per 1.000 KH pada tahun 2020 menjadi 8,20 per 1.000 KH pada 2022, meningkat menjadi 9,28 per 1.000 KH pada tahun 2023, kemudian menurun

menjadi 8,57 per 1.000 KH pada tahun 2024. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 4.834 kasus turun menjadi 4.699 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, meningkat menjadi 5.339 dan turun menjadi 4.898 kasus pada tahun 2024. Kasus tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 278 kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain *pneumonia*, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita.

Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah tahun 2023 tercatat juga masih cukup tinggi dan bahkan menjadi salah satu kontributor terbesar kasus *stunting* di tingkat nasional. Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 20,7 persen, *underweight* sebesar 14,5 persen, *wasting* sebesar 7,1 persen, dan *overweight* sebesar 4,2 persen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus *stunting* antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Faktor ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Jawa Tengah tahun 2024 mencapai angka 98,83 persen atau sejumlah 37.831.220 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 73,65 persen atau sejumlah 28.194.196 peserta dan peserta non aktif 74,53 persen atau sejumlah 9.637.024 peserta. Cakupan kepesertaan JKN diharapkan dapat mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Jawa Tengah.

c. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Selanjutnya **kinerja pendidikan** di Jawa Tengah ditunjukkan dengan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan selama 15 tahun terakhir, RLS dan HLS Jawa Tengah di bawah angka nasional. Rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMP atau 9,22 tahun pada tahun 2024, sementara Jawa Tengah hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,47 tahun. Demikian pula dengan HLS Jawa Tengah yang masih berada di bawah nasional sebesar 12,86 tahun pada tahun 2024, sedangkan nasional sudah mencapai 13,21 tahun.

Meskipun secara capaian absolut RLS dan HLS Jawa Tengah berada di bawah nasional, namun rata-rata kinerja pertumbuhannya setara dengan nasional. Kinerja HLS mengalami perlambatan sejak tahun 2014, sementara RLS cenderung fluktuatif. Indikasi penyebab rendahnya RLS dan HLS Jawa Tengah dibandingkan nasional adalah belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 500.000 jiwa di Jawa Tengah, serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategori *low skilled*.

RLS dan HLS dapat merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jawa Tengah, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas

pendidikan di Jawa Tengah. Untuk menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil asesmen nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam *platform* Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud. *Output* dari rapor pendidikan berupa capaian literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

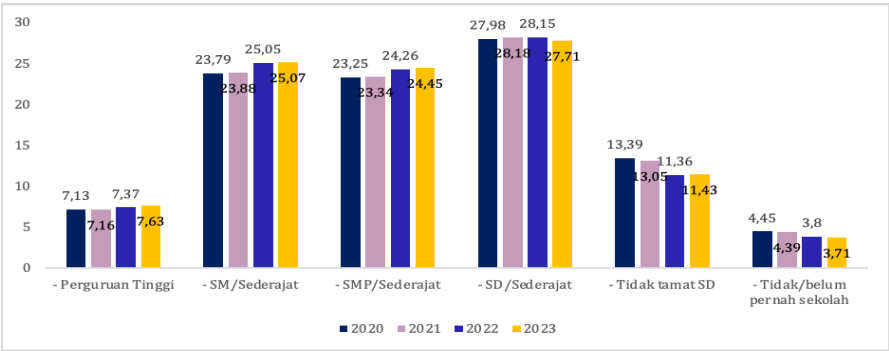
Dari seluruh kabupaten/kota dan satuan pendidikan di Jawa Tengah, persentase kabupaten/kota maupun satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian numerasi masih berada di bawah capaian literasi, yang hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih kurang.

Tabel 2.3.
Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada sesmen nasional untuk:			
a) Literasi Membaca	8,57	45,71	77,14
b) Numerasi	0,00	0,00	34,29
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk:			
a) Literasi Membaca	32,87	48,67	64,89
b) Numerasi	6,15	19,87	48,02

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari **tingkat pendidikan** masyarakat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Jawa Tengah ditunjukkan dengan persentase penduduk 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2020-2023. Tamatan SD, SMP dan SMA penduduk 15 tahun ke atas di Jawa Tengah mencapai kisaran 20 persen, namun untuk tamatan perguruan tinggi baik S1 maupun D4 sangat kecil yaitu 7 persen. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah kurang lebih 3-5 persen, termasuk tidak tamat SD mencapai 11–13 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.19.
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

d. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi **perlindungan sosial** di Jawa Tengah masih dihadapkan belum akuratnya penerima manfaat dan belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi, meskipun dari sisi cakupan telah memadai jika diakumulasikan baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN (Program Keluarga Harapan, BPNT Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BLT DBHCHT) maupun APBD (Program Kartu Jateng Sejahtera). Ke depan diharapkan perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh penduduk rentan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terdampak.

Selain itu permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian serius di Jawa Tengah yaitu masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data menunjukkan bahwa periode tahun 2020-2024, PPKS mengalami pasang surut, tercatat tahun 2021 PPKS mencapai puncak tertinggi sebesar 4.654.151 jiwa akibat dampak pandemi Covid-19 naik dari tahun 2020 yang sebesar 4.056.054. Namun seiring dengan makin pulihnya pandemi, PPKS berangsur mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4.007.316 jiwa. Tantangan penanganan PPKS di Jawa Tengah dihadapkan pada masih terbatasnya kapasitas panti milik provinsi. Tercatat panti sosial dan rumah pelayanan sosial (rumpel) milik provinsi saat ini berjumlah 56 unit (27 panti dan 29 rumpel) dengan total kapasitas 4.610 orang, tentu masih belum sebanding dengan jumlah populasi PPKS yang ada saat ini. Ke depan perlu untuk terus didorong pelibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun swasta untuk ikut terlibat dalam penanganan PPKS di Jawa Tengah sesuai kewenangan masing-masing.

e. Berkebudayaan Maju

Kebudayaan menjadi investasi dalam pembangunan masa depan dan peradaban bangsa, sehingga diharapkan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, mempererat persatuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja **pembangunan kebudayaan** diukur melalui **Indeks Pembangunan Kebudayaan** (IPK). IPK merupakan indikator yang relatif baru dan dirilis pertama kali tahun 2018, memiliki 7 dimensi komprehensif yaitu ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Perkembangan IPK di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 cenderung fluktuatif dan berada di atas capaian nasional. Dari ke-7 dimensi IPK, dimensi budaya literasi cenderung stagnan pada posisi ke-3 atau empat terbawah, menandakan bahwa budaya literasi di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

Demikian pula dengan kinerja aspek ekspresi budaya dan ekonomi budaya di Jawa Tengah yang belum mencapai angka 50 dari rentang nilai 0 hingga 100, meskipun Jawa Tengah sudah berada di atas capaian nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wadah atau media untuk mengekspresikan budaya masih terbatas. Selain itu, aspek ekonomi budaya yang masih rendah salah satunya disebabkan karena pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum optimal.



Sumber: ipk.kemendikbud.go.id

Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Perwujudan nilai dan karakter masyarakat dimulai dari usia dini melalui keluarga maupun pendidikan formal. Selain skor literasi dan numerasi yang digunakan untuk menunjukkan kualitas pendidikan, Kemendikbud melalui Rapor Pendidikan juga menghitung skor **nilai karakter** yang merupakan pengejawantahan internalisasi nilai agama dan budaya dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai karakter tersebut menggambarkan tentang bagaimana peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global, serta kemandirian. Pada tahun 2022 dan 2023 rata-rata skor nilai karakter tertinggi di jenjang pendidikan menengah umum (SMA) sebesar 58,51 dan terendah di jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 53,96.

f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja **pembangunan keluarga** di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukkan peningkatan dari angka 56,10 pada 2021 menjadi 63,9 pada 2024 atau termasuk kategori cukup baik/berkembang dan lebih baik dari nasional. Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian.

Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan gender pada satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang dicerminkan dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin kecil. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** meningkat dari 92,58 pada tahun 2020 menjadi 93,44 pada tahun 2024 dan lebih baik dibanding nasional. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** menyempit dari 0,370 pada tahun 2020 menjadi 0,308 pada tahun 2024. Meskipun IPG dan IKG telah menunjukkan kinerja yang membaik namun masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan utamanya pada bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis. Prasyarat mewujudkan kesetaraan gender yang ideal dimana perempuan menjadi berdaya di Jawa Tengah menghadapi fakta yang cukup pelik jika melihat berbagai isu yang melingkupi perempuan seperti diskriminasi, kekerasan, budaya patriarki, beban ganda, ketimpangan pendapatan dan posisi lemah lainnya dibanding laki-laki. Data menunjukkan bahwa korban kekerasan perempuan sejak tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 809 korban menjadi 1.019 pada tahun 2024. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian ke depan utamanya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mereduksi posisi lemah perempuan.

Pembangunan **kualitas hidup anak** dihadapkan pada kondisi yang belum sepenuhnya ideal dengan masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan usia anak, bullying, pekerja anak, keterlantaran, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan perilaku salah lainnya. Data menunjukkan bahwa korban kekerasan anak kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari 1.197 korban tahun 2020 menjadi 1.349 anak di tahun 2024, dimana kasus terbesar yang dialami anak adalah korban kekerasan seksual (48,9 persen), psikis (20,3 persen), fisik (17,7 persen), dan penelantaran (6,6 persen). Sementara itu dilansir dari data Pengadilan Tinggi Agama Semarang, angka perkawinan usia dibawah 19 tahun masih terus terjadi di Jawa Tengah meskipun dalam perkembangannya periode 2020-2024 mulai menurun seiring dengan kampanye “Jo Kawin Bocah”. Tercatat tahun 2020, angka pernikahan dibawah 19 tahun sebesar 12.972 pernikahan, meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 13.595 pernikahan dan berangsur menurun hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 7.903 pernikahan. Pernikahan usia di bawah 19 tahun dominan dilakukan oleh perempuan yang mengambil porsi 90an persen dibanding laki-laki. Tentu ini mengindikasikan posisi lemah perempuan dan dampak yang diakibatkan akan lebih berat bagi perempuan karena mereka harus melahirkan dan beban psikologis lainnya. Selaras dengan kondisi data di atas maka perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) juga mengalami perkembangan yang pasang surut selama periode 2019 hingga 2023. Tercatat tahun 2019 IPA sebesar 70,23 menurun menjadi 64,34 di tahun 2023. Meskipun masih rendah dari capaian tahun 2019, IPA tahun 2023 telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 63,20. Dari sisi pemenuhan hak anak, tergambar dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dimana capaian tahun 2019 sebesar 68,71 menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 60,76. Sedangkan pada Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tercatat tahun 2019 sebesar 78,34 menurun menjadi 77,86 pada tahun 2023.

Selain itu juga, kondisi **pembangunan kualitas hidup pemuda** dapat ditunjukkan dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Terdapat 5 (lima) domain IPP yaitu pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; lapangan dan kesempatan kerja; partisipasi dan kepemimpinan; gender dan diskriminasi. IPP Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 55,50 dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 53,83. Namun capaian tahun 2023 tersebut masih berada di bawah angka IPP Nasional yang sebesar 56,33.

Dari lima domain IPP, kontribusi nilai IPP Jawa Tengah ditopang oleh domain kesehatan dan kesejahteraan yang mengalami peningkatan sebesar 5 poin

dibandingkan tahun 2022. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan juga mengalami kenaikan yaitu 46,66 pada tahun 2023 (43,33 pada tahun 2022). Domain lainnya seperti domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi. Hal ini menjadi perhatian lebih untuk pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IPP yang bervariasi pada setiap domain jika dibandingkan dengan IPP nasional pada tahun 2023. Domain yang memiliki nilai rata-rata di bawah nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu 62,5 sedangkan rata-rata nasional sebesar 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan mendapatkan nilai lebih tinggi yaitu 46,67 dibandingkan dengan rata-rata nasional hanya 43,33. Domain yang nilainya sama dengan rata-rata nasional yaitu domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Secara umum, meskipun perolehan domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami kenaikan namun masih perlu diperhatikan oleh pemerintah karena nilai tersebut masih di bawah capaian nasional.

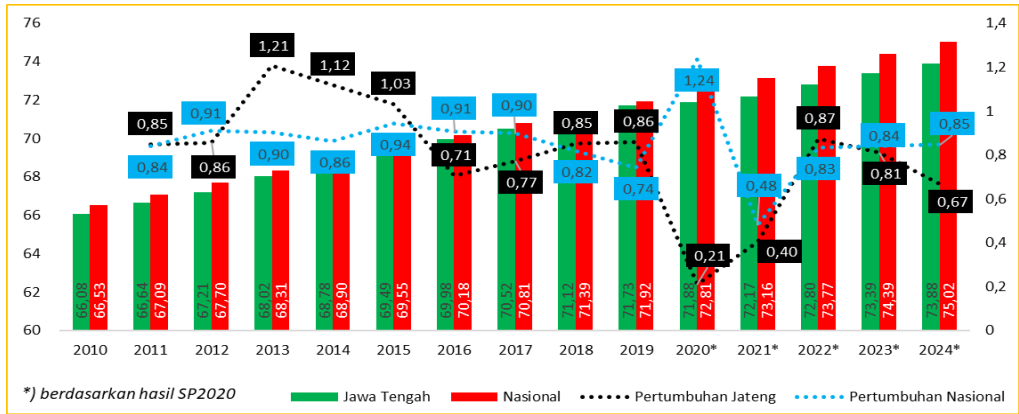
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan IPM untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di Jawa Tengah. Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Namun dalam perkembangannya, IPM dianggap belum dapat menggambarkan tingkat produktivitas SDM masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Untuk itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan pendekatan dari *Human Capital Index* (HCI) yang bersumber dari *World Bank*. **Capaian IMM** Jawa Tengah tahun 2020 berada di atas nasional dengan nilai sebesar 0,55, sementara untuk nasional sebesar 0,54. Dalam indikator IMM, terdapat salah satu komponen yang juga merupakan komponen IPM yaitu HLS. Sedangkan untuk faktor pembentuk IMM dari ketahanan hidup dan kesehatan diukur dari indikator AKBA (Angka Kematian Balita), angka kematian pada 15 hingga 16 tahun, dan prevalensi *stunting*.

Selanjutnya untuk capaian **IPM** Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 terus membaik, dari 66,08 tahun 2010 meningkat menjadi 73,88 pada tahun 2024, meskipun masih dibawah angka nasional. Namun demikian rata-rata pertumbuhannya lebih baik jika dibandingkan nasional.

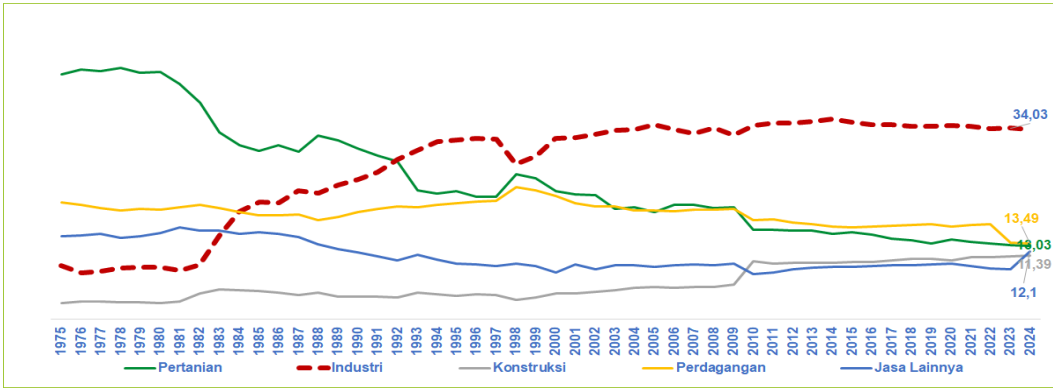


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.21.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2024

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

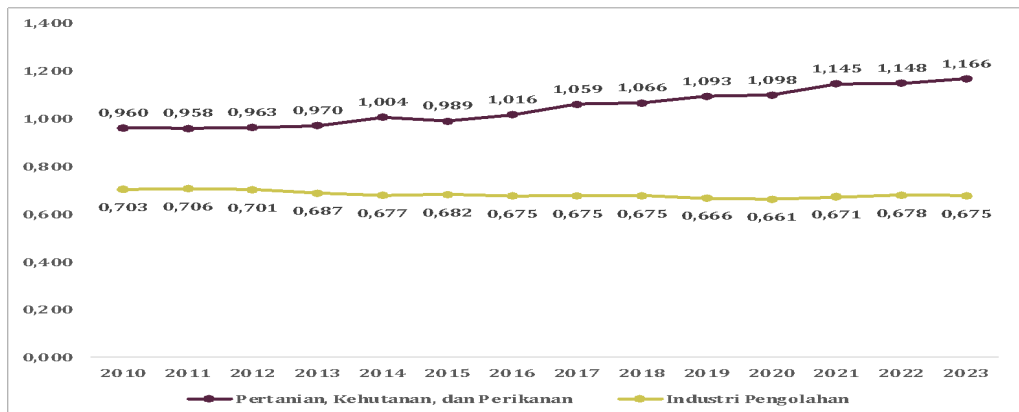
Struktur ekonomi Jawa Tengah dari tahun 1993 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebagai penyumbang perekonomian terbesar di Jawa Tengah. Sektor berikutnya adalah perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Pergeseran struktur ekonomi Jawa Tengah terjadi sejak tahun 1992 yang mana sektor industri pengolahan menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi Jawa Tengah menggeser sektor pertanian. Sektor pertanian meskipun mengalami penurunan namun masih menduduki peringkat kedua dan masih berkontribusi di kisaran 13 persen.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.22.
Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 1975-2024 (Persen)

Hingga tahun 2023 dapat dilihat kontribusi sektor pertanian terhadap nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013-2023) terus mengalami kenaikan yang menunjukkan peran Jawa Tengah dalam mendukung ketahanan pangan nasional menjadi penting. Sejalan dengan kebijakan pusat, Jawa Tengah akan terus mengembangkan pertanian termasuk industri pengolahan pangan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang sangat penting dalam struktur perekonomian Jawa Tengah, dimana rata-rata kontribusi yang diberikan oleh sektor ini selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar 34 persen per tahun. Oleh karenanya kinerja sektor industri pengolahan sangat menentukan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan nasional, kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Tengah baru sekitar 0,6 persen.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.23.
Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2010-2023 (Persen)

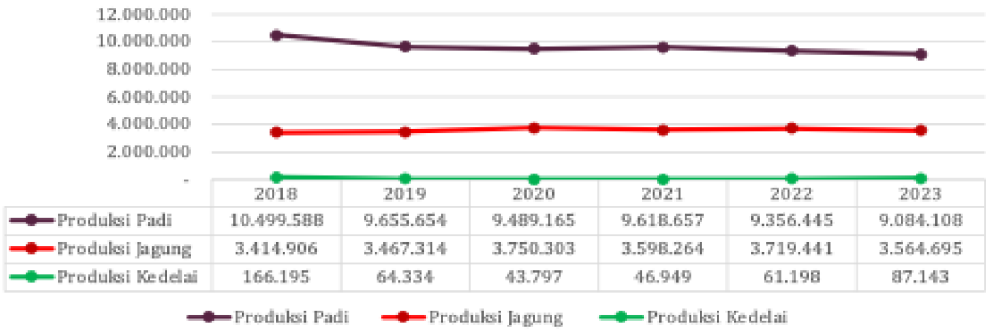
Kebijakan pengembangan industri pengolahan di Jawa Tengah dilakukan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kebijakan nasional untuk mengembangkan kawasan strategis industri Pantura Jawa Tengah (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan tembakau, industri *furniture*, industri kayu dan barang dari kayu, industri makanan dan minuman, industri kriya dan ekonomi kreatif dan menjadikan Jawa Tengah sebagai bagian dari rantai nilai industri nasional, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan perlu dilakukan optimalisasi pengembangan industri pengolahan di Jawa Tengah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan baik di Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan pengategorian, nilai PDRB sektor industri pengolahan terbesar tahun 2023 adalah industri makanan dan minuman sebesar 43,68 persen, disusul industri tembakau sebesar 18,97 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,64 persen. Berikut adalah pemetaan potensi industri pengolahan makanan dan tekstil serta pakaian jadi di Jawa Tengah.



Sumber: RPIP Jawa Tengah Tahun 2017-2037, 2025 (diolah)

Gambar 2.24.
Peta Potensi Industri Pengolahan Makanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037

kedelai mengalami tren menurun dikarenakan menurunnya minat petani terkait daya saing kedelai di pasar karena adanya kedelai impor sehingga menyebabkan menurunnya luas tanam kedelai.

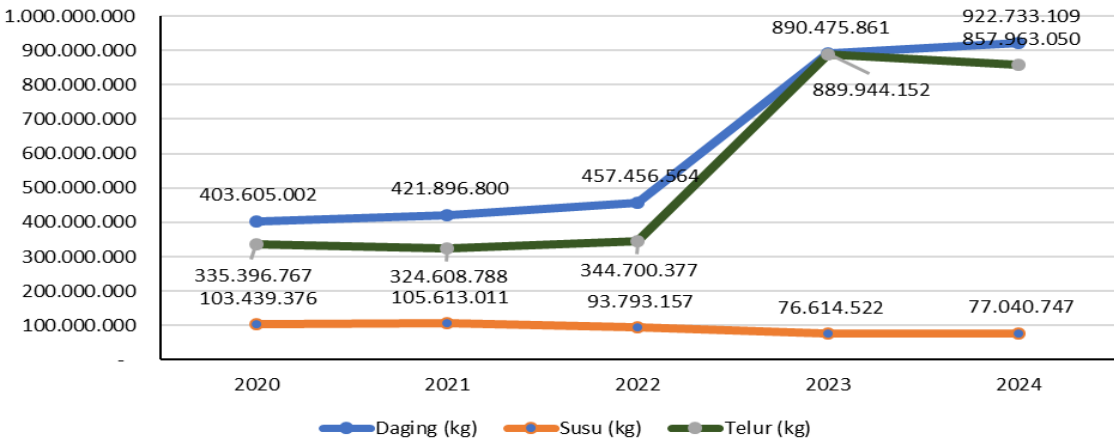


Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.27.

Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pada subsektor peternakan, produksi daging mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun 2022. Produksi telur juga mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun turun pada tahun 2024. Sedangkan produksi susu mengalami penurunan pada tahun 2023, dan kembali naik pada tahun 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi adanya serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak terutama sapi perah. Perkembangan produksi daging, telur, dan susu ditunjukkan pada gambar berikut.

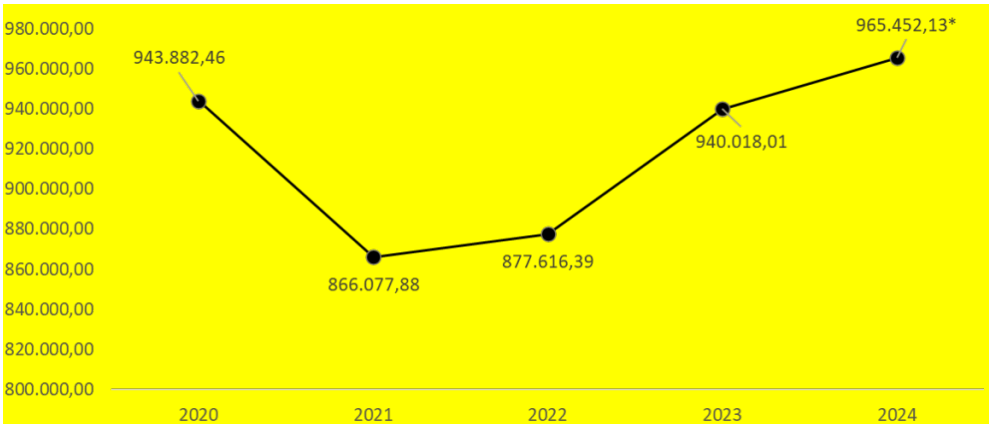


Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.28.

Produksi Daging, Telur, dan Susu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

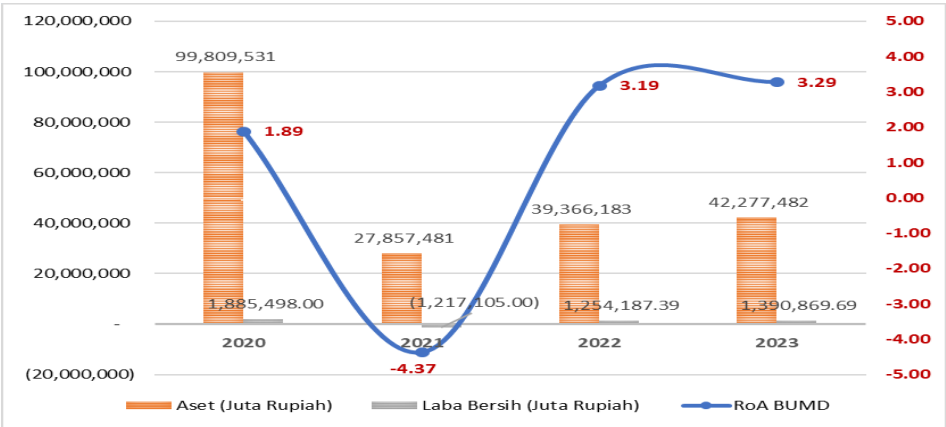
Pada subsektor perikanan, produksi perikanan yang merupakan akumulasi dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya menunjukkan gambaran produksi pada tahun 2020-2024 cukup fluktuatif tapi cenderung meningkat. Produksi perikanan budidaya menunjukkan tren meningkat pada tahun 2020-2024, sedangkan produksi perikanan tangkap cenderung fluktuatif. Perkembangan produksi perikanan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.29.
Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun)

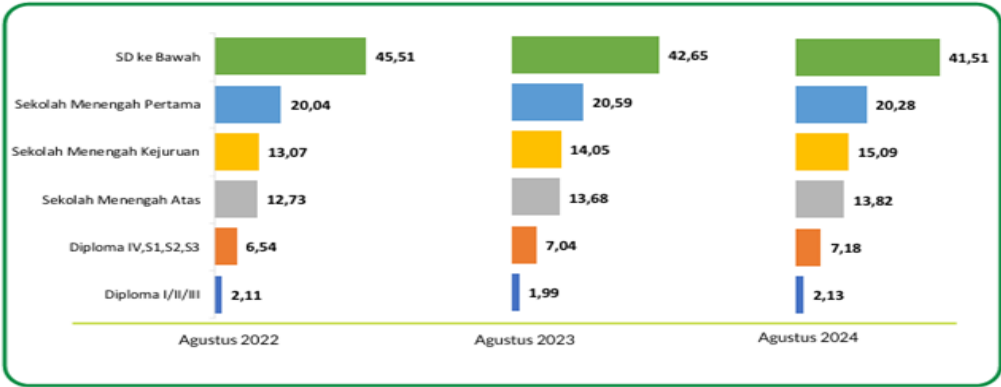
Selain melalui industrialisasi, produktivitas sektor-sektor ekonomi salah satunya juga didorong melalui peningkatan produktivitas BUMN dan BUMD. Produktivitas BUMN dan BUMD diharapkan meningkat dan dapat berperan sebagai *value creator* maupun *agent development*. Salah satu indikator untuk mengukur produktivitas BUMN dan BUMD adalah *Return on Asset* (ROA). ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Pada kurun waktu 2020 – 2023, ROA seluruh BUMD di wilayah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai ROA BUMD berada pada nilai 1,89 persen, dan kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi -4,37 persen karena adanya penurunan signifikan pada aset dan laba bersih. ROA BUMD kembali meningkat menjadi 3,19 persen pada tahun 2022 dan 3,29 persen pada tahun 2023 seiring dengan peningkatan aset dan laba bersih pada tahun tersebut. Perkembangan ROA BUMD di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2023

Gambar 2.30.
Nilai Aset, Laba Bersih, dan Return on Assets (ROA) BUMD di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023

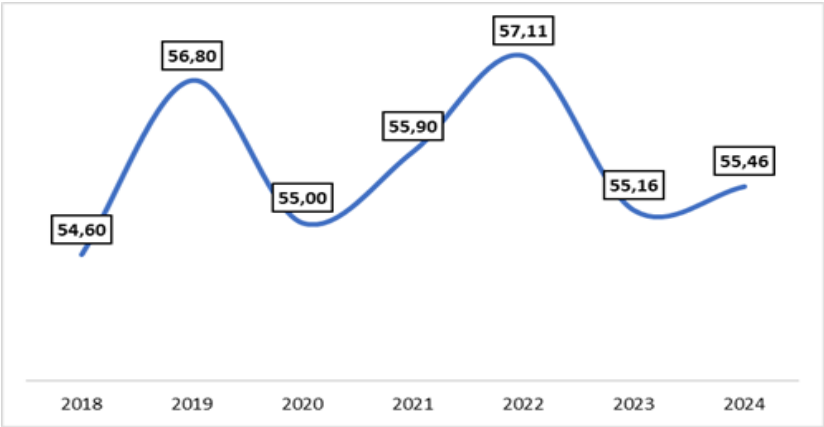
Dilihat dari karakteristik **penduduk bekerja** di Jawa Tengah digambarkan bahwa sebanyak lebih dari 61 persen merupakan lulusan SMP ke bawah. Tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penduduk bekerja lulusan SMP ke bawah menunjukkan kualitas yang masih rendah atau *low skill*.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.31.
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

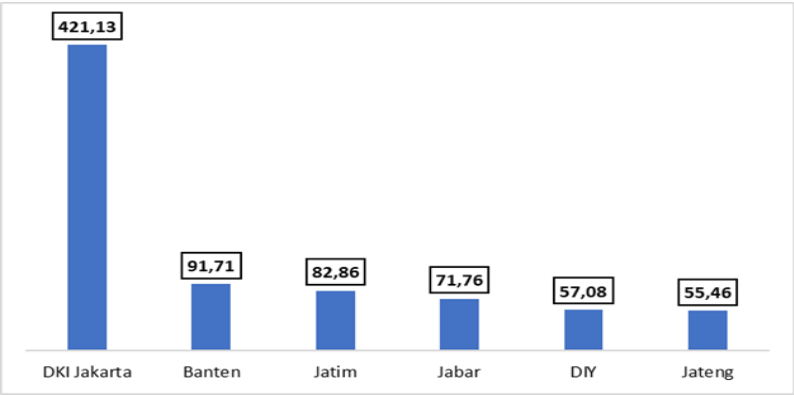
Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 55,46 juta rupiah naik jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 55,16 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau daerah, serta memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak *output* dengan jumlah tenaga kerja yang sama, sehingga keuntungan perusahaan lebih besar. Jika produktivitas tenaga kerja suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi juga dapat berdampak pada peningkatan perekonomian suatu daerah, karena *output* yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selain itu, sektor dengan produktivitas yang tinggi akan menarik investasi (bisnis baru/ekspansi) sehingga lapangan pekerjaan akan semakin meningkat.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.32.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2024 (Juta Rupiah)

Apabila dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun 2024, tingkat produktivitas Jawa Tengah berada di urutan terbawah dari enam provinsi. Tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 421,13 juta rupiah atau sebanyak enam kali lipat lebih besar dibanding dengan Jawa Tengah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.33.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi se-Pulau Jawa
Tahun 2024 (Juta Rupiah)

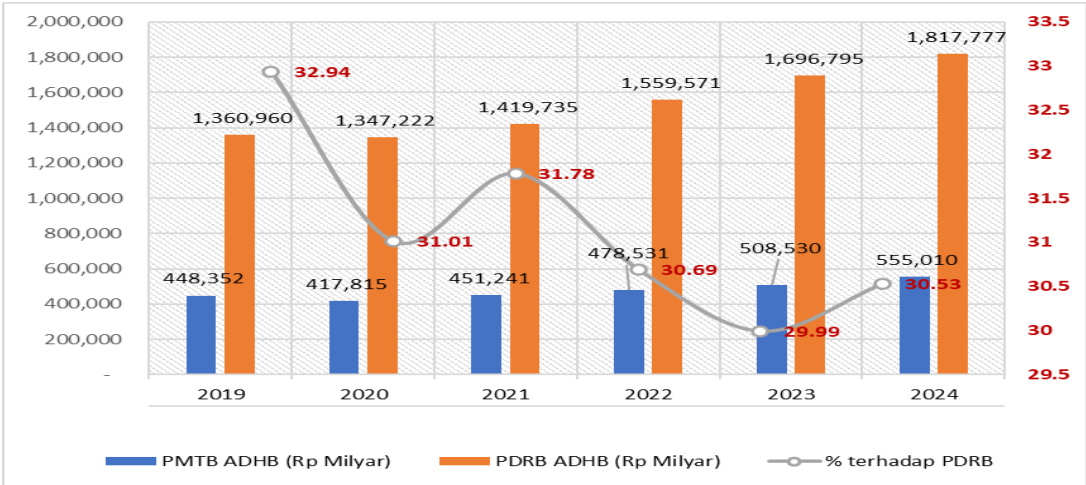
c. Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah sejauh ini sudah mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi hijau. Jika dilihat dari indeks **ekonomi hijau** yang meliputi pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial, capaian indeks ekonomi hijau Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2020 - 2023 berada pada kategori Baik Tier 1 meski dari sisi indeksnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian indeks ekonomi hijau Jawa Tengah sebesar 51,39 meningkat pada tahun 2021 menjadi 54,79 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 51,44 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 52,17.

d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan peningkatan produktivitas sektor-sektor produktif serta penguatan peran sektor eksternal yang dilakukan melalui perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Jawa Tengah dalam rantai nilai global. Integrasi ekonomi domestik dan global tersebut salah satunya tergambar melalui indikator **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**.

Dari sisi nominal, PMTB Jawa Tengah Jawa Tengah pada kurun waktu 2020 - 2024 menunjukkan tren peningkatan dari Rp417,82 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp555,01 triliun pada tahun 2024. Meski demikian dari sisi pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 6,84 persen sempat melambat pada tahun 2022 menjadi 1,99 persen kemudian berturut-turut meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 4,23 persen dan 6,55 persen. Dalam konteks perannya terhadap PDRB, kontribusi PMTB pada tahun 2020 sebesar 31,01 persen, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 31,78 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 30,69 persen dan tahun 2023 menjadi sebesar 29,99 persen. Kontribusi PMTB terhadap PDRB tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 30,53 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.34.

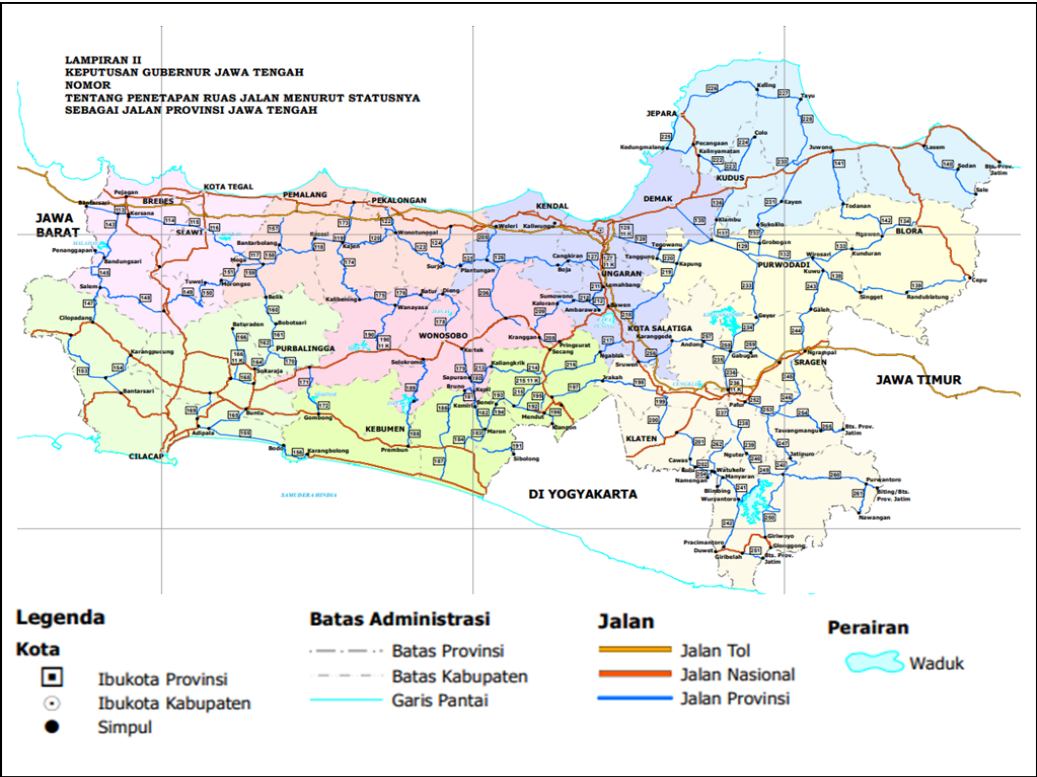
Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

Selain itu, kondisi tersebut ditunjukkan dengan **nilai Ekspor Barang dan Jasa** di Jawa Tengah. Selama lima tahun, nilai ekspor barang dan jasa meningkat kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor. Nilai ekspor tahun 2022 tercatat sebesar US\$11.777,91 juta, menurun menjadi sebesar US\$10.229,18 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US\$11.181,64 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah. Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US\$8.11.210,92 juta, menurun menjadi sebesar US\$9.868,62 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US\$10.763,68 juta.

e. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi infrastruktur Jawa Tengah semakin membaik dari tahun ke tahun didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Total panjang jalan kewenangan provinsi adalah 2.440,12 km sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023. Kondisi jalan sesuai standar (lebar 7 meter dengan MST 8 ton) sampai dengan tahun 2024 adalah 47,09 persen. Sementara kondisi permukaan jalan mantap sebesar 91,47 persen yang ditunjukkan dari kondisi permukaan jalan baik 64,94 persen, sedang 26,53 persen, rusak ringan sebesar 5,41 persen, dan rusak berat sebesar 3,12 persen.



Sumber: Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.35.
Ruas Jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Menurut Statusnya

Tabel 2.4.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kondisi								Panjang Jalan Provinsi
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00	2.404,74
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2.404,74
2023	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12
2024	1.584,63	64,94	647,33	26,53	131,92	5,41	76,24	3,12	2.440,12

Sumber: Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Konektivitas jaringan transportasi Jawa Tengah dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi. Untuk simpul transportasi udara, sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Tata letak Bandara Nasional terdapat 6 bandara yang terdiri dari 2 bandara pengumpul skala pelayanan sekunder (Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali) dan 4 bandara pengumpan (JB. Soedirman Purbalingga, Dewadaru Karimunjawa Jepara, Ngloram Cepu Blora dan Tunggal Wulung Cilacap). Pada tahun 2024, Bandara Jenderal Ahmad Yani dan Adi Soemarmo tidak lagi ditetapkan menjadi Bandara Internasional, namun Bandara Jenderal Ahmad Yani masih bisa melayani penerbangan luar negeri untuk kepentingan menunjang industri perdagangan (kargo internasional) dan Bandara Adi Soemarmo masih bisa melayani penerbangan untuk kepentingan ibadah umroh.

Sementara untuk simpul transportasi laut, terdapat 14 pelabuhan yang terdiri dari 1 pelabuhan utama (Tanjung Emas Semarang), 2 pelabuhan pengumpul (Tanjung

Intan Cilacap dan Tegal), 8 pelabuhan pengumpan regional (Batang, Kendal, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak, Juwana, Tasik Agung dan Sluke) dan 3 pelabuhan lokal (Brebes, Pemalang dan Pekalongan). Sebagian besar pelabuhan di pantai utara kondisinya kurang baik karena mengalami amblesan tanah (*land subsidence*), kenaikan air laut (*rob*) serta pendangkalan kolam dan alur pelayaran karena sedimentasi. Terdapat potensi Pelabuhan Sluke Rembang yang dapat dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul karena secara alamiah (kedalaman laut) mendukung dan potensi keberadaan infrastruktur lain yang menunjang. Pada tahun 2024 arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mencapai 894.168 terus yang mengalami peningkatan dibandingkan angka 2023 sebesar 781.841 terus. Jika dibandingkan dengan kapasitas (1,5 juta teus), tahun 2024 mencapai 59,61 persen yang mengalami meningkat 7,49 persen dibanding tahun 2023 sebesar 52,12 persen. Permasalahan yang mempengaruhi kinerja dan daya saing Pelabuhan Tanjung Emas diantaranya penurunan tanah, banjir rob, jumlah dermaga, kedalaman kolam dan alur pelayaran yang tidak sama serta keterbatasan rute pelayaran langsung (*direct service*) internasional. Untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik diperlukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan volume peti kemas dengan adanya pengembangan kawasan industri, yang di dalamnya termasuk integrasi dengan *dryport* dan fasilitas bongkar muat dari kereta api ke kapal secara langsung. Potensi lain terkait pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan adanya pembangunan Pelabuhan Batang yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan rencana pembangunan Kendal *Seaport* yang berpotensi mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Selanjutnya, untuk simpul jaringan perkeretaapian, sampai dengan tahun 2024 terdapat 116 buah stasiun dan jalur rel sepanjang 1.657,74 km/sp terdiri dari 902,5 km/sp rel aktif (288,5 km/sp jalur tunggal dan 614 km/sp jalur ganda) dan 755,24 km/sp rel nonaktif. Total panjang rel kereta api yang melebihi jalan nasional (1.518,09 km) dan menjangkau sebagian besar wilayah Jawa Tengah, serta sistem jaringan rel yang “*looping*” berpotensi tinggi sebagai angkutan umum massal aglomerasi perkotaan (pengembangan kereta api komuter yang terintegrasi dengan angkutan umum perkotaan berbasis jalan) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang melalui reaktivasi rel nonaktif, integrasi rel kereta api dengan kawasan industri, pemanfaatan teknologi integrasi dengan moda angkutan berbasis jalan dan kereta api cepat. Potensi implementasi konsep *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai solusi perwujudan efektivitas pergerakan yang dapat memanfaatkan keberadaan stasiun dan terminal. Selain itu potensi pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *maritime backbone* yang menginterkoneksi antara kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan perekonomian dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah.

Untuk simpul utama transportasi darat, terdapat 221 terminal yang terdiri dari 19 tipe A, 24 tipe B dan 178 tipe C. Berdasarkan tata ruang masih dibutuhkan penyebaran dan pemerataan terminal yang sampai dengan tahun 2024 terdapat kebutuhan lima terminal tipe A dan tujuh terminal tipe B. Terminal sebagai simpul

transportasi berpotensi dikembangkan sebagai simpul ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Keselamatan perjalanan menjadi salah satu isu permasalahan yang sangat penting di sektor transportasi. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, namun untuk jumlah korban meninggal dunia (MD) mengalami penurunan.

Tabel 2.5.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Kecelakaan Lalulintas	Kejadian	21.396	22.521	30.730	31.425	31.444
2. Korban Meninggal dunia	Jiwa	3.508	3.750	4.409	4.302	4.130
3. Tingkat Fatalitas / 100.000 penduduk	Angka	9,61	10,21	11,91	11,62	10,89
4. Korban Luka Berat	Orang	48	77	77	60	63
5. Korban Luka Ringan	Orang	24.495	25.847	35.869	36.915	37.275
6. Kerugian Materiil	Rp.Milyar	14,746	16,836	24,819	44,763	37,369

Sumber: Direktorat Lalu-lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 2025

Angka tersebut sangat besar, karena selain yang terbesar kedua setelah Jawa Timur juga terhitung rata-rata hampir 1 jiwa per 2 jam melayang sia-sia di jalan. Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 2025, korban MD dimaksud didominasi profesinya karyawan/swasta, usia 17-35 tahun dan pengguna sepeda motor. Melihat karakteristik data korban, berpotensi kejadian kecelakaan dimaksud berkontribusi terhadap penurunan kesejahteraan apalagi jika korban juga merupakan kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi pada tahun 2023 mencapai 38,66 persen dan pada perlintasan sebidang kereta api mencapai 17,88 persen. Pada tahun 2024, terdapat 1.369 perlintasan dengan rel kereta api yang terdiri dari 109 tidak sebidang dan 1.260 sebidang (371 perlintasan sudah berpalang pintu dan 889 belum dilengkapi dengan palang pintu). Dimana dari total 1.369 perlintasan dimaksud hanya 25 perlintasan yang berada di ruas jalan provinsi, satu perlintasan sudah tidak sebidang (*fly over*), 23 perlintasan sudah berpalang pintu dan dijaga, namun masih ada satu perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Ke depan diperlukan peningkatan upaya pemenuhan kelengkapan jalan terpasang terhadap kondisi ideal dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan sebagai upaya untuk mengurangi kejadian kecelakaan transportasi.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap permasalahan transportasi darat adalah pertumbuhan jumlah kendaraan. Seiring peningkatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.6.
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Mobil Penumpang	Unit	1.309.343	1.711.112	n/a	1.711.277	n/a
2. Bus	Unit	37.785	44.160	n/a	35.152	n/a
3. Truk	Unit	580.411	647.811	n/a	657.221	n/a
4. Sepeda Motor	Unit	16.214.173	17.917.660	n/a	18.017.635	n/a

Catatan : Data BPS terakhir tahun 2022 tidak ada dan tahun 2024 belum tersedia

Sumber: BPS, 2025

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi menyebabkan peningkatan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, konsumsi energi dan emisi gas yang dihasilkan. Disisi lainya pertumbuhan kapasitas jalan tidak sepesat laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Diperlukan upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan, diantaranya melalui penyediaan angkutan umum yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Terkait dengan pelayanan angkutan umum, sejak tahun 2024 belum terdapat penambahan jumlah koridor layanan Trans Jateng yang melayani kawasan aglomerasi perkotaan. Koridor ke-7 Trans Jateng yang terakhir yang dibuka adalah Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri yang operasional pada Agustus 2023. Sehingga baru terlayani 5 dari 10 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Kedungsepur (3 koridor), WP Subosukawonosraten (2 koridor), WP Cibalingmas (1 koridor), dan WP Gelangmanggung-Keburejo (1 koridor Kutoarjo-Borobudur). Untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan perkotaan masih diperlukan pengembangan koridor Trans Jateng dan *feeder* yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang saat ini baru terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki layanan angkutan umum perkotaan (Trans Semarang, Batik Solo Trans dan Trans Banyumas). Masih diperlukan peningkatan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan layanan angkutan umum yang tidak hanya melayani kawasan perkotaan tapi juga pedesaan.

Total jumlah penumpang yang dilayani Trans Jateng terus mengalami peningkatan, sejak pertama kali dibuka pada tahun 2017, kecuali pada saat pandemi pada tahun 2020, jumlah penumpang mulai pulih pada tahun 2021 dan relatif normal kembali pada tahun 2022.

Tabel 2.7.
Perkembangan Layanan Trans Jateng Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Koridor Operasional	Koridor	5	6	6	7	7
Penumpang Terlayani	Penumpang	2.421.872	3.439.532	6.506.462	8.034.005	9.499.742
Rerata <i>Loadfactor</i>	%	33,64	41,62	68,74	82,40	88,60
Rerata <i>Moda Shifting</i>	%	NA	46,39	48,16	50,12	52,22
Proporsi Nilai Manfaat	%	NA	NA	76,78	83,20	91,33

Catatan: Perhitungan *Moda Shifting* baru dilakukan mulai tahun 2021 dan perhitungan nilai manfaat baru dilakukan mulai tahun 2022

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kenaikan jumlah penumpang Trans Jateng seiring dengan penambahan jumlah koridor, dan perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke Bus Trans Jateng (*moda shifting*). Layanan Trans Jateng ini mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tujuan *Sustainable Cities and Communities* pada Target 11.2 terkait: “Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua”.

Perhitungan nilai manfaat Trans Jateng dilakukan dengan memperbandingkan antara anggaran Trans Jateng yang dikeluarkan dibandingkan dengan nilai manfaat yang sudah dikonversikan ke rupiah. Manfaat yang dapat “dirupiahkan” meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), estimasi penghematan masyarakat untuk biaya perjalanan dan estimasi penghematan negara dari subsidi BBM kendaraan pribadi (karena beralih ke transportasi umum). Masih banyak manfaat yang belum diperhitungkan, diantaranya peningkatan kualitas udara, penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan, kerugian akibat kecelakaan (terutama jiwa) dan manfaat terkait bangkitan ekonomi (pendukung pariwisata, perindustrian dan lain-lain).

Selain itu pada tahun 2024 terdapat 272 trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilayani oleh 3.550 bus dengan kebutuhan armada sejumlah 6.442 bus. Jumlah armada bus AKDP mengalami penurunan sangat signifikan, yang pada tahun 2019 sejumlah 4.854 bus. Penurunan jumlah bus AKDP utamanya terjadi pada saat pandemi Covid-19 dan seiring turunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta mudahnya akses kepemilikan kendaraan pribadi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 terdapat 629.317 armada angkutan barang di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan jumlah armada dibandingkan dengan data kondisi tahun 2020 yang sejumlah 472.942 armada. Pertumbuhan jumlah kendaraan barang di satu sisi merupakan indikator potensi peningkatan volume logistik namun berpotensi semakin meningkatkan permasalahan (kemacetan, kecelakaan, kontribusi polusi) di sektor transportasi utamanya di moda jalan raya.

Secara keseluruhan, kinerja infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Pelayanan Transportasi yang sudah memperhitungkan aspek konektivitas jaringan transportasi (rasio konektivitas provinsi), tingkat keselamatan perjalanan transportasi (rasio kecelakaan bus AKDP per 1 juta keberangkatan), dan kualitas pelayanan angkutan umum (*On Time Performance/* OTP layanan transportasi). Capaian Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI	Angka	5,767	5,997	6,050
1. Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,299	0,373	0,400
a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Angka	0,283	0,340	0,360
b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Angka	0,389	0,501	0,510

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
c. Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	Angka	0,230	0,310	0,330
2. Rasio Kecelakaan Bus AKDP (per 1 Juta Keberangkatan)	Angka	16,906	16,698	16,090
3. <i>On Time Performance</i> (OTP) Layanan Transportasi	%	82,21	84,19	84,60
a. OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	%	86,60	88,20	89,79
b. OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru	%	90,00	90,39	91,01
c. OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru	%	70,00	74,00	73,01

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Catatan :

- Indeks Pelayanan Transportasi di Jawa Tengah mulai dihitung pada Tahun 2022;
- Rasio Konektivitas Nasional Tahun 2022 = 0,696, 2023 = 0,763 dan 2024 = 0,777 ;
- Rasio Kecelakaan Nasional Tahun 2022 = 19,936, 2023 = 17,64 dan 2024 = ; 19,24;
- *On Time Performance* (OTP) Nasional Tahun 2022 = 74,146, 2023 = 72,592 dan 2024 = 75,304.

Kinerja infrastruktur perhubungan Provinsi Jawa Tengah dari aspek keselamatan dan pelayanan transportasi umum sudah lebih baik dibandingkan capaian tingkat nasional. Yang masih perlu pembenahan dari aspek konektivitas provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional, terutama dari hal pemerataan simpul transportasi (terminal dan dermaga penyeberangan ASDP) dan pemenuhan trayek layanan angkutan umum.

Rumah tangga dengan akses hunian layak di Jawa Tengah dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Data asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebanyak 9.261.697 unit dan berdasarkan data BPS tahun 2024 sebesar 71,76 persen rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Capaian ini meningkat 2,91 persen dari tahun 2023 yang sebesar 68,85 persen.

Tabel 2.9.
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
2020	5.818.483	67,93
2021	5.771.336	66,47
2022	5.847.609	67,02
2023	6.029.999	68,85
2024	6.646.194	71,76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Peningkatan jumlah hunian layak di Jawa Tengah ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat, kabupaten/kota, desa, dan peran swasta melalui CSR dan BAZNAS. Program yang dilakukan meliputi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan baru rumah.

Selanjutnya terkait dengan kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah, kondisinya semakin menurun dari tahun ke tahun. Hasil verifikasi dan validasi penetapan kawasan permukiman kumuh melalui SK bupati/walikota, sampai dengan 31 Desember 2024 total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 3.885,006 ha yang terdiri dari 650,49 ha kewenangan kabupaten/kota, 706,12 ha kewenangan provinsi, dan 2.528,39 ha kewenangan pusat.

Tabel 2.10.

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kewenangan Penanganan	Luasan Kawasan Kumuh (Ha) *(Base Line Tahun 2022)	Penanganan Pada Tahun		Total Penanganan s.d Tahun 2024 (Ha)	Sisa Kawasan Kumuh 2024 (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Kumulatif s.d 2024
		2023 (Ha)	2024 (Ha)					
Kab/Kota (< 10 Ha)	1.087,192	119,659	317,043	436,702	650,490	165	29,162	40,168
Provinsi (10-15 Ha)	1.101,021	136,807	258,090	394,897	706,124	94	23,441	35,866
Pusat (> 15 Ha)	3.906,695	576,444	801,860	1378,304	2528,391	176	20,525	35,281
	6.094,91	832,91	1.376,992	2.209,902	3.885,006	435	22,593	36,258

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan. Adapun penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.

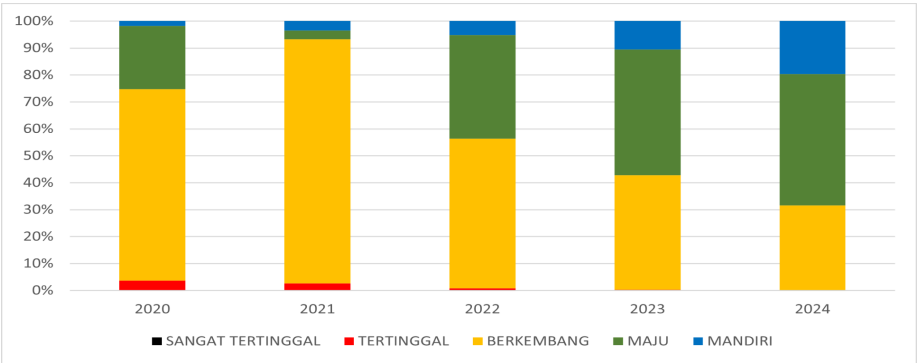
Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi

No	Jenis Penanganan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PK Bencana	105	118	51	345	175
2	PB Bencana	11	23	19	122	35
	Jumlah	116	141	70	467	210

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah perdesaan. **Pembangunan desa** dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola aset dan sumber daya lokal yang sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan tahun 2024, capaian tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Tahun 2020-2024, capaian kemandirian desa di Jawa tengah terus mengalami peningkatan yang diukur melalui peningkatan rata-rata nilai IDM Jawa Tengah dan peningkatan persentase jumlah desa mandiri. Sampai dengan tahun 2024, terdapat total 1,530 Desa Mandiri (19,59 persen), 3.816 Desa Maju (48,86 persen), 2.456 Desa Berkembang (31,45 persen), dan 8 Desa Tertinggal (0,10 persen). Berdasarkan capaian tersebut kenaikan jumlah Desa Mandiri cukup

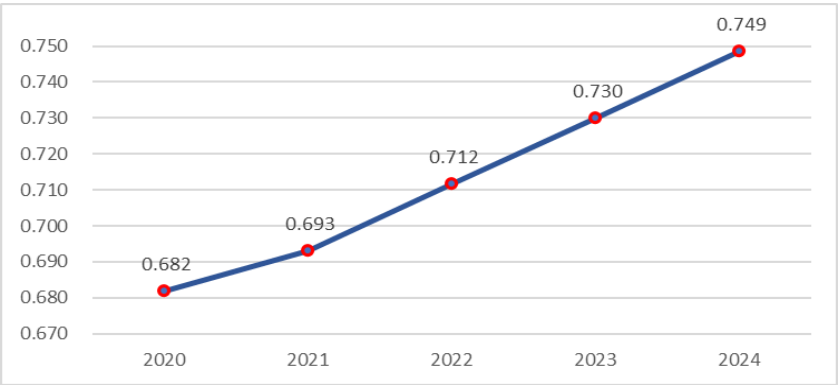
signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023, yaitu 825 Desa Mandiri (10,56 persen). Beberapa aspek menjadi faktor yang mendorong meningkatnya capaian kemandirian desa di Jawa Tengah, diantaranya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran lembaga keuangan, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan penyediaan kebutuhan layanan dasar di desa, dan beberapa faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan desa. Meski begitu, capaian tersebut belum bisa dikatakan optimal mengingat masih adanya Desa Tertinggal di Jawa tengah pada tahun 2024, yaitu 8 (delapan) Desa Tertinggal yang tersebar di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal. Beberapa kendala yang dihadapi pada desa-desa tertinggal di Jawa Tengah adalah permasalahan pada kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur pendukung aksesibilitas yang belum optimal.



Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Gambar 2.36.
Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)

Sementara itu, secara keseluruhan wilayah, perkembangan tingkat kemandirian di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, rata-rata nilai IDM Jawa tengah adalah 0,749 dengan kategori maju, sedangkan pada Tahun 2020 rata-rata nilai IDM adalah 0,682 dengan kategori berkembang. peningkatan terjadi secara konsisten setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor selaras dengan peningkatan persentase jumlah desa mandiri.

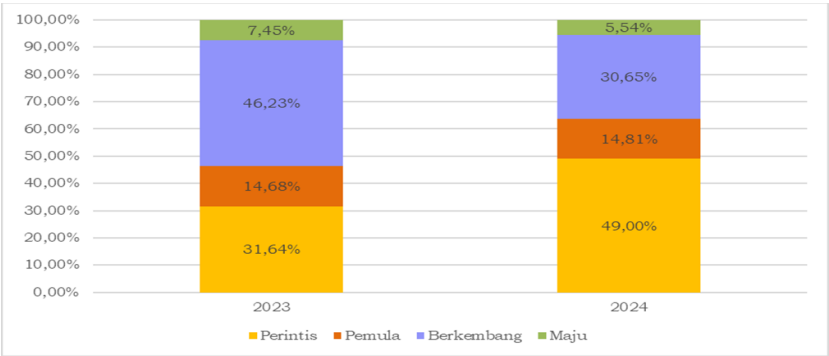


Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Gambar 2.37.
Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)

Pada tahun 2025, sesuai dengan Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 maka pengukuran capaian kemandirian desa di Jawa Tengah akan diukur dengan menggunakan Indeks Desa (ID) yang juga mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Namun terdapat perbedaan dimensi pengukuran antara IDM dan ID. Dimensi pengukuran IDM terdiri atas 3 (tiga) dimensi, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Sedangkan pengukuran ID terdiri atas 6 (enam) dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Selain dengan mengukur tingkat kemandiriannya, dukungan terhadap pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan juga didukung melalui perekonomian desa yang di dalamnya terdapat upaya peningkatan kualitas hasil produksi desa, penguatan peran lembaga ekonomi desa, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian desa, dan dukungan pemerintah desa terhadap perkembangan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penetapan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang masih perlu upaya keras dalam peningkatan ekonomi desa adalah peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa, yaitu BUMDes yang sampai dengan tahun 2024 capaian perkembangannya masih relatif rendah ditandai dengan mayoritas BUMDes masih ada di kelas berkembang dan perintis.



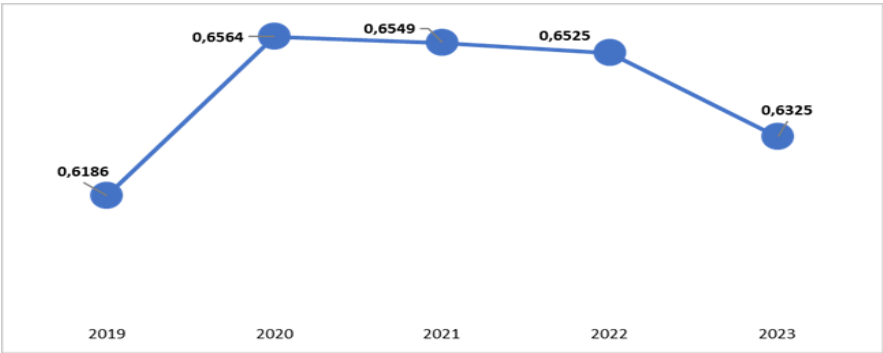
Sumber: Dispermasdesdukcapi, 2024

Gambar 2.38.
Klasifikasi Perkembangan BUMDes
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024 (Persen)

Selain upaya peningkatan perekonomian, dalam rangka meningkatkan kemandirian desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 juga didukung oleh berbagai aspek (dimensi) yaitu pemenuhan kebutuhan layanan dasar, kondisi sosial, kualitas lingkungan, ketersediaan aksesibilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar di desa meliputi ketersediaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sarana dan prasarana. Integrasi upaya pemenuhan layanan dasar juga didukung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Saat ini ke-6 bidang SPM tersebut telah diintegrasikan dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang

berperan sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan layanan desa. Penjabaran mengenai hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Sementara itu, dimensi sosial diwujudkan melalui upaya pelestarian budaya, gotong royong, penanganan konflik masyarakat, keamanan lingkungan, dan penyediaan fasilitas lainnya. Dimensi lainnya adalah lingkungan yang diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan, penanggulangan sampah, dan kebencanaan. Selanjutnya, dimensi kemudahan akses diwujudkan melalui penyediaan akses layak di desa termasuk ketersediaan sarana kelistrikan dan telekomunikasi. Sedangkan dimensi terakhir yang mendukung adalah tata kelola pemerintahan desa yang diwujudkan melalui upaya pengelolaan administrasi, aset, dan pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Selain didorong untuk tetap tumbuh, perekonomian daerah juga diarahkan agar merata. Pemerataan pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah yang ditunjukkan dengan **indeks williamson**. Indeks williamson Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 0,655 membaik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,656. Sedangkan ketimpangan antar wilayah tergambar dari indeks williamson dari 8 wilayah pengembangan (WP) Jawa Tengah. Ketimpangan tinggi berada di WP Kedungsepur dengan indeks williamson tahun 2022 sebesar 0,665, WP Purwomanggung sebesar 0,588, dan WP Wanarakuti sebesar 0,667. Sedangkan WP dengan ketimpangan antar wilayah rendah berada di WP Bregasmalang dengan indeks williamson tahun 2022 sebesar 0,334, WP Barlingmascakeb sebesar 0,284, WP Petanglong sebesar 0,253, WP Banglor sebesar 0,017, dan WP Subosukawonosraten sebesar 0,443.



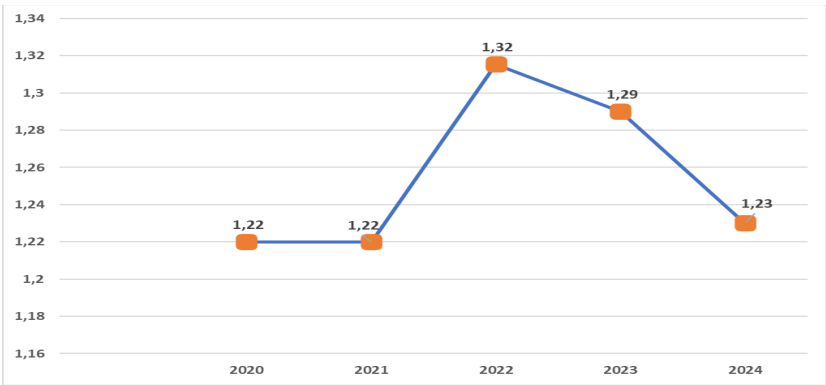
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.39.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

f. Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi stabilitas ekonomi makro Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro stabilitas, pro pertumbuhan dan pro pemerataan. Gambaran tersebut ditunjukkan dengan data **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB** yang selama lima tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19 sehingga Rasio Pajak mencapai 1,22. Tahun 2021 merupakan awal masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 meskipun demikian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

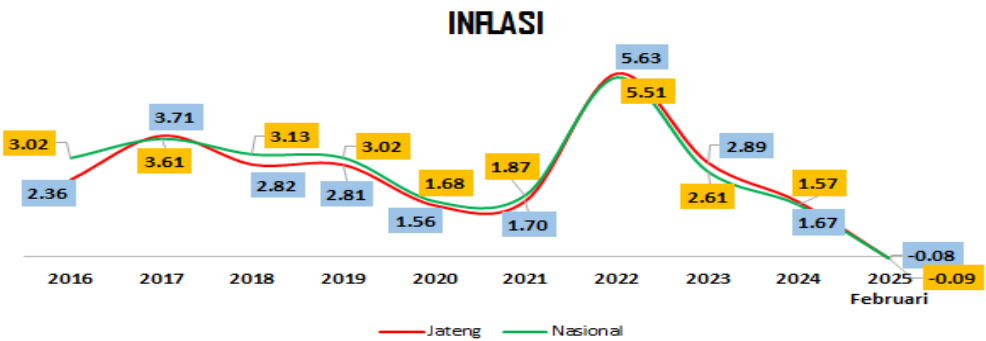
cukup berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga realisasi rasio pajak tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,22. Pemulihan ekonomi mulai berdampak pada tahun 2022 dimana rasio pajak tumbuh positif sebesar 7,41 persen menjadi 1,32. Realisasi pajak daerah pada tahun 2023 dan tahun 2024 baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota relatif tumbuh positif sebesar 5,87 persen pada tahun 2023 dan 3,23 persen pada tahun 2024. Namun demikian dikarenakan laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi yaitu 8 persen pada tahun 2023 dan 7,83 persen pada tahun 2024 sehingga rasio pajak menurun sebesar 1,29 pada tahun 2023 dan 1,23 pada tahun 2024.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 2.40.
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Disamping itu, gambaran kondisi stabilitas ekonomi makro di suatu daerah ditunjukkan melalui angka inflasi. **Inflasi** terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 (sembilan) indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mengikuti trend fluktuasi tingkat inflasi nasional dan cenderung terkendali. Kendati demikian, terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen akibat adanya gejolak ekonomi global karena konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang tidak hanya memberikan pengaruh pada inflasi nasional. Kondisi global tersebut menyebabkan gangguan dari sisi *supply* yang memicu lonjakan harga komoditas secara global. Tahun 2023 dan 2024 inflasi dapat terus terkendali, tercatat pada Bulan Februari 2025 terjadi deflasi sebesar -0,08 persen.

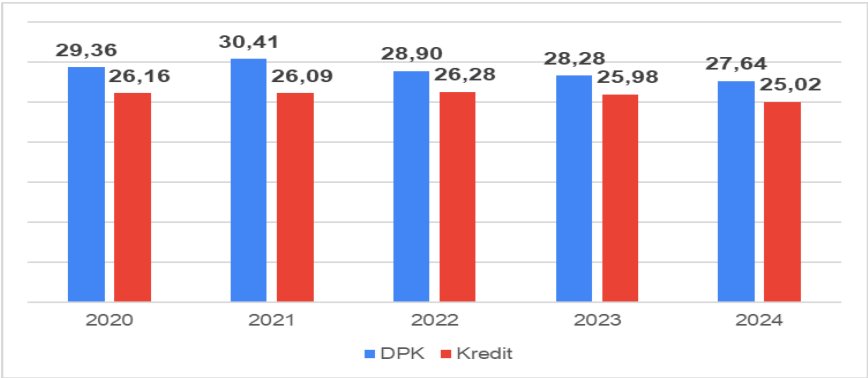


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.41.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – Februari 2025 (%)

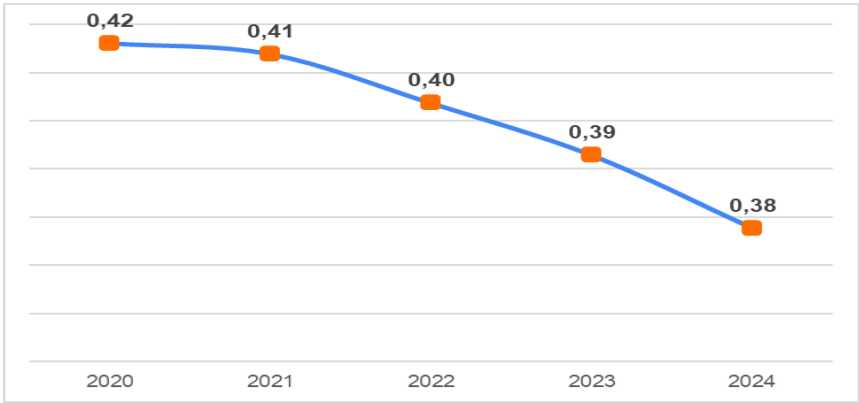
Selain itu, jika dilihat dari **pendalaman/intermediasi sektor keuangan** di Jawa Tengah yang merujuk pada peran lembaga keuangan untuk membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dalam perekonomian terdapat beberapa instrumen keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stabilitas ekonomi makro daerah. Instrumen keuangan yang dapat menggambarkan kondisi tersebut di atas adalah total dana pihak ketiga/PDRB, aset dana pensiun/PDRB, nilai transaksi saham per kapita per provinsi, dan total kredit/PDRB.

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, total dana pihak ketiga (DPK) dan total kredit yang disalurkan cukup stabil. Penghimpunan DPK dapat berdampak positif maupun negatif terhadap penyaluran kredit, tergantung pada bagaimana bank mengelola risiko dan biaya yang terkait dengan DPK. Portofolio investasi dana pensiun justru terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penempatannya yang masih cukup besar di instrumen jangka pendek. Oleh karena itu pengelolaan portofolio investasi ke depan perlu lebih mencerminkan *maturity profile* industri dana pensiun. Di sisi lain, nilai transaksi saham per kapita di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif, bahkan terus menurun pada tahun 2021-2023 meskipun dapat kembali bangkit pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi dan inkulsi pasar modal yang posisinya jauh di bawah literasi perbankan.



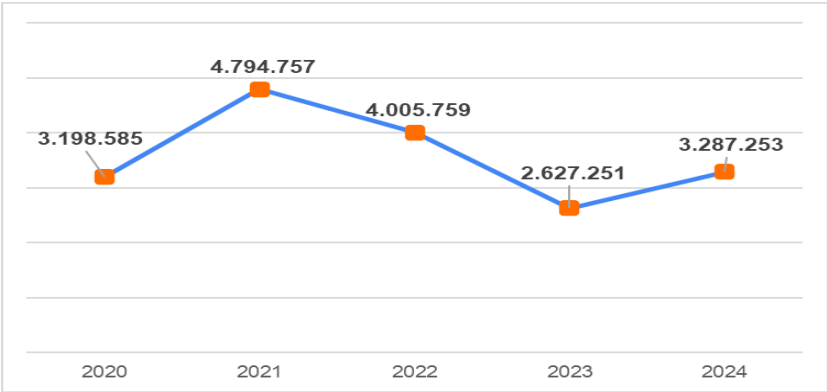
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.42.
Total Dana Pihak Ketiga dan Kredit Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.43.
Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

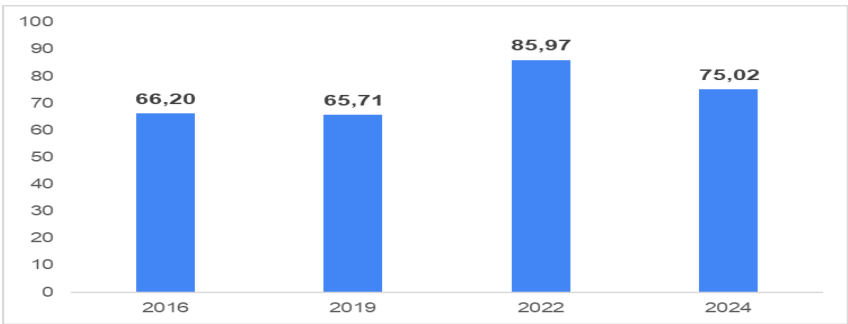


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.44.
Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Stabilitas ekonomi makro daerah juga ditunjukkan dari tingkat inklusi keuangan masyarakat. Inklusi Keuangan menunjukkan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menggambarkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan daerah. Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sampel penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Memperhatikan cakupan data sampel yang diambil maka tingkat inklusi keuangan merujuk pada skala nasional karena data sampel yang ada dianggap masih kurang mewakili untuk skala provinsi. Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka. Parameter yang digunakan adalah parameter penggunaan (*usage*), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sudah dilakukan pada tahun 2016, 2019, 2022 dan tahun 2024. Indeks inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 75,02 persen artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, sebanyak 75 orang yang terinklusi keuangan.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.45.
Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016-2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir

Kualitas birokrasi dapat diukur melalui **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**. Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan roadmap nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang baik. Capaian tahun 2024 mencapai nilai 91,11 yang menunjukkan capaian tertinggi indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Nilai IRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah berusaha menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Capaian yang tinggi ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.



Sumber: KemenPANRB, 2024

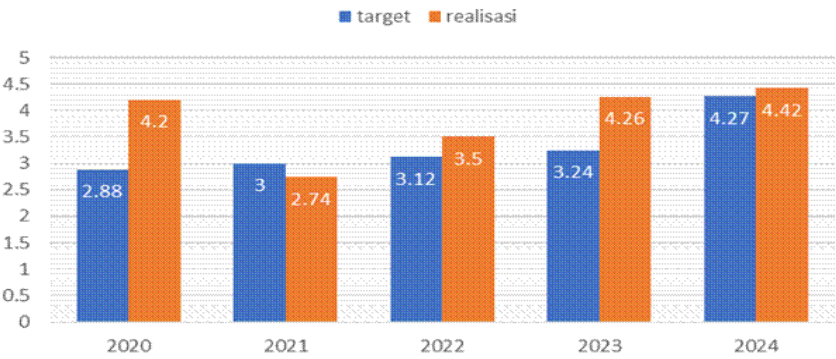
Gambar 2.46.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024

a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Salah satu komponen strategis dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah yang diukur dengan **Indeks Reformasi Hukum (IRH)**. Capaian IRH Jawa Tengah secara umum meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,25 menjadi 87,62 pada tahun 2023 dengan tambahan nilai apresiasi sebesar 9,52. Pada tahun 2024

kembali meningkat sebesar 10,66 poin menjadi 98,28 dengan tambahan nilai apresiasi sebesar 6,88.

Selain itu, sasaran strategi dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat diukur melalui indikator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*, pengadaan *server* dan *storage*; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media, serta sarpras layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur di atas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data. Keseriusan pembangunan TIK dan aplikasi pemanfaatannya telah membuahkan hasil lonjakan capaian Indeks SPBE sepanjang 2020-2024.



Sumber: KemenPANRB, 2024

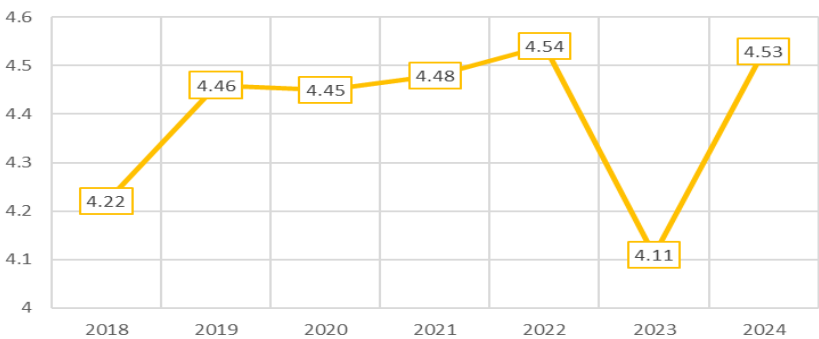
Gambar 2.47.
Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Sepanjang evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prestasi capaian SPBE. Bahkan, indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 (akibat bertambahnya indikator penilaian yaitu Sub Domain Manajemen SPBE). Secara berturut indeks SPBE Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 4,20, 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34, dan 2023 sebesar 4,26. Hasilnya, berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah semakin mantap dari capaian predikat memuaskan (4,42), bahkan menjadi terbaik nasional pada tahun 2024. Capaian ini telah mendapatkan penghargaan tertinggi Nasional SPBE *Summit* 2024 dan Peluncuran *GovTech* Indonesia yang diselenggarakan oleh KemenPANRB.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, kemajuan capaian Indeks SPBE juga didukung dengan langkah-langkah penyediaan regulasi terkait penyelenggaraan SPBE (Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, regulasi teknis lainnya seperti regulasi tentang arsitektur SPBE, peta SPBE, dan penerapan manajemen data di perangkat daerah, Rencana Induk

Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2020–2024, serta Kebijakan Satu Data Jawa Tengah). Selain itu juga dilakukan peningkatan layanan jaringan intra pemerintah dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), integrasi aplikasi berbagi pakai, literasi/sosialisasi terkait keamanan informasi kepada aparatur berupa optimalisasi *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan pentest, serta optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan perangkat daerah terkait, serta peningkatan layanan SPBE seperti peningkatan kualitas pengelolaan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti melalui aplikasi LaporGub.

Pelayanan publik sebagai sistem hilir dapat dilihat kualitasnya melalui **Indeks Pelayanan Publik (IPP)**. Indeks ini mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Nilai IPP Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan dari 4.22 menjadi 4.53. Meski mengalami kenaikan nilai ini belum menunjukkan pemulihan dari capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 4.54. Meski begitu capaian nilai tahun 2024 menunjukkan upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik setelah nilai turun di angka 4,11.

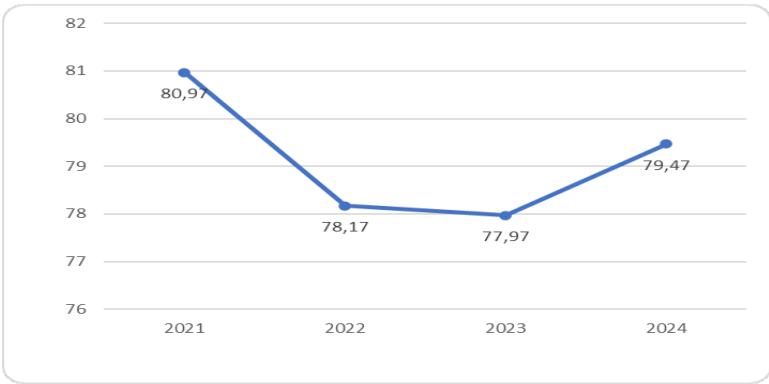


Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.48.

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024

Upaya pencapaian reformasi birokrasi perlu menghapus seluruh praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Untuk menjaga dari perilaku korupsi, maka integritas baik individu dan organisasi menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil **Survey Penilaian Integritas (SPI)** digunakan untuk menunjukkan tingkat Integritas Individu dan Organisasi Pemerintah. Capaian nilai SPI Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari 80,97 pada tahun 2021 menjadi 77,91 pada tahun 2023. Namun mengalami lonjakan pada tahun 2024 menjadi 79,47 dan mendapatkan nilai provinsi tertinggi di Indonesia. Jika disandingkan dengan Nasional dalam rentang waktu waktu yang sama, nilai capaian Jawa Tengah masih lebih baik dari capaian Nasional yaitu sebesar 72,4 pada tahun 2021 menurun menjadi 71,53 pada tahun 2024. Meskipun mengalami lonjakan dan capaian diatas nasional, capaian tersebut mengindikasikan upaya pencegahan korupsi dan integritas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu untuk ditingkatkan.



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, 2024 diolah

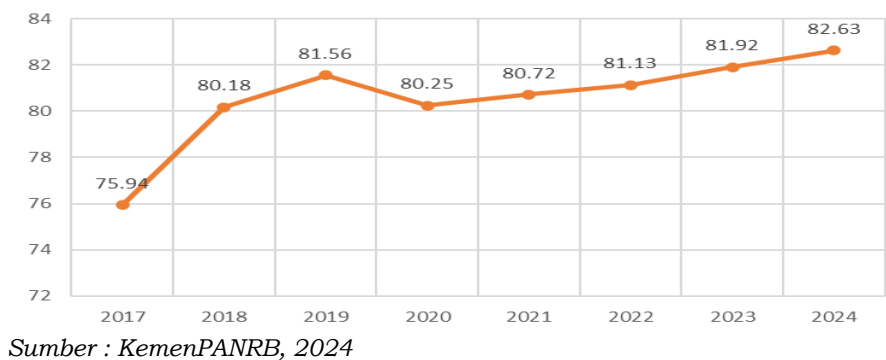
Gambar 2.49.

**Survey Penilaian Integritas (SPI)/Indeks Integritas Nasional (IIN)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024**

Selain itu, dilaksanakan **pengendalian dan pengawasan** yang bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Capaian SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2018, capaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,023, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,471. Sementara itu, pada tahun 2020, penilaian tidak dilakukan karena adanya perubahan metode penilaian.

Disisi lain, penerapan **manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis sistem merit konsisten meningkat. Sistem Merit merupakan manajemen ASN berdasarkan kemampuan, kinerja, dan prestasi, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti afiliasi politik, hubungan pribadi, atau latar belakang sosial. Capaian indeks merit tahun 2020 sebesar 0,7, melonjak signifikan pada tahun 2021 dengan nilai indeks merit 0,81. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam upaya penerapan sistem merit secara lebih menyeluruh di setiap aspek. Selanjutnya, nilai Indeks Sistem Merit terus meningkat mencapai 0,83 pada tahun 2024. Penerapan sistem merit yang semakin baik diharapkan berpotensi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperbaiki transparansi, serta menciptakan birokrasi yang lebih adil dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintah dikelola dalam sebuah sistem manajemen kerja yang penilaian kualitasnya dapat dilihat melalui penilaian indeks **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. SAKIP mencakup penilaian konsep manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang baik dari 75,94 menjadi 82,63. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan dan penyesuaian dalam manajemen kinerja. Terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan yaitu menyempurnakan penjenjangan kinerja, meningkatkan kualitas penetapan target, meningkatkan kualitas indikator, mengoptimalkan pemanfaatan informasi, dan peningkatan upaya tindak lanjut.



Gambar 2.50.
Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024

Pelayanan umum yang baik harus didukung oleh perencanaan pembangunan yang berkualitas. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas salah satunya ditunjukkan dengan nilai **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)**. Nilai IPPN Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 secara umum mencapai predikat sangat baik (93,89). Nilai IPPN tersebut terdiri dari nilai aspek sinergitas keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran antara Daerah-Nasional sebesar 27,53, aspek kualitas perencanaan yaitu keselarasan antara isu strategis dengan target dan program kegiatan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek dan inovasi sebesar 56,36, serta aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja sebesar 10,00. Berdasarkan rincian per aspek tersebut masih terdapat substansi penilaian indikator/sub indikator dengan predikat cukup baik, bahkan terdapat substansi yang indikator/sub indikator dengan predikat sangat kurang khususnya pada aspek sinergitas keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan antara RPJMD dengan RPJMN serta keselarasan antara SPM Daerah dengan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah diarahkan berbasis risiko, dan riset guna peningkatan kualitas. Perencanaan berbasis risiko dimaksudkan agar perangkat daerah mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta mengendalikan risiko yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Disamping itu, perencanaan juga diarahkan memanfaatkan hasil riset. Kondisi saat ini hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu perlu pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, serta membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perencanaan.

b. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Selanjutnya terkait dengan gambaran kondusivitas wilayah di Jawa Tengah yang perlu dijaga dalam rangka menciptakan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Salah satu yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat **Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah** dari Lemhannas-RI. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Capaian Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Trend Kinerja
Indeks Ketahanan Nasional Jateng		2,98	3,02	3,04	3,05	3,03	Menurun
1	Gatra Geografi	2,63	3,73	3,33	3,43	3,43	Stagnansi
2	Gatra Demografi	3,12	3,28	3,28	3,29	3,22	Menurun
3	Gatra Kekayaan Alam	2,68	2,76	2,76	2,76	2,74	Menurun
4	Gatra Ideologi	2,92	2,98	2,98	2,98	2,96	Menurun
5	Gatra Politik	3,15	3,14	3,14	3,15	3,08	Menurun
6	Gatra Ekonomi	2,98	2,99	2,99	2,99	2,99	Stagnansi
7	Gatra Sosial Budaya	3,19	2,95	2,95	2,95	2,98	Meningkat
8	Gatra Pertahanan dan Keamanan	2,97	3,02	3,02	3,02	3,02	Stagnansi

Sumber : LEMHANAS, 2024

Indeks ketahanan gatra merupakan agregat dari indeks ketahanan variabel, dan indeks ketahanan variabel merupakan agregat dari indeks ketahanan indikator. Dengan demikian indeks ketahanan nasional dapat ditinjau berdasarkan komposisi variabel maupun indikator pembentuknya. Nilai atas beberapa komposisi variabel dan indikator yang membentuk indeks ketahanan nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut:

- a. 11 variabel dan 107 indikator berada pada posisi Rawan,
- b. 20 variabel 57 indikator berada pada posisi Kurang Tangguh,
- c. 31 variabel dan 102 indikator berada pada posisi Cukup Tangguh,
- d. 24 variabel dan 48 indikator berada pada posisi Tangguh,
- e. 11 variabel dan 135 indikator berada pada posisi Sangat Tangguh.

Beberapa indikator yang masuk dalam kategorisasi Rawan dan Kurang Tangguh memiliki implikasi jangka pendek dan menengah, secara jangka pendek akan menjadi potensi-potensi konflik yang dapat membesar dan menjadi simpul kerawanan, dimana secara jangka menengah menjadikan konflik tersebut meluas dan kompleks. Beberapa indiaktor dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Daftar Indikator pada Seluruh Gatra di Indeks Ketahanan Nasional yang
Tergolong Kurang Tangguh dan Rawan

VARIABEL	INDIKATOR	CAPAIAN JAWA TENGAH			RATA-RATA PROVINSI TAHUN 2023	
		2022	2023	SKOR 2023	NILAI 2023	SKOR 2023
Ketersediaan Pangan	Persentase produksi gula terhadap kebutuhan	44	44	1	113,54	5
	Persentase produksi kedelai terhadap kebutuhan	20.35	20.35	1	45,43	1

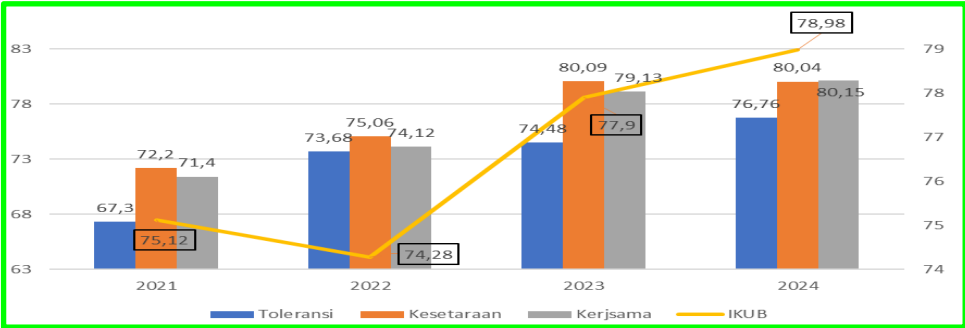
VARIABEL	INDIKATOR	CAPAIAN JAWA TENGAH			RATA-RATA PROVINSI TAHUN 2023	
		2022	2023	SKOR 2023	NILAI 2023	SKOR 2023
	Persentase produksi daging sapi terhadap kebutuhan	74.98	63,78	1	95,38	4
Sumber daya air	Persentase kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih PDAM	18	18	1	22,43	1
Hutan dan hasil hutan	Persentase luas kawasan hutan terhadap daratan	19.21	19,21	1	41,53	5
Kondisi lingkungan hidup	Keanekaragaman hayati (persentase luas hutan primer terhadap total luas hutan lindung ditambah hutan konservasi)	3.74	3.74	1	8.051,80	5
Tolerans	Frekuensi dialog antar umat beragama tahun terakhir	2	2	1	5.94	1
	Frekuensi konflik fisik antar umat beragama tahun terakhir	2	2	4	1	4
	Frekuensi konflik fisik intra ummat beragama tahun terakhir	1	1	4	0.7	4
Kewajiban Sosial	Persentase anak terlantar terhadap seluruh anak berusia < 15 tahun	0.61	0.61	5	2.96	4
Solidaritas Sosial	Jumlah panti asuhan per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun	8.91	8.91	1	8.64	1
	Jumlah panti jompo per 100.000 penduduk berusia > 65 tahun	1.64	1.64	2	4.06	5
	Persentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial	2.08	2.08	1	1.64	1
Kesetaraan (gatra Ideologi)	Rasio Kapasitas Fiskal (Dana Bagi Hasil + Pajak Asli Daerah) terhadap (Dana Alokasi Umum dan	1.47	0.38	1	2.26	3

VARIABEL	INDIKATOR	CAPAIAN JAWA TENGAH			RATA-RATA PROVINSI TAHUN 2023	
		2022	2023	SKOR 2023	NILAI 2023	SKOR 2023
	Dana Alokasi Khusus) dalam tahun terakhir					
Kepastian Hukum	Independensi sistem peradilan dari kekuasaan birokrasi	8	8	1	4.94	1
Kelompok Bisnis/Usaha	Pemberdayaan lembaga ekonomi lokal dan UMKM	0.03	0.3	1	58.87	3
Ormas Pemuda	Independensi ormas pemuda dari partai politik	80	80	1	16.77	4
Sandang	Persentase pengeluaran sandang terhadap pengeluaran total perkapita	2,77	2,26	1	2,56	1
Pertambahan Kekayaan	Pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan	-3.27	-3,27	1	-2,67	1
Eksklusi Sosial	Rasio wanita rawan ekonomi per 1.000 penduduk wanita	50.59	48.46	1	8.75	2
Pendidikan	Tingkat kelulusan SLTA	49.79	57.79	1	63.85	1
	Persentase SLTA swasta terhadap seluruh SLTA	72.91	57.55	2	40.72	3
	Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh (dalam tahun)	8.19	8.01	1	8.93	1
	Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh laki-laki (dalam tahun)	8.45	8.45	1	9.21	2
	Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh perempuan (dalam tahun)	7.63	7.63	1	8.71	1
	Akreditasi SD (Persentase SD yang terakreditasi A atau B)	17.78	17.78	1	20.03	1
	Akreditasi SLTP (Persentase SLTP yang terakreditasi A atau B)	19.62	29.57	1	22.51	1
	Akreditasi SLTA (Persentase SLTA yang terakreditasi A atau B)	14.28	26.42	1	31.21	1
Kesehatan	Persentase desa yang memiliki polindes	14.39	14.39	1	18.05	1

VARIABEL	INDIKATOR	CAPAIAN JAWA TENGAH			RATA-RATA PROVINSI TAHUN 2023	
		2022	2023	SKOR 2023	NILAI 2023	SKOR 2023
Keluarga	Rasio perceraian terhadap 1.000 pasangan suami-isteri	210.71	241.97	1	217.25	1
Kerukunan Sosial	Jumlah konflik fisik masal (antar desa/kampung, suku, ormas dan kelompok masyarakat lain) yang terjadi dalam setahun terakhir	233	233	1	93.5	1
	Jumlah Konflik antara aparat pemerintah dengan masyarakat	251	251	1	31	1

Sumber: LEMHANAS, 2024

Selain itu, **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** dapat digambarkan sebagai berikut. Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan IKUB dari 77,9 pada tahun 2023 menjadi sebesar 78,98 pada tahun 2024. Namun pada aspek kesetaraan terjadi penurunan. Hal ini juga terjadi pada penilaian yang ada di Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah yaitu turun 2,49 poin. Variabel berkaitan terjaminnya kesetaraan, dimana partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu terkait dengan aspek kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat, maupun kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan meskipun tidak terlalu banyak.begitu juga pada aspek kebebasan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.51.
Capaian IKUB Jawa Tengah Beserta Dimensinya Tahun 2021-2024

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondusifnya sebuah wilayah terutama yang dirasakan oleh masyarakat adalah dari seberapa banyak **penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya**. Kondisi tersebut di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 63,5 menjadi sebesar 74,56 pada tahun 2020.

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi Hak Asasi Manusia diantaranya mendukung Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan melaksanakan dan melaporkan Aksi HAM setiap

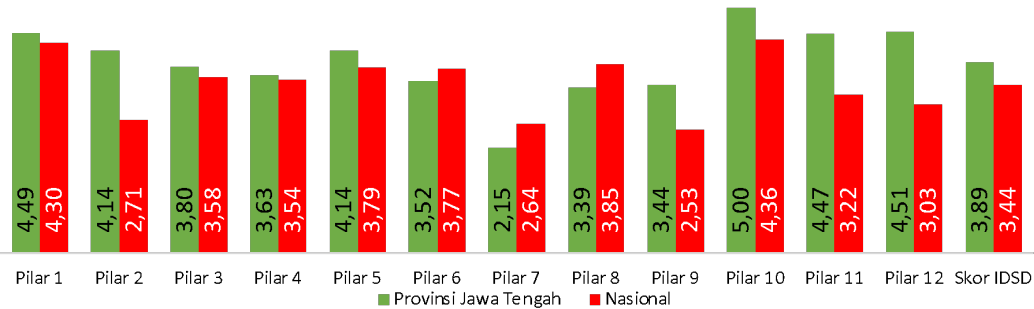
tahun. RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sedangkan Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM yang berfokus pada 4 (empat) peningkatan hak-hak kelompok rentan dan marjinal yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, **Capaian Aksi HAM** Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 capaian aksi HAM Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,7, sempat mengalami penurunan menjadi 52,0 pada tahun 2022 tetapi kembali meningkat menjadi 95,0 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian aksi HAM Provinsi Jawa Tengah meningkat 4,8 poin menjadi 99,8.

c. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Jawa Tengah juga lebih baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dari indikator **Indeks Daya Saing Daerah** (IDSD). Nilai IDSD tahun 2023 sebesar 3,89 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3,63. Dari keempat komponen pembentuk IDSD, komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia mengalami peningkatan, sedangkan komponen ekosistem inovasi mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi karena terdapat penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis. Sementara itu, pada komponen pasar tumbuh cukup tajam pada tahun 2023 yang disebabkan karena penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 9 dan pilar 10.

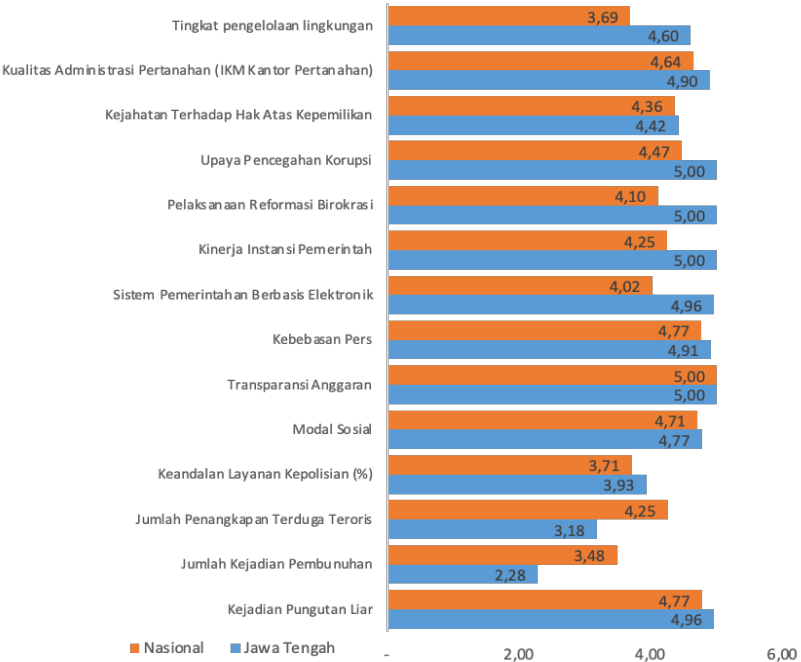
Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian Jawa Tengah tahun 2023 pada komponen lingkungan pendukung, komponen pasar dan komponen ekosistem inovasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Dari keempat komponen pembentuk IDSD, 2 komponen mampu tumbuh lebih tinggi dari angka nasional yaitu komponen lingkungan pendukung (6,43 persen) dan komponen SDM (2,72 persen), meski komponen SDM memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Sementara pada komponen pasar, pertumbuhan Jawa Tengah (37,68 persen) cenderung lebih rendah dibandingkan angka Nasional (73,55 persen). Sedangkan jika dilihat dari 12 pilar IDSD, pada pilar 6, 7, dan 8 Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Pilar 6 terkait dengan keterampilan tenaga kerja, pilar 7 menggambarkan pasar produk, dan pilar 8 terkait dengan pasar tenaga kerja.



Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.52.
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sedangkan dalam rangka memberikan gambaran kepemimpinan daerah di Jawa Tengah, salah satunya dapat dilihat dari pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu Pilar 1 **Kapasitas Institusi**. Kapasitas institusi mampu memberikan gambaran bagaimana kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola daerah/institusinya sehingga daerah memiliki pengaruh terhadap nasional maupun internasional. Kapasitas institusi merepresentasikan bagaimana daerah mampu mewujudkan keamanan, *check* dan *balance* termasuk kebebasan pers di dalamnya, pencegahan korupsi, hak atas kepemilikan serta orientasi masa depan pemerintah daerah dalam konteks stabilitas kebijakan berbisnis dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023, capaian kapasitas institusi Jawa Tengah sebesar 4,49 berada di atas nasional sebesar 4,30. Namun demikian, Jawa Tengah masih perlu upaya dan strategi dalam mencegah dan mengurangi kejadian pungutan liar yang pada tahun 2023 nilainya lebih tinggi daripada nasional.



Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.53.
Skor Pilar 1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) – Kapasitas Institusi
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

2.1.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil evaluasi sebagai berikut.

Tabel 2.14.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2023

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencana an	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				Aspek Kesejahteraan Masyarakat																
1	Angka Kemiskinan	%	10,49-10,30	9,86-9,05	Angka Kemiskinan	%	11,19	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	7,48-6,48	11,84	11,25	10,98	10,77	10,77	97,40	91,55	69,45	Sedang
2	Indeks Gini	Angka	0,35	0,34	Indeks Gini	Angka	0,35	0,34	0,33	0,32	0,3	0,3	0,359	0,368	0,366	0,369	0,369	94,85	92,14	81,30	Tinggi
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,38-9,22	8,82-8,09	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,67	9,44	9,37	9,21	9,17	9,17	10,57	10,16	10,02	9,78	9,78	94,56	88,91	92,44	Sangat Tinggi
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	11,65-11,45	10,96-10,05	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	12,8	12,65	12,35	12,12	11,97	11,97	13,2	12,44	10,98	11,87	11,87	96,76	91,03	99,42	Sangat Tinggi
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	433,38	450,72	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	451,28	478,76	493,12	507,91	523,15	523,15	396,87	385,532	418,317	420,42	420,42	97,01	93,28	80,36	Tinggi
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,5	61,75	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,83	61	61,25	61,5	61,75	61,75	0,359	58,41	63,16	62,59	62,59	101,77	101,36	101,36	Sangat Tinggi
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan	%	30	29,75	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan	%	30,86	30,5	30,25	30	29,75	29,75	30,47	27,7	31,95	33	33	110,00	110,92	110,92	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	terendah dengan keluhan kesehatan				terendah dengan keluhan kesehatan																
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 - 5,69	5,48-4,80	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4,33	4,23	4,13	4	4	6,48	5,95	5,57	5,13	5,13	103,23	98,38	77,97	Tinggi
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,48	7,26	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,71	5,65	5,6	5,55	5,5	5,5	7,95	5,51	4,1	6,03	6,03	80,61	83,06	109,64	Sangat Tinggi
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 - 5,20	5,20-5,60	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,32	5,4-5,7	5,4-5,8	5,5-5,8	5,6-6,0	5,6-6,0	- 3,34 (y-o-y)	3,32	5,31	4,98	4,98	101,54	94,29	94,29	Sangat Tinggi
11	Inflasi	%	3,0±1	3,0±1	Inflasi	%	2,82	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	1,56	1,7	5,63	2,89	2,89	50	50	50	Sangat Rendah
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	39,56	40,87	PDRB per kapita	Juta Rupiah	36,78	39,25	41,15	43,25	45,35	45,35	38,67	38,67	42,15	42,15	42,15	106,55	103,13	92,94	Sangat Tinggi
13	Indeks Williamson	Angka	0,57	0,56	Indeks Williamson	Angka	0,6192	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	NA	0,608	0,656	0,656	0,656	86,89024	85,37	85,37	Tinggi
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3	3,1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	2,63	2,9	3	3	3,1	3,1	2,48	0,35	2,92	2,11	2,11	70,33	68,06	68,06	Sedang
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	2,93	5,65	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,35	5,1	5,35	5,6	5,65	5,65	- 3,74	2,02	3,88	4,35	4,35	148,46	76,99	76,99	Tinggi
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	2,82	5,9	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,7	5,67	5,7	5,7	5,9	5,9	-3,8	5,8	5,87	6,35	6,35	225,18	107,63	107,63	Sangat Tinggi
17	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	15,3	3,2	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3	3,15	3,15	3,2	3,2	3,2	2,99	2,88	9,63	9,63	9,63	62,94	300,94	300,94	Sangat Tinggi
18	Pertumbuhan nilai	%	4,00 - 5,00	9,00-	Pertumbuhan Investasi	%	15	9	9	10	10	10	-5,8	1,76	11,72	0,22	0,22	72,25	32,11	2,20	Sangat Rendah

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Perio d e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	penanaman modal			10,00																	
19	Nilai Tukar Petani	Angka	103,56	104,05	Nilai Tukar Petani	Angka	102,25	102,42	102,72	102,96	103,15	103,15	101,49	103,18	107,27	117,11	117,11	113,08	112,55	113,53	Sangat Tinggi
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,49	72,88	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,12	72	72,5	72,7	73	73	71,78	72,16	72,79	73,39	73,39	101,24	100,70	100,53	Sangat Tinggi
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	7,9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,35	7,34	7,37	7,41	7,45	7,45	7,69	7,75	7,93	8,01	8,01	102,43	101,39	107,52	Sangat Tinggi
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,94	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,92	13	13,08	13,17	13,17	12,7	12,77	12,81	12,85	12,85	100,00	99,30	97,57	Sangat Tinggi
23	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,59	74,73	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,09	74,1	74,1	74,1	74,1	74,37	74,47	74,57	74,69	74,69	100,13	99,95	100,80	Sangat Tinggi
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	92,58	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,95	92,06	92,12	92,18	92,25	92,25	NA	92,48	92,83	92,87	92,87	100,75	99,94	100,67	Sangat Tinggi
B	Aspek Pelayanan Umum				Aspek Pelayanan Umum																
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
	PENDIDIKAN				PENDIDIKAN																
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8,76	6,79	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	7,37	7,25	7,1	7	6,79	6,79	12,92	8,78	8,78	9,95	9,95	88,04	68,24	68,24	Sedang
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,8	80,43	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	76,01	77,98	78,79	79,59	80,43	80,43	83,48	81,93	83,83	92,78	92,78	110,72	115,35	115,35	Sangat Tinggi
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07	0,08	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,00	87,50	87,50	Tinggi
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	99,15	91,55	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	86,5	89,5	90,75	91,5	91,55	91,55	98,85	99,06	99,85	99,5	99,5	100,35	108,68	108,68	Sangat Tinggi
	KESEHATAN				KESEHATAN																

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	88	100	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	78,6	85,5	84	82,5	81	81	98,6	199	84,6	84,6	84,6	104,02	118,20	95,74	Sangat Tinggi
6	Angka Kematian Balita	1.000 /KH	10,45	9,2	Angka Kematian Balita	1.000/ KH	8,36	8,1	8	7,9	7,8	7,8	7,79	8,95	8,2	8,2	8,2	127,44	112,20	95,12	Sangat Tinggi
7	Angka Kematian Bayi	1.000 /KH	7,9	7,8	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	9,48	10,45	10,45	10,45	10,43	10,43	8,99	7,87	7,02	7,02	7,02	112,54	111,11	148,58	Sangat Tinggi
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,2	0,21	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,18	0,23	0,26	0,29	0,32	0,32	0,19	0,2	0,23	0,32	0,32	160,00	152,38	100,00	Sangat Tinggi
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	63	69	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	43	51	57	63	69	69	57	57	63	69,47	69,47	110,27	100,68	100,68	Sangat Tinggi
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	74	60	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	45	52	54	57	60	60	65,5	65,5	85,08	91,71	91,71	123,93	152,85	152,85	Sangat Tinggi
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	72	85,71	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	47	57	62	67	72	72	84,29	84,12	86,43	92,14	92,14	127,97	107,50	127,97	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	83	84	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	77,54	81	82	83	84	84	81,43	92,65	84,56	88,97	88,97	107,19	105,92	105,92	Sangat Tinggi
14	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89	90	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	87,57	87,61	87,63	87,65	87,67	87,67	89,6	89,82	90,26	94,15	94,15	105,79	104,61	107,39	Sangat Tinggi
15	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	90	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	84,44	85	85	90	90	90	85,55	87,78	91,11	91,11	91,11	101,23	101,23	101,23	Sangat Tinggi
16	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	85	87	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	80	80	85	90	95	95	82,3	86,73	86,73	88,49	88,49	104,11	101,71	93,15	Sangat Tinggi
17	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	99,79	100	100	100	100	100	99,31	99,23	99,62	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	Sangat Tinggi
18	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82	97,33	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,06	98,1	98,12	98,15	98,17	98,17	92,07	96,6	98,56	98,08	98,08	119,61	100,77	99,91	Sangat Tinggi
19	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	95	97	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	81,8	85	90	95	100	100	92,03	92,65	98,35	97,9	97,9	103,05	100,93	97,90	Sangat Tinggi
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
20	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	14,21	15,23	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	10,15	12,18	13,2	14,21	15,23	15,23	11,37	12,42	14,21	15,23	15,23	107,18	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	41,81	44,24	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,59	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24	39,68	41,56	43,5	45,03	45,03	107,70	101,79	101,79	Sangat Tinggi
					Persentase akses aman air aman perkotaan	%	84,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15	88,23	90,32	90,32	92,45	92,45			98,19	Sangat Tinggi
					Persentase akses aman air aman perdesaan	%	74,55	78,05	79,8	81,55	83,3	83,3	81,98	83,42	83,42	84,08	84,08			100,94	Sangat Tinggi
22	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	87,73	89,65									-	-	88,97	90,17	90,17	102,78	100,58		
23	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91,55	92,35	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	89,6	90,8	91,5	92	92,5	92,5	90,73	90,86	92,49	90,32	90,32	98,66	97,80	97,64	Sangat Tinggi
24	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65,2	66,85	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	61,39	63,87	65,14	66,41	67,69	67,69	63,27	64,06	65,81	66,45	66,45	101,92	99,40	98,17	Sangat Tinggi
25	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,36	54,95	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	52,67	54,24	55,04	55,83	56,62	56,62	53,47	53,79	54,43	54,98	54,98	101,14	100,05	97,10	Sangat Tinggi
26	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan	%	76,04	78,75	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan	%	70,12	73,5	75,25	77	78,75	78,75	73,06	74,34	77,19	80,27	80,27	105,56	101,93	101,93	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Ruang Terhadap RTR				Ruang Terhadap RTR																
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
27	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni		24,76	46,7	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	NA	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16	11,24	39,96	58,54	67,7	67,7	273,42	144,97	198,19	Sangat Tinggi
28	Persentase penurunan kawasan kumuh		25,27	8,1	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	NA	71,03	63,97	56,9	49,83	49,83	38,22	28,29	15,75	7,92	7,92	31,34	97,78	316,38	Sangat Tinggi
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				
29	Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	%	100	100		%							-	-	100	100	100	100,00	100,00		
30	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	100		%							-	-	100	100	100	100,00	100,00		
31	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
32	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	5	12	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	NA	10	10	10	10	50	10,71	7,29	10,35	1,36	39,77	795,40	331,42	79,54	Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangk u kepentingan PB	%	3	5	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangk u kepentingan PB	%	NA	5	5	5	5	25	5,1	6,3	12,83	6,7	49,08	1.636,00	981,60	196,32	Sangat Tinggi
34	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
					Indeks Ketahanan Daerah	%	3,5	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6	3,54	3,55	3,65	3,65	3,65			101,3889	Sangat Tinggi
					Persentase kab/kota yang kondusif	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	Sangat Tinggi
	SOSIAL																				
35	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	1,9	2,37									-	-	5,55	8,03	8,03	422,63	338,82		
					Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	NA	0,95	1,42	1,9	2,37	2,37	0,95	1,4	5,55	8,24	8,24			347,68	Sangat Tinggi
36	Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	25,74	34,38									-	-	25,74	36,59	36,59	142,15	106,43		
					Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	7851	17,93	26,9	35,87	44,83	44,83	11,99	15,84	25,74		25,74			57,42	Rendah
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																				

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TENAGA KERJA																				
37	Persentase pengangguran yang ditangani	%	9,86	28,55	Persentase pengangguran yang ditangani	%	20,65	25,86	27,37	28,15	28,55	28,55	10,1	19,7	28,02	8,61	8,61	87,32	30,16	30,16	Sangat Rendah
38	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	70,47	71,01	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,5	69,54	70,09	70,47	71,01	71,01	37,07	50,63	70,52	64,24	64,24	91,16	90,47	90,47	Sangat Tinggi
					Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	92,11	92,5	93	95,5	96	96	91,43	89,74	89,74		89,74			93,48	Sangat Tinggi
					Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaa n	%	86,96	87,26	87,41	87,56	87,7	87,7	96,56	97,6	97,6		97,6			111,29	Sangat Tinggi
39	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaa n)	%	90,56	91,67									-	-	90,83	92,04	92,04	101,63	100,40		
40	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupia h	54,61	54,62	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupia h	54,57	54,59	54,6	54,61	54,62	54,62	55,01	55,91	57,11	13,92	13,92	25,49	25,49	25,49	Sangat Rendah
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	5,68	8,19	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	6,49	7,09	7,39	7,89	8,19	8,19	11,08	5,34	12,2	8,26	8,26	145,42	100,85	100,85	Sangat Tinggi
42	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaa n	%	91,07	82,97	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaa n	%	97,56	92,09	89,26	86,21	82,97	82,97	91,92	89,51	88,1	81,58	81,58	89,58	98,32	98,32	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1					Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	53	59	62	65	68	68	40,05	43,42	43,42		43,42			63,85	Rendah
43	Persentase kabupaten/kot a yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	28,57	57,14									-	-	34	65,71	65,71	230,00	115,00		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,15	8,07	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,44	8,29	8,22	8,15	8,07	8,07	8,49	8,97	8,1	8,02	8,02	101,62	100,62	100,62	Sangat Tinggi
45	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	91,43	100	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	82,86	85,71	88,57	91,43	100	100	91,43	100	100	100	100	109,37	100,00	100,00	Sangat Tinggi
46	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,27	34,3									-	-	36,11	51,42	51,42	150,04	132,25		
47	Persentase kabupaten/kot a yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60	62,85	Persentase kabupaten/kot a yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	22,86	25,71	28,57	31,43	34,29	34,29	54,28	62,85	71,42	82,86	82,86	138,10	100,01	241,64	Sangat Tinggi
48	Persentase pemerintah daerah yang	%	80	90									-	-	80	90	90	112,50	100,00		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	melaksanakan kebijakan PUG																				
49	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,05	8,02	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,2	8,13	8,09	8,05	8,02	8,02	8,99	8,35	7,47	5,49	5,49	146,63	146,08	146,08	Sangat Tinggi
50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,62	72,7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	75,1	75,14	75,16	75,18	75,2	75,2	NA	71,73	73,78	73,78	73,78	101,60	101,21	98,11	Sangat Tinggi
	PANGAN																				
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44	88,8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	87,3	87,72	88,08	88,44	88,8	88,8	87,1	86,67	94,4	94,2	94,2	106,51	106,08	106,08	Sangat Tinggi
52	Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2100	2100											2018	2025	2025	96,43	96,43		
					PPH Ketersediaan	Angka	85,3	82,75	83	83,25	83,5	83,5	82,27	85,84			85,84			102,80	Sangat Tinggi
					Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	Kkal/kapita/hari	2.090,17	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2048	2054,43			2054,43			95,55	Sangat Tinggi
					Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Kkal/kapita/hari	63,7	57	57	57	57	57	59,9	60,24			60,24			105,68	Sangat Tinggi
	PERTANAHAN																				
53	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	199,72	205,84	321,89	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	Sangat Tinggi
	LINGKUNGAN HIDUP																				
54	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,4	3,39	3,17	3,39	3,39	101,77	101,77	101,77	Sangat Tinggi
55	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Indeks Kualitas Air	%	48,47	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07	50,52	50,55	50,63	50,55	50,55			100,96	Sangat Tinggi
					Indeks Kualitas Udara	%	84,21	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11	84,73	84,6	85,14	84,9	84,9			99,75	Sangat Tinggi
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIL																				
56	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	100									-	-	100	100	100	100,00	100,00		
					Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	Sangat Tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
57	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	50,34	68	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	NA	16,3	17,86	18,25	20,35	20,35	48,57	63,82	82,27	91,27	91,27	181,31	134,22	448,50	Sangat Tinggi
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																				
58	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,19	2,2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	0	2,24	2,22	2,2	2,18	2,18	2,23	2,09	2,15	2,04	2,04	93,15	92,73	93,58	Sangat Tinggi
59	Angka pemakaian kontrasepsi/C PR	Angka	65,17	64,76	Angka pemakaian kontrasepsi/C PR	Angka	73,69	75,1	75,25	75,5	76	76	73,26	70,35	65,18	68,98	68,98	105,85	106,52	90,76	Sangat Tinggi
60	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29	54,38										56,1	58,16	63,07	63,07	112,04	115,98		
					Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	22,14	21,14	20,64	20,14	19,64	19,64	22,25	21,99			21,99			111,97	Sangat Tinggi
					Sumbangan perempuan	%	0	34,21	34,24	34,27	34,3	34,3	34,28	34,29			34,29			99,97	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					dalam pendapatan kerja																
	PERHUBUNGAN																				
61	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,38	60,38	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	30,34	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38	37,84	43,38	54,98	73,89	73,89	155,95	122,37	122,37	Sangat Tinggi
62	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,49	51,45	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	6,08	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45	12,85	21,18	29,19	49,81	49,81	212,05	96,81	96,81	Sangat Tinggi
63	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	66,67	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	26,67	40	46,67	53,33	66,67	66,67	40	46,67	46,67	66,67	66,67	142,85	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
64	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,83	3,95	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,3	2,51	2,61	2,71	2,82	2,82	3,71	2,5	3,7	2,6	2,6	67,89	65,82	92,20	Sangat Tinggi
65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,53	3,65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	2,69	2,94	3,06	3,18	3,3	3,3	3,47	2,3	3,5	3,3	3,3	93,48	90,41	100,00	Sangat Tinggi
66	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,17	4,3	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	2,93	3,2	3,33	3,46	3,6	3,6	4,67	3,49	4,62	3,94	3,94	94,48	91,63	109,44	Sangat Tinggi
	KOPERASI DAN UKM																				
67	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	9,88	29,68	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	16,68	21,08	23,68	26,58	29,68	29,68	- 2,58	17,42	9,94	23,28	23,28	235,63	78,44	78,44	Tinggi
68	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	21,1	29,95	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	18,22	22,8	25,3	27,7	29,95	29,95	- 2,79	28,08	21,19	27,96	27,96	132,51	93,36	93,36	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PENANAMAN MODAL																				
69	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	100	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	126	100	100	100	100	100	202	111,71	104,38	117,23	117,23	117,23	117,23	117,23	Sangat Tinggi
70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	90	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,65	90	90	90	90	90	89,28	94,23	94,28	94,14	94,14	104,60	104,60	104,60	Sangat Tinggi
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																				
71	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15	55,15	Indeks Pembangunan Pemuda	%	50,17	50,25	50,28	50,3	50,35	50,35	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	98,82	98,82	108,24	Sangat Tinggi
72	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,63	0,65	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,55	0,6	0,61	0,63	0,65	0,65	0,6	0,61	0,37	0,37	0,37	58,73	56,92	56,92	Rendah
	STATISTIK																				
73	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	%	81,76	95,65	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	%	8,21	30,36	45,54	60,72	75,9	75,9	176,26	95,71	85,7	95,65	95,65	116,99	100,00	126,02	Sangat Tinggi
	PERSANDIAN																				
74	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	3	3	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	1	1	2	2	3	3	2,9	3	3	3 (637)	3	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN																				
75	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,82	6,2	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	3,15	4,7	5,9	6,2	6,82	6,82	4,94	5,68	6,2	6,82	6,82	100,00	110,00	100,00	Sangat Tinggi
	PERPUSTAKAAN																				
76	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100	72,5	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	NA	48	64	79	100	100	46,94	61,72	83,56	108,67	108,67	108,67	149,89	108,67	Sangat Tinggi
					Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%	NA	43	64	85	100	100	44	64			64			64,00	Rendah
	KEARSIPAN																				

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
77	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	90	89,82									-	-	91,01	95,07	95,07	105,63	105,85		
	URUSAN PILIHAN																				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
78	Produksi Perikanan	Ton	### ### ###	### ### ##	Produksi Perikanan	Ton	956.601,65	900.646,00	945.678,64	992.962,58	1.042.610,71	1.042.610,71	1.013.951,06	864.706,77	890548,84	#### ###	855.734,92	83,99	83,57	82,08	Tinggi
79	Angka Konsumsi Ikan	kg/ka pita/tahun	38,18	37,07	Angka Konsumsi Ikan	kg/ka pita/tahun	30,65	31,27	32,05	32,85	33,67	33,67	33,71	36,74	38,18	38,83	38,83	101,70	104,75	115,33	Sangat Tinggi
	PARIWISATA																				
80	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,25	3,23	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,19	3,19	3,21	3,23	3,25	3,25	2,99	2,95	3,39	3,57	3,57	109,85	110,53	109,85	Sangat Tinggi
	PERTANIAN																				
81	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6	11,6									-	-	9,94	10,58	10,58	91,21	91,21		
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	Ton	391.752	550.276	572.016	593.756	615.495	2.860.080	1.490.106	1.490.106			1.490.106			52,10	Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan,	Ton	11.536.595	11.629.588	11.716.810	11.804.686	11.893.221	58.587.320	9.581.911	9.692.169,30			9.692.169,30			16,54	Sangat Rendah

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding g T P-2022	Dibanding g T 2023	Dibanding g T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					hortikultura, dan perkebunan (padi)																
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	Ton	173.578	209.232	217.628	226.024	234.420	1.088.141	158.321	174.705,04			174.705,04			16,06	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	Ton	162.964	104.940	107.201	109.512	111.872	536.251	38.537	46.949			46.949			8,76	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	Ton	3.433.420	3.675.002	3.689.702	3.704.460	3.719.278	18.448.802	3.766.962	3.598.263,74			3.598.263,74			19,50	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kelapa)	Ton	148.816	165.069	165.895	166.724	167.558	829.495	168.805	171.926,93			171.926,93			20,73	Sangat Rendah

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi)	Ton	14.216	21.019	21.556	22.093	22.629	107.780	24.065	27.206,39			27.206,39			25,24	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	Ton	2.757.659	2.948.695	2.963.438	2.978.255	2.993.147	14.817.560	2.854.351	235.757,54			235.757,54			1,59	Sangat Rendah
82	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	3,92	4,06								-	-	-	4,31	6,46	6,46				
					Jumlah Produksi Susu	Kg	98.193.892	101.561.631	101.663.192	101.764.855	101.866.620	101.866.620	103.439.376	102.508.639	9379.3157	5,4E+07	54.268.570			53,27	Rendah
					Jumlah Produksi Telur	Kg	311.724.854	315.144.165	315.686.596	320.610.319	325.083.370	325.083.370	335.367.125	328.156.975	3,45E+08	1,8E+08	178.637.895			54,95	Rendah
					Jumlah Produksi Daging	Kg	347.723.159	325.436.369	340.041.606	355.690.105	375.382.386	375.382.386	403.725.408	395.212.501	4,57E+08	1,9E+08	191.087.513			50,90	Rendah
	KEHUTANAN																				
83	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,43	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,47	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	2,68	0,49	0,43	0,42	0,42	97,67	97,67	97,67	Sangat Tinggi
84	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	10.223,65	16.555,86	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	10.222,57	10224,57	10224,57	10224,57	10224,57	100,01	61,76	61,76	Rendah
85	Pertumbuhan PDRB	%	0,47	0,47	Pertumbuhan PDRB	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	4,61	-3,79	4,15	4,15	882,98	882,98	882,98	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Subsektor Kehutanan				Subsektor Kehutanan																
					Indeks Kualitas Tutupn Lahan	%	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	51,13	51,16	51,16	NA	51,16	#DIV/0!	#DIV/0!	76,63	Tinggi
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																				
86	Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan good mining practice (GMP)	%	66,5	67									-	-	80,32	89,79	89,79	135,02	134,01		
					Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%	64,23	65,5	66	66,5	67	67	66,4	66,51			66,51			99,27	Sangat Tinggi
87	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3	2,99	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,06	3,03	3,02	3	2,99	2,99	3,05	3,61	3,67	3,76	3,76	125,33	125,75	125,75	Sangat Tinggi
88	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	1	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,45	1,52	1,52	152,00	152,00	152,00	Sangat Tinggi
89	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	14,85	15,96	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	10,8	11,6	12,94	14,85	15,96	15,96	11,89	13,38	15,76	15,98	15,98	107,61	100,13	100,13	Sangat Tinggi
	PERDAGANGAN																				
90	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	8,2	5,9	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,22	7,32	7,76	8,2	8,64	8,64	-3,8	6,52	4,32	5,9	5,9	71,95	100,00	68,29	Sedang
	PERINDUSTRIAN																				
91	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5,65	5,65	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	4,61	5,1	5,35	5,65	5,85	5,85	-3,74	2,62	3,88	4,35	4,35	76,99	76,99	74,36	Sedang

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TRANSMIGRASI																				
92	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,18	3,6									-	-	5,28	4,96	4,96	155,97	137,78	-	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
	SEKRETARIAT DAERAH																				
93	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	85	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	NA	81	82	83	84	84		83,77	86,51	63,57	63,57	74,79	74,79	75,68	Tinggi
94	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	80	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	NA	81	82	83	84	84		92,05	80,43	76,54	76,54	95,68	95,68	91,12	Sangat Tinggi
95	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	76	78										-	76,92	78,57	78,57	103,38	100,73		
96	Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	95	96										-	100	100	100	105,26	104,17		
97	Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	95	96										-	100	100	100	105,26	104,17		
98	Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	40	45										-	42,86	45	45	112,50	100,00		
99	Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan	%	90	90										-	100	100	100	111,11	111,11		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding g T P-2022	Dibanding g T 2023	Dibanding g T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kerjasama daerah																				
100	Ketercapaian laba BUMD	%	90	75										-	98,17	98,17	98,17	109,08	130,89		
101	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	80	82										-	82,61	84	84	105,00	102,44		
102	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	85	90	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	NA	85	85	85	85	85		85	85	90	90	105,88	100,00	105,88	Sangat Tinggi
103	Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	88	89										-	91,97	93,7	93,7	106,48	105,28		
104	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	85	90	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	NA	63	65	67	70	70		67,22	92,15	92,53	92,53	108,86	102,81	132,19	Sangat Tinggi
105	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	60,98	85,37										-	65,85	90,24	90,24	147,98	105,70		
106	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	83,67	87,76										-	91,83	91,83	91,83	109,75	104,64		
107	Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang	%	75,61	85,37										-	100	100	100	132,26	117,14		
108	Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78	78,5										-	82,22	82,75	82,75	106,09	105,41		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	NA	85	90	93	96	96	85	90			90			93,75	Sangat Tinggi
					Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	NA	87	92	93	94	94	87	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	NA	82	83	84	85	85	99,47	99,14			99,14			116,64	Sangat Tinggi
					Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/ Kota	%	NA	82	83	84	85	85	99	100			100			117,65	Sangat Tinggi
					Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan	%	NA	81	82	83	84	84	85,13	100			100			119,05	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Bantuan Keuangan																
					Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	NA	22	25	28	31	31	36,1	36,1			36,1			116,45	Sangat Tinggi
					Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	NA	64,32	76,48	88,64	100	100	93,22	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	73	78	82	87	92	92	83,67	91,83			91,83			99,82	Sangat Tinggi
					Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	11,4	40	54	70	85	85	30	88,7			88,7			104,35	Sangat Tinggi
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur	%	NA	84	88	92	96	96	70	90			90			93,75	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					dan Sumber Daya Alam																
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	NA	85	85	85	85	85	70	85,71			85,71			100,84	Sangat Tinggi
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	NA	89	90	93	95	95	89	90			90			94,74	Sangat Tinggi
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	NA	85	85	85	85	85	100	85,71			85,71			100,84	Sangat Tinggi
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	NA	84	88	92	96	96	80	87,5			87,5			91,15	Sangat Tinggi
					Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	NA	85	85	85	85	85	80	87,5			87,5			102,94	Sangat Tinggi
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang	%	NA	100	100	100	100	100	100	80			80			80,00	Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Perekonomian yang dievaluasi																
					Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	NA	76	77	78	79	80	77,5	82,75			82,75			103,44	Sangat Tinggi
					Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	NA	75	80	85	90	90	70	80			80			88,89	Tinggi
					Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	NA	85	85	85	85	85	100	100			100			117,65	Sangat Tinggi
					Persentase rekomendasi	%	NA	85	85	85	85	85	100	100			100			117,65	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi																
					Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	NA	76	77	78	79	80	77,5	82,75			82,75			103,44	Sangat Tinggi
	SEKRETARIA T DPRD																				
109	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	88,5	89	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	NA	72	73	74	75	75	88,18	90,28	90,33	91,23	91,23	103,08	102,51	121,64	Sangat Tinggi
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN																				
	PERENCANAAN																				
110	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	%	90	90									-	-	90	90	90	100,00	100,00		
					Persentase hasil kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	NA	90	90	90	90	90	90	90			90			100,00	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Persentase Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	NA	90	90	90	90	90	94,38	90		90	90			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	%	NA	90	90	90	90	90	92,19	90			90			100,00	Sangat Tinggi
	KEUANGAN																				
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	8,61	3,58	Persentase peningkatan pajak daerah	%	NA	10,77	9,25	8,82	8,59	8,59	-0,07	5,2	8,51	3,45	3,45	40,07	96,37	40,16	Sangat Rendah
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	1,06	6,79	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	%	NA	1,73	3,3	5,24	10,37	10,37	0,017	17,06	2,65	8,14	8,14	767,92	119,88	78,50	Tinggi
113	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
114	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70	72,5		%							-	-	77,2	68	68	97,14	93,79		
					Persentase Pemanfaatan Aset	%	60	65	67,5	70	72,5	72,5		72,84	77,2	64,1	64,1	#DIV/0!	#DIV/0!	88,41	Tinggi
	KEPEGAWAIAN																				
115	Persentase distribusi penempatan	%	100	100	Persentase distribusi penempatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PNS dalam Jabatan				PNS dalam Jabatan																
116	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,92	36,26	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35	35,03	35,05	35,06	35,08	35,08	35,42	36,36	38,19	40,33	40,33	112,28	111,22	114,97	Sangat Tinggi
118	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	25	30				15	20	25	30	30	15,66	25,36	50,97	52,53	52,53	210,12	175,10		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
119	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67	71		Nilai				70	74		-	-	71,32	71,32	71,32	106,45	100,45		
120	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4	4,2		Nilai				4	4,2		-	-	4,18	4,23	4,23	105,75	100,71		
	PENGELOLAA N PENGHUBUNG																				
121	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84	85	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	NA	82	83	84	85	85	83	83,06	85	85,75	85,75	102,08	100,88	100,88	Sangat Tinggi
	PENGAWASAN																				
122	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
123	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,18	3,19	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,16	3,11	3,26	3,46	3,46	108,81	108,46	98,86	Sangat Tinggi
	UNSUR PEMERINTAH AN UMUM																				
124	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHA NKAM Bidang Kesatuan	Nilai	2,97	3,15									-	-	3,75	3,45	3,45	116,16	109,52		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Bangsa dan Politik																				
125	Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,12	3,35									-	-	4,1	3,85	3,85	123,40	114,93		
					Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	75	81	83	86	90	90	88,61	90,45			90,45			100,50	Sangat Tinggi
					Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	75	81	83	86	90	90	88,02	90,12			90,12			100,13	Sangat Tinggi
C	ASPEK DAYA SAING																				
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15	Persentase penurunan konflik SARA	%	17,64	15	15	15	15	15	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	102,53	102,53	102,53	Sangat Tinggi
2	Indeks Toleransi	Angka	75,9	76,6	Indeks Toleransi	Angka	73,9	74,48	75,3	75,9	76,6	76,6	72,5	72,64	73,68	73,68	73,68	97,08	96,19	96,19	Sangat Tinggi
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	87	90	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	NA	83	85	87	90	90	84,49	86,23	92,15	92,15	92,15	105,92	102,39	102,39	Sangat Tinggi
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79	80	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,49	77	78	79	80	80	84,93	84,93	80,31	83,13	83,13	105,23	103,91	103,91	Sangat Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86	88	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,36	82	84	86	88	88	83,94	84,53	86,5	87,25	87,25	101,45	99,15	99,15	Sangat Tinggi
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,27	3,33	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,64	2,88	3	3,12	3,24	3,24	4,2	2,74	3,98	3,98	3,98	121,71	119,52	122,84	Sangat Tinggi
7	Nilai SAKIP	Angka	84	85	Nilai SAKIP	Angka	80,18	82	83	84	85	85	81,56	80,25	81,14	81,92	81,92	97,52	96,38	96,38	Sangat Tinggi
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,49	3,5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,43	3,47	3,48	3,49	3,5	3,5	NA	3,72	3,42	3,4	3,4	97,42	97,14	97,14	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satua n	Kondi si Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perenca naan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satua n	Target					202 0	202 1	202 2	202 3		202 0	202 1	202 2	202 3		Dibandin g T P-2022	Dibandin g T 2023	Dibandin g T Akhir RPJMD	
			P- 202 2	P- 202 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Opini BPK	Opini	WT P	WT P	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	WTP *	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	38	39	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	NA	20	23	26	29	29	31,8 4	37,1 6	40,5 5	40,6 8	40,68	107,05	104,31	140,28	Sangat Tinggi
11	Indeks Sistem Merit	Angka	0,72	0,8 2	Indeks Sistem Merit	Angka	0,66	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71	0,7	0,81	0,82	0,83	0,83	115,28	101,22	116,90	Sangat Tinggi
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,5 2	67, 57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,51	66,8 7	67,0 2	67,1 4	67,2 6	67,26	67,6 2	66,2 7	66,8 5	68,5 9	68,59	99,57	101,98	101,98	Sangat Tinggi
13	Indeks Kualitas Air	Angka	50,6	50, 65	Indeks Kualitas Air	Angka	48,47	49,1 7	49,4 7	49,7 7	50,0 7	50,07	55,2 1	47,9 4	48,1 6	51,2 3	51,23	96,77	102,32	102,32	Sangat Tinggi
14	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,9 5	85	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,21	84,7 1	84,9 1	85,0 1	85,1 1	85,11	84,7 3	84,6	85,1 4	86,3 5	86,35	99,25	101,46	101,46	Sangat Tinggi
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,2	51, 25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	66,76	66,7 6	66,7 6	66,7 6	66,7 6	66,76	41,0 3	41,5 1	42,4 5	46,3 4	46,34	63,59	69,41	69,41	Sedang
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulanga n Bencana	Angka	3,56	3,6	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulanga n Bencana	Angka	3,5	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6	3,54	3,55	3,65	3,65	3,65	102,53	101,39	101,39	Sangat Tinggi

Kesimpulan Evaluasi Tahun 2020-2023

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, didapatkan hasil sebagai berikut. Indikator kinerja daerah terdiri dari 194 indikator. Indikator dengan status capaian sangat tinggi sejumlah 151 indikator, capaian dengan status tinggi sejumlah 15 indikator, capaian dengan status sedang sejumlah 6 indikator, capaian dengan status capaian rendah 9 indikator, capaian dengan status sangat rendah sebanyak 13 indikator.

Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya

- Indikator dengan capaian yang sangat tinggi (di atas 100 persen) dan melampaui jauh dari target akhir RPJMD Tahun 2018-2023, agar dicermati kembali dalam penentuan target perencanaan tahap selanjutnya agar penentuan target tidak

bersifat pesimistis agar pencapaian sasaran pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.

- b. Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru sangat berpengaruh pada capaian kinerja suatu program.
- c. Perubahan metode perhitungan indikator dari segi peraturan yang berlaku atau adanya perubahan metode hitung yang diakibatkan dari kondisi dalam suatu indikator menjadi penting untuk ketercapaian target indikator tersebut.

Tabel 2.15.
Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun Sampai Dengan Tahun 2024
Berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,68	45,2	90,98	Sangat Tinggi
2	Angka Kemiskinan	%	8.67-7.28	9,58	101,84	Sangat Tinggi
3	Rasio Gini	Angka	0,36	0,364	98,89	Sangat Tinggi
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.00 - 5.80	4,95	90	Sangat Tinggi
5	Inflasi	%	3.0 ± 1	1,64	145	Sangat Tinggi
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.90 - 4.30	4,78	112,13	Sangat Tinggi
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,68	112,98	104,92	Sangat Tinggi
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,55	73,87	99,09	Sangat Tinggi
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,17	n.a	n.a	n.a
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,23	93	97,75	Sangat Tinggi
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	59	63,9	108,31	Sangat Tinggi
B	Aspek Pelayanan Umum					
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	12,86	97,8	Sangat Tinggi
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,2	8,02	156,83	Sangat Tinggi
	Kesehatan					
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,68	74,91	100,31	Sangat Tinggi
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2	100	Sangat Tinggi
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	85,71	71,42	83,33	Sangat Tinggi
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	90	80	88,89	Sangat Tinggi
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular. penyakit tidak menular. dan kesehatan jiwa	%	86	78,17	90,9	Sangat Tinggi
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	53,49	49,89	93,27	Sangat Tinggi
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87	88,24	101,43	Sangat Tinggi
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	91,64	101,82	Sangat Tinggi
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	91,11	101,23	Sangat Tinggi
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	90	92,03	102,26	Sangat Tinggi
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	98,75	100,77	Sangat Tinggi
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,25	96,9	98,63	Sangat Tinggi
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100	98,88	98,88	Sangat Tinggi
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100	n.a	n.a	n.a
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap5)	%	94,35	91,46	96,94	Sangat Tinggi
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	46,24	47,09	101,84	Sangat Tinggi
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	92,33	84,53	91,55	Sangat Tinggi

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase akses air minum aman	%	44,93	40,86	90,94	Sangat Tinggi
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	12	9,72	81	Sangat Tinggi
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	72,82	49,42	67,87	Tinggi
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	66,29	61,78	84,84	Sangat Tinggi
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	77,56	61,57	92,88	Sangat Tinggi
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%				
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat ⁶⁾	%	42,86	31,76	74,1	Sangat Tinggi
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0,55	20,33	3696,36	Sangat Tinggi
3	Persentase penurunan kawasan kumuh ⁶⁾	%	51,4	36,4	70,82	Tinggi
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	88	84,07	95,53	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,764	0,75	98,17	Sangat Tinggi
	Sosial					
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	1,66	2,46	148,19	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
	Tenaga Kerja					
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,7	29,86	104,04	Sangat Tinggi
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	74,28	68,57	92,31	Sangat Tinggi
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	(Juta Rp)	57	55,47	97,32	Sangat Tinggi
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10,53	13,65	129,63	Sangat Tinggi
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,08	73,66	103,63	Sangat Tinggi

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS bipartit. struktur skala upah. dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	92,09	91,07	98,89	Sangat Tinggi
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,38	81,51	101,41	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	40	100	Sangat Tinggi
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan ⁵⁾	Per 100.000	4,15	4,38	105,54	Sangat Tinggi
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	68	64,34	94,62	Sangat Tinggi
	Pangan					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,1	85,34	102,70	Sangat Tinggi
	Pertanahan					
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,68	52,03	102,66	Sangat Tinggi
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,03	87,73	103,18	Sangat Tinggi
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,33	3,35	100,60	Sangat Tinggi
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37	0,32	86,49	Sangat Tinggi
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4	4	100,00	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	Nilai	0,8	0,75	93,75	Sangat Tinggi

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,11	2,03	96,21	Sangat Tinggi
	Perhubungan					
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,53	6,12	93,72	Sangat Tinggi
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,46	0,4	86,96	Sangat Tinggi
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	14,48	16,1	88,81	Sangat Tinggi
4	On Time Performance layanan transportasi	%	86,88	84,6	97,38	Sangat Tinggi
	Komunikasi dan Informatika					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,77	4,42	117,24	Sangat Tinggi
	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	13,41	10,43	77,78	Sangat Tinggi
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,46	0,94	204,35	Sangat Tinggi
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,74	7,21	93,15	Sangat Tinggi
	Penanaman Modal					
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,5	14,83	329,56	Sangat Tinggi
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	110,41	110,41	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	97,13	105,58	Sangat Tinggi
	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,47	0,41	87,23	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	58,54	58,33	99,64	Sangat Tinggi

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Statistik					
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	100	32	32,00	Sangat Rendah
	Persandian					
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	640	637	99,53	Sangat Tinggi
	Kebudayaan					
1	Angka Melek Budaya	%	55,32	52,61	95,10	Sangat Tinggi
	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	17,5	15,14	86,51	Sangat Tinggi
	Kearsipan					
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	96	96,07	100,07	Sangat Tinggi
	Urusan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan	Ton	2859106,00	968353,8	33,87	Sangat Rendah
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	106	101,4	95,66	Sangat Tinggi
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	112	107,35	95,85	Sangat Tinggi
	Pariwisata					
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,5	9,56	112,47	Sangat Tinggi
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.789.000.000.000	3.630.000000.000	202,91	Sangat Tinggi
	Pertanian					

N o	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,15	1,09	34,60	Sedang
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	101	98,93	97,95	Sangat Tinggi
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,13	0,96	738,46	Sangat Tinggi
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,95	115,29	108,82	Sangat Tinggi
5	NTP Hortikultura	Angka	108,95	117,28	107,65	Sangat Tinggi
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	101,35	118,07	116,50	Sangat Tinggi
	Kehutanan					
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka/%	42,47	48,37	113,89	Sangat Tinggi
2	Luas tutupan lahan	Ha/km2	1022457	1022457	100,00	Sangat Tinggi
	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21,6	18,55	85,88	Sangat Tinggi
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	791,32	802,05	101,36	Sangat Tinggi
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah ⁸⁾	Angka	3,65	3,65	100,00	Sangat Tinggi
4	Persentase penerapan Good Mining Practice ⁹⁾	%	62	63,37	102,21	Sangat Tinggi
	Perdagangan					
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,36	4,05	75,56	Sangat Tinggi
	Perindustrian					
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,75	3,89	103,73	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah					
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	38,1	39,93	104,80	Sangat Tinggi
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	86,3	107,88	Sangat Tinggi
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	96,83	107,59	Sangat Tinggi
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,72	104,13	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD					
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	92	91,68	99,65	Sangat Tinggi
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	77	76,87	99,83	Sangat Tinggi
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	77	75	97,40	Sangat Tinggi
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Perencanaan					
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Keuangan					
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-3,38	13,53	400,30	Sangat Rendah
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-3,47	23,72	683,57	Sangat Rendah
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	98	97,75	99,74	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	95,69	84,02	87,80	Sangat Tinggi
	Kepegawaian					
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,87	0,86	98,85	Sangat Tinggi
	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,1	3,29	106,13	Sangat Tinggi
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	26,1	65,09	249,39	Sangat Tinggi
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Penelitian dan Pengembangan					
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	74	72,85	98,45	Sangat Tinggi
	Pengelolaan Penghubung					
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85	86	101,18	Sangat Tinggi
	Unsur Pengawasan Pemerintahan					
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi
	Unsur Pemerintahan Umum					
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,07	3,03	98,70	Sangat Tinggi
C	Aspek Daya Saing					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,57	69,46	102,80	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4	8,64	216,00	Sangat Tinggi
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,5	85,36	103,47	Sangat Tinggi

Kesimpulan Evaluasi

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, didapatkan hasil sebagai berikut. Indikator kinerja daerah terdiri dari 126 indikator. Indikator dengan status capaian sangat tinggi sejumlah 115 indikator, capaian dengan status tinggi sejumlah 6 indikator, capaian dengan status sedang sejumlah 2 indikator, capaian dengan status sangat rendah sebanyak 1 indikator, serta 2 indikator belum tersedia datanya (n/a).

Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya

- a. Indikator dengan capaian yang sangat tinggi (di atas 100 persen) dan melampaui jauh dari target RPD Tahun 2024-2026, agar dicermati kembali dalam penentuan target perencanaan tahap selanjutnya agar penentuan target tidak bersifat pesimistis agar pencapaian sasaran pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Ada 2 indikator yang ditargetkan dalam RPD yang sifatnya negatif yaitu indikator persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain, agar direformulasi ulang penentuan targetnya. Untuk perencanaan ke depan hendaknya tidak menentuka kinerja yang sifatnya negatif dikarenakan hal ini menunjukkan tidak ada peningkatan kinerja, dan justru memproyeksikan kinerja yang menurun.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya menyejahterakan masyarakat memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan di masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan keuangan daerah diharapkan sumber daya ekonomi milik daerah dapat digunakan secara tepat dan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka kerangka pendanaan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 – 2030 disusun berdasarkan pada analisis kapasitas fiskal daerah dan kinerja keuangan daerah tahun 2020-2024.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Otonomi fiskal daerah diukur melalui seberapa besar peran PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka otonomi fiskal daerah semakin besar. Pada periode tahun 2020-2022 nilai otonomi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 dan 2024 otonomi fiskal daerah menurun dikarenakan kenaikan PAD lebih kecil dari pendapatan transfer.

Tabel 2.16.

Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan Total (Rp .000)	Pendapatan Asli Daerah (Rp .000)	Otonomi Fiskal Daerah (%)
2020	25.393.735.934	13.668.282.278	53,83
2021	26.632.999.865	14.695.474.898	55,18
2022	24.167.935.634	16.264.618.853	67,30
2023	25.369.733.556	17.012.509.421	67,06
2024*)	26.378.719.626	17.650.936.913	66,91

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024; *) Unaudited

Selain otonomi fiskal daerah, kesehatan keuangan daerah juga tercermin dari **rasio kemampuan mendanai belanja daerah**. Rasio ini membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada periode tahun 2020-2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023-2024 dikarenakan penggunaan sisa kas BLUD pada periode sebelumnya untuk mendanai pembangunan guna mengembangkan pelayanan.

Tabel 2.17.
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp.000)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.000)	Total Penerimaan (Rp.000)	Total Belanja (Rp.000)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.000)	Total Pengeluaran (Rp.000)	Rasio
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4/7
2020	25.393.735.934	1.119.348.228	26.513.084.162	25.651.740.349	0	25.651.740.349	1,03
2021	26.632.999.865	861.492.992	27.494.492.857	25.843.800.193	215.000.000	26.058.800.193	1,06
2022	24.167.935.634	1.909.773.865	26.077.709.499	23.950.240.497	891.000.000	24.841.240.497	1,05
2023	25.369.733.556	1.330.794.071	26.700.527.627	25.800.341.207	0	25.800.341.207	1,03
2024*)	26.378.719.626	1.406.058.065	27.784.777.691	27.187.126.497	20.700.000	27.207.826.497	1,02

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020–2024*) Unaudited.

Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh 2 komponen besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal ini tercermin dari perkembangan komponen pendapatan selama rentang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami kontraksi 1,8 persen dari 25,859 triliun rupiah menjadi 25,393 triliun rupiah karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh 4,88 persen pada tahun 2021 menjadi 26,633 triliun rupiah. Tahun 2022 pendapatan daerah tumbuh negatif sebesar 9,26 persen menjadi 24,168 triliun rupiah karena adanya perubahan pada kebijakan pendapatan transfer. Pada tahun 2023 pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 4,97 persen menjadi 25,369 triliun rupiah. Pendapatan daerah pada tahun 2024 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 1,008 triliun rupiah atau 3,98 persen.

Belanja Daerah merupakan segala penggunaan sumber dana (*use of fund*) dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,63 persen. Penurunan hanya terjadi pada pos belanja tidak terduga setelah tahun 2020 karena penggunaan penanganan Pandemi Covid-19 dan belanja hibah mulai tahun 2022 karena adanya penyesuaian kebijakan pendapatan transfer atas DAK non fisik pendidikan untuk satuan pendidikan dasar.

Belanja dengan proporsi terbesar masih didominasi oleh belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rata-rata mencapai 60,33 persen dan nilai rata-rata pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 15,49 triliun rupiah per tahun. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dari belanja operasi dengan proporsi rata-rata mencapai 40,60 persen dari seluruh belanja operasi. Namun demikian, belanja pegawai masih di bawah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan APBD yang mengatur bahwa belanja pegawai setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja yaitu sebesar 24,49 persen per tahun. Komponen terbesar kedua dari belanja operasi adalah belanja barang dan jasa dengan proporsi rata-rata mencapai 34,66 persen dan belanja hibah yang mencapai 24,27 persen.

Proporsi rata-rata belanja transfer mencapai 32,22 persen per tahun. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan bagian terbesar dari belanja transfer yang jumlahnya rata-rata mencapai 8,2 triliun rupiah per tahun.

Belanja Modal cenderung stabil di angka rata-rata 5,98 persen. Belanja ini difokuskan pada pemeliharaan, peremajaan dan penambahan aset tetap yang digunakan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat. Penggunaan belanja modal paling besar pada belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai rata-rata 689,57 miliar rupiah per tahun, kemudian diikuti belanja modal gedung dan bangunan sebesar 364,78 miliar rupiah per tahun dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 344,40 miliar rupiah per tahun.

Selain itu, terdapat pos Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengeluaran anggaran yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Proporsi belanja ini cenderung turun karena *baseline* awal pada tahun 2020 digunakan sebagai penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Belanja Pegawai mendominasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya pengalihan kewenangan Satdikmen dan Satdiksus (SMA, SMK, dan SLB) ke pemerintah provinsi sehingga jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertambah secara signifikan. Pada tahun 2020 belanja difokuskan untuk penanganan Covid-19 melalui belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana serta penanganan dampak Covid-19 yang meliputi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Pada tahun 2021 peningkatan pada belanja hibah dan bantuan keuangan kabupaten/kota yang digunakan untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja yang berada diluar kewenangan Pemerintah Provinsi utamanya pada pemberian bantuan pendidikan dan bantuan sarana prasarana infrastruktur. Kondisi belanja daerah tahun 2022 dapat terserap secara optimal dengan realisasi serapan mencapai 95,14 persen. Kendala pada pelaksanaan APBD 2022 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dilaksanakan. Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan antara lain Belanja Pegawai dengan mulai dibayarkannya Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa karena adanya pelanggaran kegiatan masyarakat serta Belanja Subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dikarenakan pengadaan lahan yang belum terlaksana karena persyaratan (*readiness criteria*) yang belum lengkap. Selain itu pada Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan dampak inflasi tidak dapat dicairkan.

Belanja daerah tahun 2023 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 93,85 persen, namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring mulai dibayarkannya Gaji PPPK (Pendidikan dan Kesehatan) dan kenaikan tambahan penghasilan ASN, kegiatan dalam Belanja Barang dan Jasa dapat berjalan maksimal karena aktivitas masyarakat sudah mulai normal, meningkatnya Belanja Subsidi yang diarahkan pada penanganan inflasi melalui stabilisasi harga, dan penyegaran aset tetap sehingga Belanja Modal mengalami kenaikan. Sedangkan realisasi belanja yang kurang optimal dikarenakan sisa hasil pengadaan seperti sisa pengadaan tanah.

Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar 95,16 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja

barang dan jasa dari realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Selain itu belum optimalnya realisasi belanja dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Pembiayaan Daerah lebih difokuskan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun sebelumnya serta pencadangan untuk kegiatan Pilkada. Penyertaan modal dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan usaha BUMD serta penyehatan. Sedangkan penerimaan pembiayaan merupakan divestasi atas salah satu kepemilikan BUMD tahun 2022 serta pengembalian piutang atas program dana bergulir.

Dari sisi pengeluaran, pembentukan dana cadangan mulai dilakukan tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Dalam kurun waktu 2020–2024 penyertaan modal dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2020 tidak dilakukan karena situasi pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 penyertaan modal yang dialokasikan untuk penyehatan BUMD tidak dapat direalisasikan karena perubahan Perda penyehatan BUMD belum selesai. Secara umum penyertaan modal dilakukan dalam rangka pengembangan usaha serta penugasan untuk mendukung program pemerintah kepada BUMD.

Tabel 2.18.

Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024 ^{a)}
PENDAPATAN DAERAH	25.393.735.934	26.633.000.085	24.167.935.634	25.369.733.556	26.378.719.626
PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.668.282.278	14.695.474.898	16.264.618.853	17.012.509.421	17.650.936.913
Pajak Daerah	11.139.173.309	11.718.378.320	13.484.851.151	13.976.642.716	14.210.241.533
Retribusi Daerah	93.279.121	91.634.269	115.158.014	139.377.038	2.318.821.514
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	530.091.029	508.263.876	546.717.104	638.482.406	687.813.166
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.905.738.818	2.377.198.431	2.117.892.583	2.258.007.259	434.060.698
PENDAPATAN TRANSFER	11.702.101.655	11.871.796.116	7.810.882.578	8.278.928.086	8.701.438.866
Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119	768.488.755	626.671.963	601.686.290	570.985.609
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016	267.356.655	302.028.750	331.425.232	325.246.959
Dana Alokasi Umum	3.438.709.973	3.432.978.859	3.435.718.090	3.558.428.755	3.819.010.791
Dana Alokasi Khusus (fisik)	350.564.240	401.885.567	371.734.785	404.100.292	473.940.472
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.983.232.690	6.932.375.674	3.013.508.989	3.296.089.570	3.474.257.466
Dana Insentif Daerah	68.212.455	68.710.605	61.352.500	87.197.945	37.997.568
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.102.159	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.352.000	65.728.851	92.434.201	78.296.049	26.343.846
Pendapatan Hibah	23.352.000	64.882.003	92.161.740	77.972.123	25.600.169
Lain lain pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	846.848	272.461	323.925	743.676
Jumlah Pendapatan	25.393.735.934	26.633.000.085	24.167.935.634	25.369.733.556	26.378.719.626
BELANJA DAERAH	25.651.740.349	25.843.800.193	23.950.240.497	25.800.341.207	27.187.126.497
BELANJA OPERASI	16.223.988.285	16.826.577.831	13.456.887.671	14.887.780.012	16.083.865.301

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024 ^{*)}
Belanja Pegawai	6.483.761.623	5.685.925.255	5.902.903.886	6.362.326.855	7.023.084.524
Belanja Barang dan Jasa	4.104.637.788	5.345.399.454	5.377.369.153	5.791.112.760	6.234.228.358
Belanja Subsidi	-	90.482	4.958.884	5.350.753	1.399.999
Belanja Hibah	5.593.181.623	5.728.982.384	2.092.761.564	2.610.303.175	2.780.143.423
Belanja Bantuan Sosial	42.407.250	66.180.255	78.894.181	118.686.467	45.008.996
BELANJA MODAL	996.994.505	1.447.620.411	1.713.641.630	1.794.862.778	1.733.084.096
Belanja Modal Tanah	14.338.900	79.135.275	17.346.322	67.791.905	12.221.207
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.933.371	578.353.949	767.027.589	751.571.586	855.982.713
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.773.603	330.679.148	359.726.308	526.682.150	411.044.257
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.713.123	351.328.654	475.441.543	351.052.937	366.478.924
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.376.388	108.123.383	94.099.866	97.389.078	86.434.858
Belanja Modal Aset Lainnya	859.119	-	-	375.119	922.135
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
Belanja Tidak Terduga	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
BELANJA TRANSFER	6.646.872.581	7.497.298.646	8.763.165.716	9.116.958.416	9.359.951.298
Belanja Bagi Hasil	4.633.245.749	5.735.553.033	6.085.808.822	6.264.046.226	6.334.544.870
Belanja Bantuan Keuangan	2.013.626.831	1.761.745.612	2.677.356.893	2.852.912.190	3.025.406.428
Jumlah Belanja	25.651.740.349	25.843.800.193	23.950.240.497	25.800.341.207	27.187.126.497
Defisit	(1.119.348.228)	(646.492.992)	(1.018.773.865)	(1.330.794.071)	(1.385.358.065)
PEMBIAYAAN	1.119.348.228	646.492.992	1.018.773.865	1.330.794.071	1.385.358.065

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024*)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.119.348.228	861.492.992	1.909.773.865	1.330.794.071	1.406.058.065
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.119.095.687	861.376.784	1.435.692.146	1.236.470.622	900.123.938
Pencairan dana Cadangan	-	-	-	94.130.600	505.869.400
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	252.540	116.207	474.081.719	192.848	64.727
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	215.000.000	891.000.000	-	20.700.000
Pembentukan dana cadangan	-	200.000.000	400.000.000	-	-
Penyertaan modal	-	15.000.000	491.000.000	-	20.700.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan	1.119.348.228	646.492.992	1.018.773.865	1.330.794.071	1.385.358.065

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 (audited), *) unaudited

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu. Laporan neraca akan memberikan informasi penting kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya), didalamnya adalah jenis akun riil dimana hasil operasional pada periode tersebut akan berpengaruh terhadap nilai neraca seperti besarnya aset, kewajiban yang harus dibayar dan ekuitas yang dimiliki.

Aset merupakan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik ekonomi maupun sosial. Aset Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang pada kepemilikan saham BUMD/BUMN dan Aset Lancar. Penambahan Aset Tetap di Pemerintah Daerah lebih difokuskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap Masyarakat, meskipun ada sebagian kecil yang sedang *idle* dan belum digunakan sehingga masuk ke dalam Properti Investasi. Aset lancar merupakan aset yang paling likuid, namun pada pos ini didominasi oleh Piutang atas Pajak Daerah sehingga kemampuan atas penagihan serta tingkat keterbayaran piutang ini akan berdampak pada perhitungan rasio yang berdasarkan pada Aset Lancar.

Kewajiban daerah lebih didominasi oleh hutang barang jasa di Rumah Sakit Daerah (BLUD) berupa obat dan habis pakai lainnya. Semuanya merupakan kewajiban jangka pendek yang akan dibayar/dilunasi pada tahun anggaran setelahnya. Pada tahun 2024 terdapat perubahan kebijakan atas pengakuan hutang belanja bagi hasil yang menyebabkan menurunnya nilai kewajiban.

Aset lancar mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun setelahnya mulai turun dan kembali naik pada tahun 2024. Komponen yang selalu tumbuh positif adalah piutang pajak daerah dengan kenaikan rata-rata 211 juta rupiah, namun demikian penurunan kas dan setara kas terjadi sejak tahun 2021 dengan rata-rata 289 juta rupiah yang dikarenakan semakin optimalnya realisasi belanja dan ketidaktercapaian beberapa target pendapatan serta semakin optimalnya penggunaan persediaan dengan rata-rata 65 juta menyebabkan penurunan aset lancar pada periode tahun 2022 – 2023.

Pada pos investasi jangka panjang, penurunan terjadi pada tahun 2022 karena adanya divestasi dari salah satu BUMD serta penurunan saham kepemilikan di PT KIW karena setoran modal pemerintah pusat ke PT KIW. Seperti halnya pos investasi jangka panjang, aset tetap juga mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan terjadi pada aset tanah yang berkurang karena pemindahan pengakuan pada aset ekstrakompable serta beberapa konstruksi dalam pengerjaan yang diajukan proses penghapusan.

Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Besaran Dana Cadangan sesuai

Peraturan Daerah dimaksud sebesar Rp900 miliar yang dipenuhi dalam 3 (tiga) tahun anggaran, sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023.

Aset lainnya didominasi oleh aset dalam kondisi rusak berat dan diajukan proses penghapusan serta aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Fluktuasi yang terjadi dipengaruhi oleh banyaknya posisi aset tetap dalam kondisi rusak berat dan diajukan proses penghapusan.

Tabel 2.19.
Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

URAIAN	Jumlah (Rp. 000)				
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 *)
ASET	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.263.950.336
ASET LANCAR	3.316.755.368	3.791.840.781	3.561.496.934	3.418.108.280	3.428.944.852
Kas dan Setara Kas	864.937.343	1.436.740.557	1.237.681.108	907.267.200	586.944.691
Piutang Pajak Daerah	2.050.129.305	2.116.395.701	2.212.266.408	2.625.886.012	2.897.664.180
Piutang Retribusi Daerah	977.885	1.188.953	265.512	86.035	112.402.051
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	157.475.313	344.393.176	58.532.786	31.181.471	1.832.728
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	128.148.979	-	14.764.276	4.254	53.079.604
Piutang Lainnya	16.031.691	15.717.526	15.599.471	15.406.623	15.157.041
Penyisihan Piutang	-418.683.863	-642.081.528	-380.010.526	-517.709.600	-560.162.238
Beban Dibayar Dimuka	6.144.929	5.756.838	5.301.065	5.799.321	5.086.493
Persediaan	511.593.784	513.729.554	397.096.831	350.191.210	316.940.300
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
Investasi Jangka Panjang Permanen	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
ASET TETAP	25.972.626.841	26.362.173.533	26.085.962.628	26.589.416.803	26.619.229.838
Tanah	13.483.227.890	13.583.627.731	13.198.047.275	13.069.880.522	12.336.126.251
Peralatan dan Mesin	6.808.241.676	7.529.773.129	8.329.364.755	9.123.265.698	9.525.780.130
Gedung dan Bangunan	7.563.815.353	7.920.921.189	8.861.709.983	9.491.863.080	9.848.426.199
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.192.168.636	10.585.831.733	11.173.745.673	11.586.304.551	12.507.048.034
Aset Tetap Lainnya	1.365.494.887	1.472.453.852	976.375.566	1.053.571.666	1.056.329.724
Konstruksi dalam Pengerjaan	737.058.609	788.310.129	242.550.742	245.302.753	287.616.819
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-14.177.380.211	-15.518.744.231	-16.695.831.367	-17.980.771.469	-18.942.097.320
DANA CADANGAN	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
Dana Cadangan	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
ASET LAINNYA	1.508.575.287	1.483.022.752	2.669.623.055	2.659.378.989	2.246.405.588

URAIAN	Jumlah (Rp. 000)				
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 *)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	96.104.229	74.906.991	107.001.525	100.429.933	90.240.903
Aset Tak Berwujud	7.656.505	28.936.052	36.540.063	39.808.975	45.259.342
Aset Lain-lain	1.404.814.552	1.756.554.545	2.898.167.680	2.955.683.663	3.175.397.178
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-21.190.441	-25.209.487	-30.065.845	-36.070.409
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-356.184.395	-450.364.793	-504.977.410	-1.037.802.604
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	53.958	85.412
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	103.488.065	98.445.714	9.295.765
PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	40.353.631
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	36.609.433
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	8.112.167
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-4.367.970
KEWAJIBAN	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	142.115.898
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	142.115.898
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	249.993	281.977	323.256	204.401	26.390
Pendapatan Dibayar Dimuka	37.083.532	39.251.892	38.988.175	44.550.351	34.750.163
Utang Belanja	199.503.881	339.312.280	287.498.121	380.841.449	91.880.646
Utang Jangka Pendek Lainnya	587.826.391	4.423.919	11.890.395	5.734.786	15.458.698
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
EKUITAS	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	40.121.834.437
Ekuitas	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	40.121.834.437
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.263.950.336

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024; *) Unaudited

Analisis likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). *Current ratio* dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah dengan kewajiban lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang menggunakan aset lancarnya. Aset lancar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagian besar adalah piutang daerah dengan kewajiban yang tercatat yang merupakan kewajiban pada rumah sakit daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kemampuan keuangan Provinsi Jawa Tengah memenuhi kewajiban jangka pendek cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 *current ratio* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 4,02 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 9,89 dan tahun 2022 mencapai 10,52. Namun demikian rasio tersebut pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,92. Rasio ini kembali mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2024 menjadi 24,13. Kenaikan signifikan pada tahun 2024 dikarenakan perubahan metode pencatatan. Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke kabupaten dan kota sebelum tahun 2024 dicatatkan sebagai Utang Belanja Bagi Hasil, namun sejak tahun 2024 tidak masuk pos Utang sehingga mengurangi Kewajiban Lancar secara signifikan.

Tabel 2.20.
Current Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.000)	Kewajiban Lancar (Rp.000)	Current Ratio
2020	3.316.755.368	824.663.799	4,02
2021	3.791.840.781	383.270.068	9,89
2022	3.561.496.934	338.699.949	10,52
2023	3.418.108.280	431.330.988	7,92
2024 *)	3.428.944.852	142.115.898	24,13

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024; *) Unaudited.

Rasio Kas (*cash ratio*) dihitung dengan membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Pada rasio ini kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020 - 2024 mengalami fluktuasi. Mengalami kenaikan dari 1,05 pada tahun 2020 menjadi 3,75 pada tahun 2021, rasio kas kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 3,65 dan pada tahun 2023 sebesar 2,10. *Cash ratio* kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,13. Perlu dicatat bahwa Kewajiban Lancar pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan karena tidak lagi mencatatkan Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke kabupaten dan kota sebagai Utang Belanja Bagi Hasil.

Tabel 2.21.
Cash Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Cash Ratio
2020	864.937.343	824.663.799	1,05
2021	1.436.740.557	383.270.068	3,75
2022	1.237.681.108	338.699.949	3,65
2023	907.267.200	431.330.988	2,1
2024 *)	586.944.691	142.115.898	4,13

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024; *) Unaudited.*

Selain itu Rasio Lancar (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang telah dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rasio Lancar mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang jangka pendek dari aset lancar selain persediaan. Perlu diketahui bahwa aset lancar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh piutang daerah, sehingga rasio ini dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merealisasikan piutang menjadi kas.

Perhitungan Rasio Lancar menunjukkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada periode 2020 hingga 2022 namun menurun pada tahun 2023. *Quick ratio* pada tahun 2020 sebesar 3,4 terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 8,6 dan tahun 2022 menjadi 9,3. Rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 7,1 namun meningkat signifikan menjadi 21,9 pada tahun 2024. Kenaikan signifikan tersebut juga disebabkan tidak lagi dicatatnya Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke kabupaten dan kota sebagai Utang Belanja Bagi Hasil pada tahun 2024.

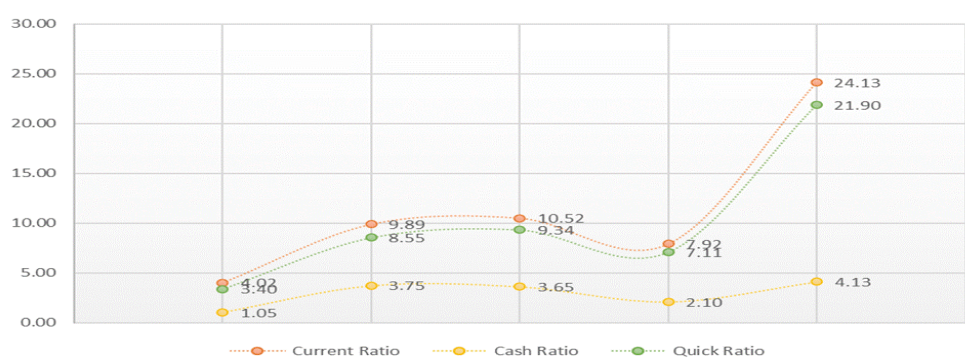
Tabel 2.22.
Quick Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Aktiva lancar (Rp.000)	Persediaan (Rp.000)	Kewajiban Lancar (Rp. 000)	Quick Ratio
2020	3.316.755.368.542,00	511.593.784.744,00	824.663.799.218,00	3,4
2021	3.791.840.781.045,00	513.729.554.970,00	383.270.068.724,00	8,6
2022	3.561.496.934.500,47	397.096.831.700,58	338.699.949.467,91	9,3
2023	3.418.108.280.043,60	350.191.210.978,03	431.330.988.794,15	7,1
2024 *)	3.428.944.852.375,31	316.940.300.179,29	142.115.898.676,98	21,9

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024; *) Unaudited*

Ketiga rasio baik *current ratio*, *cash ratio*, maupun *quick ratio* menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. *Current ratio* dan *quick ratio* meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 kemudian menurun pada tahun 2023 dan meningkat signifikan pada tahun 2024, sedangkan fluktuasi *cash ratio* cenderung landai dengan kenaikan terjadi pada tahun 2021 dan 2024. Kenaikan signifikan rasio pada tahun 2024

lebih disebabkan penurunan pos utang karena pada perubahan metode pencatatan. Pada tahun 2024 Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer kepada Kabupaten dan Kota tidak lagi dicatat sebagai Utang Belanja Bagi Hasil.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024

Gambar 2.54.

Perbandingan Rasio Likuiditas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Analisis likuiditas tersebut menunjukkan bahwa likuiditas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam upaya memenuhi kewajiban lancar menunjukkan peningkatan pasca tahun pandemi namun kembali menurun pada tahun 2023 dan meningkat kembali pada tahun 2024. Semakin tingginya tingkat likuiditas menunjukkan semakin kecil unsur utang sehingga semakin meningkatnya kemandirian daerah karena tidak terbebani nya daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau utang.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan nilai aset digunakan sebagai alternatif pelunasan hutang apabila terjadi gagal bayar. Oleh karena itu semakin besarnya nilai rasio ini menunjukkan maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan.

Tabel 2.23.

Rasio Solvabilitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total Aktiva (Rp.000)	Total Kewajiban (Rp.000)	Rasio Solvabilitas
2020	37.222.304.291	824.663.799	45,14
2021	39.291.945.337	383.270.068	102,52
2022	40.276.338.752	338.699.949	118,91
2023	40.934.354.196	431.330.988	94,9
2024 *)	40.263.950.336	142.115.898	283,32

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024; *) Unaudited.

Rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020 hingga 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari 45,14 menjadi 118,91. Namun demikian pada tahun 2023 rasio ini mengalami penurunan menjadi 94,90. Penurunan rasio ini karena terjadi peningkatan signifikan pada kewajiban namun tidak diikuti dengan aktiva. Namun demikian pada tahun 2024 rasio solvabilitas mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 283,32. Namun demikian melonjaknya rasio solvabilitas pada tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan kewajiban secara drastis karena tidak lagi mencatatkan Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke kabupaten dan kota sebagai Utang Belanja Bagi Hasil.

Rasio Utang (*leverage*) digunakan untuk mengetahui bagaimana beban risiko utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu rasio utang terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio/DER*). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over-leveraged*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar.

Rasio Utang ini sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio utang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun pada periode 2020 – 2024. Rasio *leverage* sempat mencapai 0,023 pada tahun 2020 namun terus menurun pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 0,008. Rasio ini sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,011 namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,004. Penurunan Total Kewajiban pada tahun 2024 disebabkan Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke kabupaten dan kota sebelum tahun 2024 dicatatkan sebagai Utang Belanja Bagi Hasil, namun sejak tahun 2024 tidak lagi diperhitungkan sebagai Utang.

Tabel 2.24.

***Debt to Equity Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

Tahun	Total Kewajiban (Rp.000)	Total Ekuitas (Rp.000)	Rasio <i>Leverage</i>
2020	824.663.799	36.397.640.492	0,023
2021	383.270.068	38.908.675.268	0,01
2022	338.699.949	39.937.638.803	0,008
2023	431.330.988	40.503.023.207	0,011
2024 *)	142.115.898	40.121.834.437	0,004

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2020 – 2024; *) Unaudited

2.2.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Pendapatan Daerah tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, capaian kinerja tahun 2020-2024 dan penetapan tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar masih ditopang dari sektor pajak daerah diproyeksikan dengan berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2024, tren realisasi penerimaan 10 tahun terakhir dan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Dengan seiring optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional maka pada tahun 2026 pajak daerah kembali diproyeksikan meningkat.

Proyeksi Pendapatan Transfer dihitung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta dengan mempertimbangkan pada tren realisasi pendapatan dan tren alokasi dana transfer mulai dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.25.
Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030

URAIAN	Baseline Tahun 2024*) (Rp.000)	JUMLAH (Rp. 000)				
		TAHUN 2026**	TAHUN 2027**	TAHUN 2028**	TAHUN 2029**	TAHUN 2030**
PENDAPATAN DAERAH	26.378.719.626	24.514.909.659	25.643.730.674	26.871.698.552	28.127.189.204	29.405.882.177
PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.650.936.913	16.112.398.370	17.129.686.550	18.242.821.585	19.380.071.300	20.537.003.178
1 Pajak Daerah	14.210.241.533	12.899.838.185	13.709.894.727	14.571.721.831	15.486.898.222	16.457.344.657
2 Retribusi Daerah	2.318.821.514	2.174.496.850	2.282.062.424	2.394.228.940	2.510.678.746	2.631.981.622
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	687.813.166	701.832.870	782.124.872	916.702.165	1.032.760.032	1.094.628.383
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	434.060.698	336.230.465	355.604.527	360.168.649	349.734.300	353.048.516
PENDAPATAN TRANSFER	8.701.438.866	8.376.911.119	8.488.443.954	8.603.276.797	8.721.517.734	8.843.278.829
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.701.438.866	8.376.911.119	8.488.443.954	8.603.276.797	8.721.517.734	8.843.278.829
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.343.846	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170
JUMLAH PENDAPATAN	26.378.719.626	24.514.909.659	25.643.730.674	26.871.698.552	28.127.189.204	29.405.882.177

Sumber: * Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024, Unaudited

** Hasil Pra Rakor Pendapatan Tahun 2025

Guna pencapaian target PAD tahun 2026-2030 dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem;
- c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- g. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- h. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan perangkat daerah, serta mengembangkan potensi usaha;
- i. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah; serta
- j. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain komponen PAD, pembangunan Jawa Tengah juga ditopang oleh komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD). Komponen TKD tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa arahan untuk pemanfaatan APBD sejalan dengan arahan dan kebijakan atas belanja pusat. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak pada belanja kementerian/lembaga termasuk yang dilaksanakan di daerah sesuai kewenangannya. Kriteria pembatasan dan efisiensi belanja pada tahun 2025 tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pula pada pola belanja tahun berikutnya. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi proyeksi belanja pada tahun 2026-2030.

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026-2030 utamanya diarahkan pada pencapaian tujuan daerah untuk mewujudkan “Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan”. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan fokus utama pada:

1. Pencapaian sasaran daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis;
 - b. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter;
2. Antisipasi terhadap dampak tantangan dinamika geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global, serta kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun nonalam;
3. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
4. Sinergi pembangunan antarwilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sebagaimana arah kebijakan belanja daerah tersebut diatas, maka struktur belanja daerah Jawa Tengah tahun 2026-2030 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, partai politik, instansi vertikal dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk yang sifatnya *multi years* (tahun jamak);
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) meliputi:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;

- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 2.26.
Proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030

URAIAN	Baseline Tahun 2024*) (Rp.000)	JUMLAH (Rp. 000)				
		TAHUN 2026**	TAHUN 2027**	TAHUN 2028**	TAHUN 2029**	TAHUN 2030**
BELANJA DAERAH	27.187.126.497	24.514.909.659	25.243.730.674	26.471.698.552	28.207.189.204	30.125.882.177
BELANJA OPERASI	16.083.865.301	15.831.419.433	15.157.921.007	15.952.371.597	17.220.358.791	18.111.578.381
Belanja Pegawai	7.023.084.524	7.978.989.564	7.960.989.910	7.918.519.348	7.891.599.802	7.867.182.491
Belanja Barang dan Jasa	6.234.228.358	6.063.576.691	5.392.938.549	6.179.873.363	7.019.376.948	7.658.973.035
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	1.399.999	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.557
Belanja Hibah	2.780.143.423	1.747.253.178	1.760.292.548	1.808.156.386	2.261.413.416	2.535.083.298
Belanja Bantuan Sosial	45.008.996	32.600.000	34.250.000	35.900.000	37.550.000	39.400.000
BELANJA MODAL	1.733.084.096	1.052.221.998	2.106.200.000	2.162.776.000	2.222.356.500	2.743.342.500
Belanja Modal Tanah	12.221.207					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	855.982.713					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	411.044.257					
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.664.789.244					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86.434.858					
Belanja Modal Aset Lainnya	922.135					
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.225.800	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.225.800	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
BELANJA TRANSFER	9.359.951.298	7.606.268.228	7.954.609.667	8.331.550.955	8.739.473.913	9.245.961.296
Belanja Bagi Hasil	6.334.544.870	4.400.368.228	4.748.709.667	5.125.650.955	5.533.573.913	5.975.061.296
Belanja Bantuan Keuangan	3.025.406.428	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.270.900.000
JUMLAH BELANJA	27.187.126.497	24.514.909.659	25.243.730.674	26.471.698.552	28.207.189.204	30.125.882.177

Sumber: * Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng 2024 Unaudited.

** TAPD Provinsi Jawa Tengah 2025, berdasarkan hasil Pra Rakor Pendapatan 2025.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD 2025-2029 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan Pilkada di tahun 2029 dan 2030. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada sampai dengan tahun 2028 dan penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.27.

Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030

URAIAN	Baseline Tahun 2024*) (Rp.000)	JUMLAH (Rp.000)				
		TAHUN 2026**	TAHUN 2027**	TAHUN 2028**	TAHUN 2029**	TAHUN 2030**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.406.058.065	100.000.000	100.000.000	100.000.000	180.000.000	820.000.000
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.123.938	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2 Pencairan dana cadangan	505.869.400	-	-	-	80.000.000	720.000.000
3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	64.727	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.700.000	100.000.000	500.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1 Pembentukan dana cadangan	-	-	400.000.000	400.000.000	-	-
2 Penyertaan modal	20.700.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	1.385.358.065	-	-400.000.000	-400.000.000	80.000.000	720.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	576.951.194	-	-	-	-	-

Sumber: * Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng 2024 Unaudited.

** TAPD Provinsi Jawa Tengah 2025, berdasarkan hasil Pra Rakor Pendapatan 2025.

Dari uraian tersebut diatas maka **kerangka pendanaan** untuk pembangunan daerah tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.28.

Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030

URAIAN	JUMLAH (Rp. 000)				
	TAHUN 2026*	TAHUN 2027*	TAHUN 2028*	TAHUN 2029*	TAHUN 2030*
PENDAPATAN	24.514.909.659	25.643.730.674	26.871.698.552	28.127.189.204	29.405.882.177
PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.112.398.370	17.129.686.550	18.242.821.585	19.380.071.300	20.537.003.178
Pajak daerah	12.899.838.185	13.709.894.727	14.571.721.831	15.486.898.222	16.457.344.657
Retribusi daerah	2.174.496.850	2.282.062.424	2.394.228.940	2.510.678.746	2.631.981.622
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	701.832.870	782.124.872	916.702.165	1.032.760.032	1.094.628.383
Lain-lain PAD yang sah	336.230.465	355.604.527	360.168.649	349.734.300	353.048.516
PENDAPATAN TRANSFER	8.376.911.119	8.488.443.954	8.603.276.797	8.721.517.734	8.843.278.829
Dana Transfer Pemerintah Pusat	8.376.911.119	8.488.443.954	8.603.276.797	8.721.517.734	8.843.278.829
Dana Transfer antar Daerah	26.343.846	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170
Hibah	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	24.514.909.659	25.643.730.674	26.871.698.552	28.127.189.204	29.405.882.177
BELANJA	24.514.909.659	25.243.730.674	26.471.698.552	28.207.189.204	30.125.882.177
BELANJA OPERASI	15.831.419.433	15.157.921.007	15.952.371.597	17.220.358.791	18.111.578.381
Belanja Pegawai	7.978.989.564	7.960.989.910	7.918.519.348	7.891.599.802	7.867.182.491
Belanja Barang dan Jasa	6.063.576.691	5.392.938.549	6.179.873.363	7.019.376.948	7.658.973.035
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.557
Belanja Hibah	1.747.253.178	1.760.292.548	1.808.156.386	2.261.413.416	2.535.083.298

URAIAN	JUMLAH (Rp. 000)				
	TAHUN 2026*	TAHUN 2027*	TAHUN 2028*	TAHUN 2029*	TAHUN 2030*
Belanja Bantuan Sosial	32.600.000	34.250.000	35.900.000	37.550.000	39.400.000
BELANJA MODAL	1.052.221.998	2.106.200.000	2.162.776.000	2.222.356.500	2.743.342.500
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
BELANJA TRANSFER	7.606.268.228	7.954.609.667	8.331.550.955	8.739.473.913	9.245.961.296
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	4.400.368.228	4.748.709.667	5.125.650.955	5.533.573.913	5.975.061.296
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.270.900.000
Jumlah Belanja	24.514.909.659	25.243.730.674	26.471.698.552	28.207.189.204	30.125.882.177
Defisit/Surplus	-	400.000.000	400.000.000	-80.000.000	-720.000.000
PEMBIAYAAN	-	-400.000.000	-400.000.000	80.000.000	720.000.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000	100.000.000	100.000.000	180.000.000	100.000.000
Silpa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Divestasi	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	80.000.000	720.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000	500.000.000	500.000.000	100.000.000	100.000.000
Pembayaran cicilan pokok utang	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	400.000.000	400.000.000	-	-
Pembiayaan Netto	-	-400.000.000	-400.000.000	80.000.000	720.000.000
SILPA	-	-	-	-	-

Sumber: * TAPD Provinsi Jawa Tengah 2025, berdasarkan hasil Pra Rakor Pendapatan 2025

2.2.3. Alternatif Sumber Pendanaan Lain

Pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelenggarakan keuangan daerahnya. Akan tetapi, daerah masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu masih ada kesenjangan pendanaan yang dilihat dari tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan dibandingkan dengan ketersediaan dana pembangunan pemerintah. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur daerah untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana nonpemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Adapun beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu skema pendanaan alternatif yang telah terlaksana di Provinsi Jawa Tengah adalah CSR. CSR di Jawa Tengah telah terlaksana sejak tahun 2019 dengan gambaran realisasi sebagai berikut.

Tabel 2.29.**Realisasi Pelaksanaan CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan BUMN, BUMD	25	59	60	63	65	66
Jumlah Program	n/a	1.073	2.225	2.953	3.503	3.641
Realisasi (Rp)	120.903.290.008	89.454.454.856	83.767.555.393	113.561.417.851	119.556.053.739	127.329.158.211

Sumber: Silap CSR online 2019 – 2024

Berdasarkan data tersebut, realisasi CSR mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dengan kondisi fluktuatif pada Tahun 2020 yang disebabkan Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa CSR masih potensial untuk dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang sifatnya lintas sektor atau *crosscutting*, makro, dan menjadi kewenangan tingkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

Aspek Geografi

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun, yang salah satunya ditunjukkan dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung air yaitu sebesar 0,95 pada tahun 2022. Indikator lain yang juga dapat menggambarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di mana IKLH Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 69,46 di bawah IKLH nasional yang sebesar 73,07.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Jawa Tengah antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi limbah domestik padat (sampah) dan cair dengan masih terbatasnya kapasitas pengelolaannya, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK secara efektif. Sektor energi menjadi kontributor emisi terbesar akibat pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit listrik dan transportasi.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup adalah penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis. Kondisi tersebut yang menyebabkan penurunan daya dukung DAS, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan terganggunya habitat, peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan, pemanfaatan hutan yang belum optimal (kayu, non kayu, jasa lingkungan), ancaman kerusakan kawasan hutan (kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya hutan dan perambahan kawasan hutan), dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Wilayah pesisir dan laut di Jawa Tengah juga saat ini mengalami degradasi yang ditunjukkan antara lain kerusakan ekosistem mangrove, terjadinya abrasi, dan rob terutama pada wilayah pesisir dan laut pantai utara Jawa Tengah.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air baku, kurangnya Sarpras pengolahan air baku untuk air minum, dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian. Sementara itu, terkait dengan permasalahan belum optimalnya pengendalian daya rusak air ditunjukkan dengan adanya kerusakan prasarana sarana sungai dan pengendali banjir.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya amblesan tanah atau *land subsidence*. Amblesan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun berdampak cukup luas yang

umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat seperti yang telah terjadi di Wilayah Pantura Jawa Tengah. Untuk itu pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah harus tetap dilaksanakan untuk menurunkan laju amblesan tanah utamanya pada wilayah cekungan air tanah (CAT) Zona Rusak.

Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Jawa Tengah sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Potensi mineral bukan logam dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya dan perlu mendasari aspek tata ruang karena rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, antara lain, berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*good mining practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan.

2. Belum optimalnya ketahanan pangan

Permasalahan dari aspek geografi lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Hasil identifikasi permasalahan ketahanan pangan antara lain yaitu belum optimalnya penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; dan pencegahan pemborosan pangan (*food waste*). Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dari tahun ke tahun IRB Jawa Tengah terus membaik menjadi sebesar 99,61 pada tahun 2024. Kondisi geografi Jawa Tengah dengan kemiringan yang bervariasi, kondisi sesar dan patahan, kondisi kegunungapian, serta alur-alur sungai memberikan tantangan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana yang terjadi sewaktu-waktu atau bencana yang memiliki waktu evakuasi singkat, seperti gempa, tsunami, gerakan tanah dan banjir bandang. Jumlah dan kepadatan penduduk menyebabkan wilayah konservasi (termasuk wilayah rawan bencana) digunakan sebagai wilayah budidaya sehingga potensi keterpaparan penduduk terhadap ancaman bencana semakin tinggi. Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS), literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 9,58 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,57 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebagian besar jumlah anggota rumah tangganya rata-rata 4-5 orang, usia kepala rumah tangga rata-rata 53,90 tahun, berpendidikan sampai dengan SD atau tidak tamat SD dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman.

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Peran program perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen pengelolaan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal. Tata Kelola dan disharmoni kebijakan pusat dan daerah juga masih menjadi hambatan dalam implementasi. Program perlindungan sosial yang memiliki dua skema, yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial masih diasosiasikan hanya untuk melindungi penduduk miskin, namun belum secara adaptif digunakan perlindungan terhadap dampak kejadian bencana dan perubahan iklim. Perlindungan sosial pada lingkungan yang belum inklusif masih belum optimal menjangkau kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan kelompok lansia. Program jaminan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan kepesertaan khususnya pada sektor informal, nilai klaim yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian, serta kepatuhan pembayaran premi. Program bantuan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan dan kualitas pendataan yang antara lain disebabkan oleh kepemilikan identitas kependudukan, keterbatasan petugas pendataan dibandingkan sasaran, serta tata kelola data yang belum terintegrasi antar sektor.

Sementara itu, rendahnya konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah juga masih menjadi salah satu permasalahan. Konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 baru mencapai 802,05 kWh/kapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat konsumsi listrik ini erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan sektor produktif.

2. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Membangun Jawa Tengah berbudaya dengan membentuk karakter dan menjaga kearifan lokal Jawa Tengah sebagai warisan leluhur yang adiluhung memiliki tantangan tersendiri. Dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, diperlukan komitmen bersama seluruh *stakeholder* untuk memahami budaya tidak hanya sebagai seni namun juga secara menyeluruh diartikan sebagai entitas nilai, laku maupun karya yang dapat ditransmisikan sebagai pedoman dalam berkehidupan, sehingga terbentuk ekosistem kebudayaan yang tangguh sebagai penopang ketahanan budaya sekaligus pemajuan kebudayaan. Belum optimalnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga pembinaan objek pemajuan kebudayaan tercermin dari rendahnya kualitas data kebudayaan, rendahnya komitmen dan sinergi seluruh *stakeholder*, kurangnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, kurangnya pemanfaatan budaya Jawa, serta keterbatasan pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya.

Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak

terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Jawa sejak usia dini. Kondisi ini dapat tercermin dari kinerja indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah yang pada tahun 2023 sebesar 60,89. Meskipun lebih baik dari IPK nasional yang sebesar 57,13 pada tahun 2023, namun di beberapa dimensi IPK masih menunjukkan kinerja yang rendah yaitu dimensi budaya literasi, ekspresi budaya dan ekonomi budaya.

Aspek Daya Saing

Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 73,88 yang masih di bawah angka IPM nasional yang sebesar 75,02. Meskipun demikian, jika dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia (IMM) Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,55 lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,54.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama bersekolah di Jawa Tengah yang masih rendah diperkuat dengan masih dijumpainya anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 500.000 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional. Sementara harapan lama sekolah yang masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Usia harapan hidup penduduk Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Transisi demografi, perubahan gaya hidup dan serta mobilitas antar

wilayah memicu transisi epidemiologi yang mengarah pada peningkatan kasus tidak menular pada usia produktif (termasuk tren meningkatnya masalah kesehatan jiwa), serta masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan penyakit menular baru serta *zoonosis*. Masih rendahnya literasi kesehatan yang berdampak pada pemahaman terkait pentingnya kegiatan promotif dan preventif. Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (*underweight, wasting, stunting, overweight*), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat. Dari sudut pandang akses dan kualitas masih kurang optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif serta distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata. Selain itu, pembangunan kesehatan juga dipengaruhi minimnya inovasi dan teknologi kesehatan.

2. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita Jawa Tengah yang sampai dengan tahun 2024 sebesar 47,97 juta rupiah, jauh dibawah PDRB per kapita nasional yang sebesar 78,61 juta rupiah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian (dalam arti luas)

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan Jawa Tengah yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya **belum optimalnya** produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir

termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Semua permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya menjadikan Jawa Tengah salah satu penumpu pangan nasional yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan petani.

2) Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain **belum optimalnya** kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, digitalisasi industri pengolahan serta masih rendahnya kepedulian akan prinsip keberlanjutan dalam industri.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh **belum optimalnya** ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan, infrastruktur pendukung industri pengolahan, keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

3) Sektor perdagangan

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain **belum optimalnya** ekspor unggulan daerah, pengurangan ketergantungan impor, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

4) Sektor koperasi dan UMKM

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah, antara lain **belum optimalnya**

kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5) Sektor pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain **belum optimalnya** promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, integrasi antardestinasi wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata serta belum beroperasi secara penuh Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai Bandara Internasional yang menjadi Pintu masuk Wisatawan Mancanegara.

6) Sektor ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah belum memperlihatkan hasil yang optimal terutama dalam Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian daerah. Beberapa faktor penyebabnya hal ini antara lain **belum optimalnya** kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

b. Rendahnya daya saing tenaga kerja dan pengangguran

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja yang menyebabkan rendahnya serapan tenaga kerja Jawa Tengah di lapangan kerja yang tersedia. Rendahnya serapan tenaga kerja inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih cukup tinggi meskipun lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

c. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain **belum optimalnya** peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

d. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya

peran lembaga ekonomi Desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan.

3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Jawa Tengah, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan minat Masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

4. Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Menjaga kondusivitas wilayah memiliki tantangan yang rumit karena berbagai persoalan baik ekonomi, sosial maupun budaya dapat dan/atau memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan

dapat juga menjadi simpul permasalahan yang kompleks. Sejauh ini kerawanan terjadi pada beberapa gatra mencakup:

- a. Gatra Sumber Kekayaan Alam, berkaitan dengan ketahanan pangan baik kedelai, gula, dan daging sapi terhadap kebutuhan, kemudian kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih, luas kawasan hutan terhadap daratan, potensi lokal kopi terhadap potensi nasional.
- b. Gatra Ideologi, berkaitan dengan toleransi antarmasyarakat perlu diperhatikan untuk meminimalisasi terjadinya konflik, terkait dengan keadilan dimana pemerintah perlu hadir untuk memenuhi hak dengan warga negara berkaitan dengan jumlah panti asuhan, dan jumlah panti jompo masih tergolong rawan dan kurang tangguh, kemudian pada persentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial masih dinilai kurang, termasuk kapasitas fiskal daerah dinilai rawan.
- c. Gatra Ekonomi, berkaitan dengan kemakmuran dengan melihat pengeluaran sandang terhadap pengeluaran total perkapita dan pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan masih dinilai rawan pada indikator tersebut.
- d. Gatra Sosial Budaya, berkaitan dengan variabel eksklusi sosial ditemukan bahwa wanita masih dikategorikan rawan ekonomi, variabel pendidikan berkaitan dengan tingkat kelulusan SLTA di Jawa Tengah termasuk rawan, termasuk akreditasi baik SD, SLTP maupun SLTA masih dinilai rawan. Kejadian konflik baik konflik fisik masal dan konflik antar aparat pemerintah dengan masyarakat tergolong tinggi.

Khusus pada stabilitas politik, permasalahan yang kompleks terjadi pada agenda-agenda khusus berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, namun beberapa permasalahan dapat juga menjadi simpul kerawanan akibat terabaikannya permasalahan tersebut. Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kemudian berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Kesetaraan masyarakat dalam partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan. Terakhir berkaitan dengan kapasitas kelembagaan untuk memperhatikan proses penyusunan kebijakan dan pendidikan politik, khususnya bagi kader partai politik.

Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Jawa Tengah adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu,

perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu memperbaiki pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan bebas dari penyalahgunaan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisien dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan belum sepenuhnya sinergi dan selaras, belum sepenuhnya berbasis kinerja, risiko dan riset serta penjenjangan kinerja organisasi tidak efisien, serta penetapan indikator yang belum sepenuhnya SMART. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pemanfaatan riset dan data dalam perumusan kebijakan serta masih ditemukan regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pemerintah belum mengoptimalkan ruang kolaborasi dengan menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Terkait kemampuan keuangan daerah, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Terlebih dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Provinsi semakin sempit khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Di sisi lain pembiayaan alternatif daerah belum berkembang secara optimal sehingga kapasitas fiskal akan stagnan atau tumbuh lambat yang berdampak pada tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

Hal lain yang masih perlu didorong adalah mewujudkan demokrasi substansial semakin baik ke depan. Demokrasi yang berkembang saat ini masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Yang perlu didorong ke depan antara lain bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, mengarusutamakan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; serta memperkuat integritas partai politik.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Isu Strategis Global, Nasional, Dan Daerah

Isu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis daerah Jawa Tengah lima tahun ke depan terkait dengan isu-isu yang ada dalam SDG's, isu nasional dalam RPJPN, isu-isu dalam KLHS, maupun isu RPJPD pada periode sebelumnya. Berbagai isu tersebut tergambarkan dalam tabel isu strategis global, nasional, dan daerah sebagai berikut.

Tabel 2.30.
Isu Strategis Global, Nasional, Dan Daerah Dalam Kurun Lima (5) Tahun Kedepan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional	Isu KLHS	Isu Daerah (RPJPD)
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 7. Isu kesinambungan pembangunan:	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah 3. Ketimpangan Akses dalam Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia 4. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif 5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim 6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional	Isu KLHS	Isu Daerah (RPJPD)
	konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah Jawa Tengah** lima tahun ke depan sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu *database* yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam

arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan menjaga kondisi jalan agar aman dan nyaman. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan diantara melalui peralihan menggunakan angkutan umum. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi aman, energi listrik, dan transportasi.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jatidiri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik prima. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan daerah sebagai pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah, sehingga dituntut semakin adaptif dan kolaboratif dengan tetap memperkuat penerapan asas-asas integritas. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan integritas sumber daya aparatur, adanya langkah transformatif dalam mewujudkan *collaborative governance*, dan penerapan demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam *Blue Print* Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “**NGOPENI. NGLAKONI. Jateng**”. Filosofi tersebut diartikan sebagai berikut:

Ngopeni bermakna **melayani masyarakat** dan **memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu**.

Nglakoni bermakna **melaksanakan komitmen** dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Ngopeni-Nglakoni Jateng menjadi Perwujudan Semangat Pimpinan Daerah yang menginspirasi pada seluruh Penyelenggara Pemerintahan untuk **RESPONSIF, PEDULI** mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan **POSITIF** sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk **Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif**.

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan **visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029** adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Makna dari visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

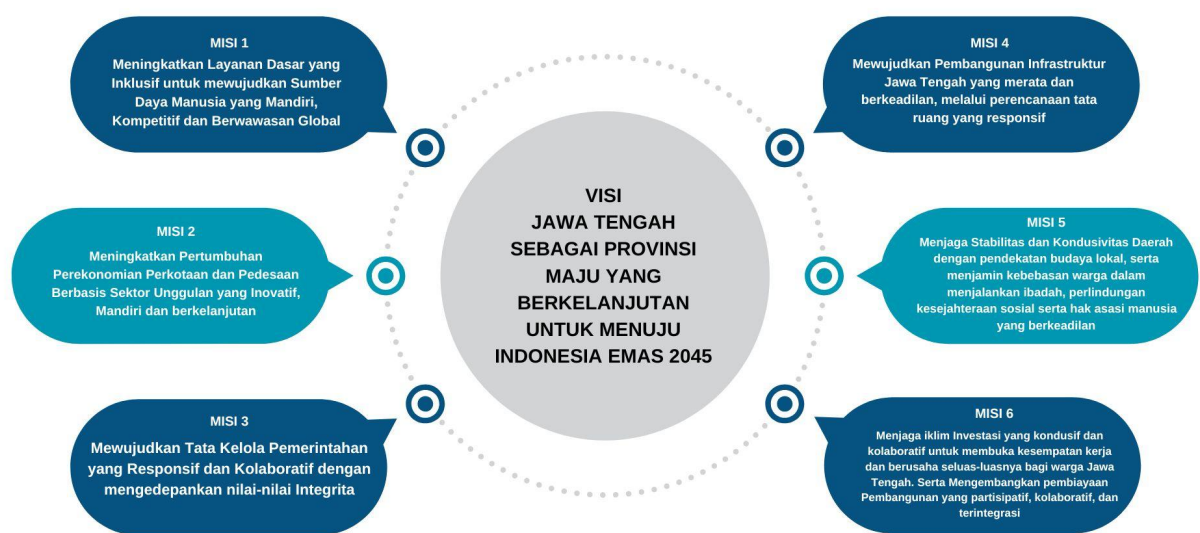
MAJU. Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kotributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.

BERKELANJUTAN. Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan Integrasi Program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan Kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

INDONESIA EMAS 2045. Kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai Episentrum Pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta Ekonomi yang tumbuh berkembang.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam **misi pembangunan daerah** yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.



Gambar 3.1.

Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan **tiga fokus kerja** yaitu:

JATENG SIGAP!

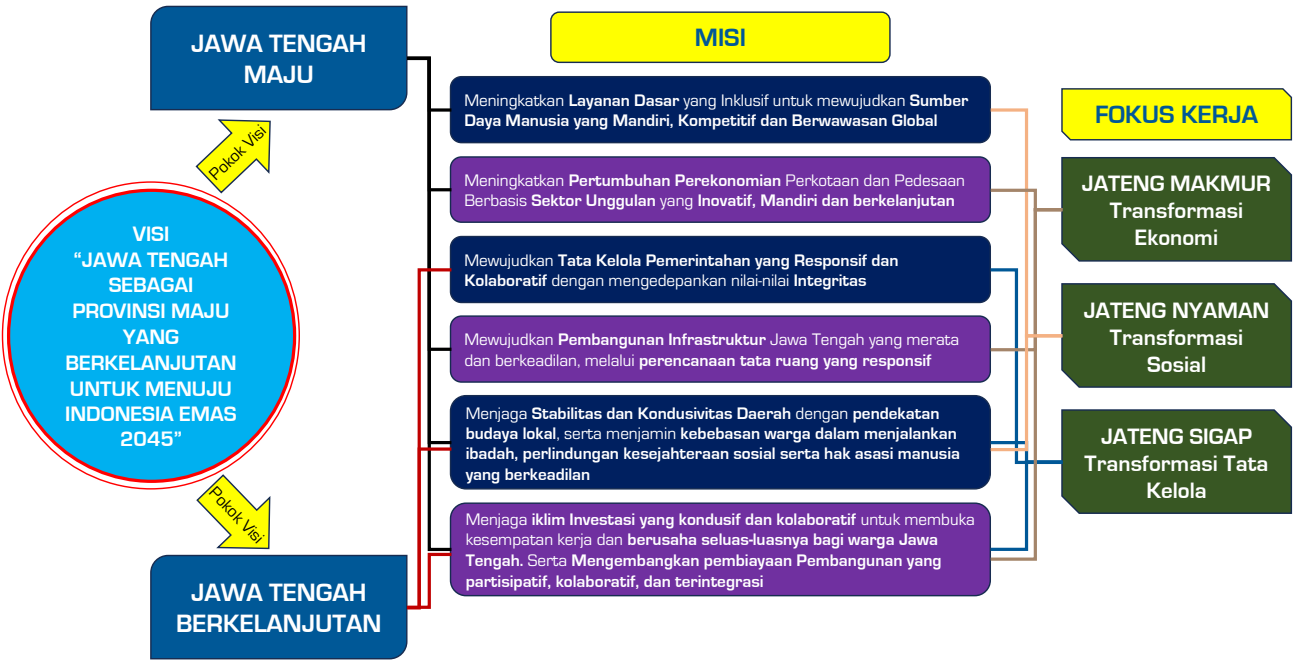
Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadirkan Pemerintahan yang Responsif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.

JATENG MAKMUR!

Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang tidak hanya berfokus pada Perekonomian Perkotaan juga Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang yang responsif, dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

JATENG NYAMAN!

Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan Transformasi Sosial yang tercermin melalui terwujudnya Stabilitas, Kondusivitas, serta Kenyamanan dalam berkehidupan melalui peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif, pengembangan budaya lokal, aman dan nyaman dalam beribadah serta perlindungan terhadap HAM untuk Kualitas SDM Jawa Tengah yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.



Gambar 3.2.
Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan penjabaran pokok-pokok visi, misi dan fokus kerja pembangunan daerah secara teknokratik digambarkan dalam *logframe* atau kerangka berpikir sebagai berikut.

Perwujudan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, didukung dengan tiga pilar pembangunan daerah yaitu:

1. transformasi ekonomi, dengan terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;
2. transformasi sosial, dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter;
3. transformasi tata kelola, dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis.

Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan, terhubung satu sama lain, dan bersifat *cross cutting performance*. Jawa Tengah maju dan berkelanjutan akan terwujud dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis guna mendukung perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai kondisi sosial masyarakat yang lebih baik ditunjukkan dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter.

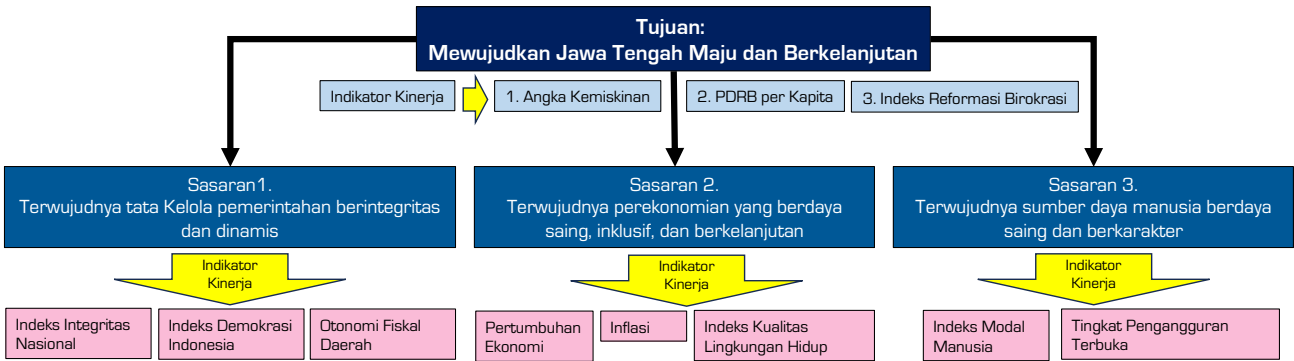


Gambar 3.3.

Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan logframe tersebut diukur dengan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

- Jateng MAJU BERKELANJUTAN, diukur dengan indikator Angka Kemiskinan, PDRB per Kapita, dan Indeks Reformasi Birokrasi;
- Jateng SIGAP (Transformasi Tata Kelola), diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Nasional, dan Otonomi Fiskal Daerah;
- Jateng MAKMUR (Transformasi Ekonomi), diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Jateng NYAMAN (Transformasi Sosial), diukur dengan indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.



Gambar 3.4.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan seluruh penjelasan visi, misi, fokus kerja, sampai dengan logframe pembangunan daerah sesuai dengan blue print perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini yang kemudian akan dirumuskan lebih lanjut dalam strategi dan arah kebijakan sampai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

TUJUAN DAERAH
“MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”

SASARAN DAERAH

- **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis**
- **Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan**
- **Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah **“MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”**. Jawa Tengah yang Maju dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan. Selain itu, Jawa Tengah yang Maju juga diarahkan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sedangkan Jawa Tengah yang Berkelanjutan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah Jawa Tengah yang melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan dan PDRB per kapita sebagai ukuran keberhasilan Jawa Tengah Maju, serta Indeks Reformasi Birokrasi sebagai ukuran keberhasilan Jawa Tengah Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan **SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH** yang akan diwujudkan sebagai berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis sebagai bagian dari transformasi tata kelola di Jawa Tengah. Upaya transformasi tata kelola merupakan arus utama dalam rangka mendorong penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif, yaitu pemerintahan yang senantiasa mampu menyesuaikan dalam menghadapi gejolak maupun perubahan yang seringkali terjadi lebih cepat melalui regulasi adaptif dan tidak tumpang tindih, sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang kompeten dan profesional, budaya kerja efektif dan efisien, didukung dengan digitalisasi dan pengawasan pengendalian berbasis risiko yang independen. Selain itu, tata kelola pemerintahan didorong untuk lebih terbuka dalam berkolaborasi dengan lintas sektor (*hexahelix*) untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tujuan pembangunan sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan juga

didorong untuk mengedepankan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sehingga dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, serta penyusunan kebijakan pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Guna mendukung upaya transformatif tersebut, perwujudan demokrasi yang lebih substantif menjadi penting, dimana kebebasan dan kesetaraan dalam penyediaan ruang dialog dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Demokrasi yang lebih substantif dapat menciptakan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak warga negara sehingga mendorong terwujudnya ketenteraman dan kondusivitas wilayah.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. *Willingness to pay* masyarakat dalam membayar pajak yang semakin tinggi akan mendorong investasi menjadi semakin besar sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintahan berintegritas dan dinamis akan mampu menyesuaikan strategi fiskal dengan dinamika kondisi perekonomian sehingga menghasilkan kapasitas fiskal yang memadai. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan yang tepat sasaran, menyediakan layanan publik yang optimal, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Otonomi Fiskal Daerah.

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan

Pencapaian sasaran pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan diarahkan dengan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan produktivitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta berbasis riset dan inovasi. Sejalan dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan tersebut, investasi yang berkualitas diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif dengan dampak *multiplier* yang besar terhadap perekonomian. Pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah diharapkan memiliki *backward* dan *forward linkage* dalam menciptakan nilai tambah serta menjadi bagian rantai pasok domestik yang kuat.

Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif serta mulai menerapkan prinsip ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut fokus pada pengembangan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur (jalan, energi, listrik, air) yang merata dan berwawasan lingkungan. Selain itu, dalam upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan pembangunan, pengelolaan risiko bencana juga menjadi bagian penting, terutama untuk meminimalkan potensi kerugian ekonomi akibat kejadian ekstrem yang dapat menghambat pertumbuhan.

Perekonomian daerah yang berkelanjutan juga didukung dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

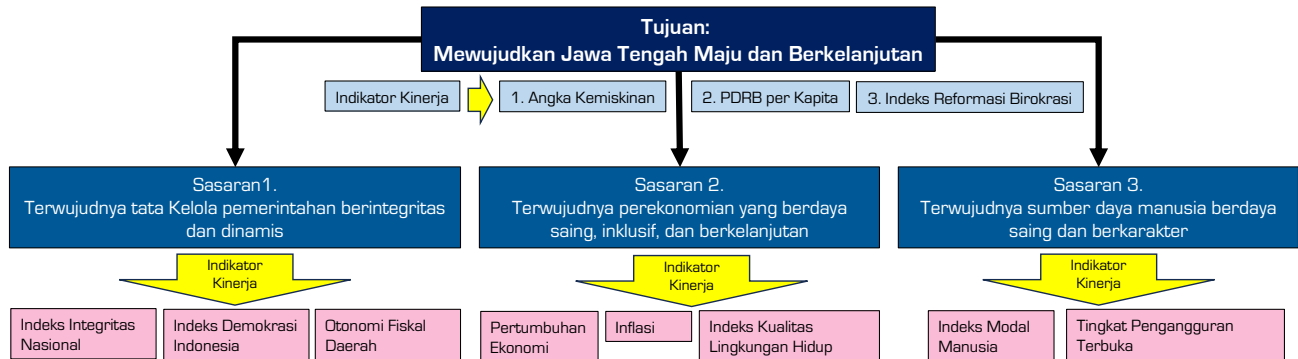
Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut antara lain fokus pada kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas secara inklusif, perlindungan sosial yang adaptif, pembangunan keluarga, pengurangan ketimpangan gender, serta pengurangan pengangguran. Selain itu, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dilakukan dengan upaya memperkuat ketahanan budaya yang terinternalisasi dalam pribadi masyarakat Jawa Tengah dan memajukan kebudayaan di Jawa Tengah sebagai jati diri atau karakter masyarakat Jawa Tengah.

Upaya membentuk ketahanan budaya, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dari dalam keluarga, sehingga hal ini juga berkaitan dengan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Setelah itu, penanaman pondasi karakter juga mulai dilakukan di sektor pendidikan untuk melengkapi proses pembentukan karakter anak sejak dini. Penanaman nilai budaya tidak terbatas pada pembelajaran seni, tradisi dan warisan budaya semata, namun juga upaya menumbuhkembangkan budaya untuk hidup sehat, bugar, serta budaya literasi dalam berbagai aspek.

Selanjutnya, upaya membentuk sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter, memerlukan kondisi masyarakat yang bugar. Ketika masyarakat memahami pentingnya aktivitas fisik, mereka lebih termotivasi untuk berolahraga, yang tentu saja berdampak pada peningkatan kebugaran jasmani secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai jenis olahraga semakin meningkat menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bugar.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berikut gambaran **cascading tujuan dan sasaran pembangunan daerah** beserta indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.



Gambar 3.5.
***Cascading* Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2030. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026 – 2030

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan: Mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan										
	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53	8,51 - 8,17	8,38 - 7,81	8,20 - 7,48	8,00 - 7,13	8,00 - 7,13
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,0	56,0 - 59,8	61,0 - 65,3	67,0 - 71,8	73,0 - 78,4	73,0 - 78,4
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,11	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis										
	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	81,78	82,60	83,41	84,23	85,04	85,04
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	n/a	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	86,80 - 90,22	86,91 - 91,95	87,20 – 90,45	88,61 - 90,82	88,61 - 90,82
	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,47	65,72	66,79	67,88	68,90	69,83	69,83
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan										
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,90 - 5,60	5,00 - 6,00	6,00 - 7,00	6,30 - 7,30	6,70 - 7,70	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00
	Inflasi	%	1,67	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,46	75,68	75,73	75,78	75,83	75,87	75,92	75,92

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter										
	Indeks Modal Manusia	Angka	n/a	0,59	0,61	0,62	0,63	0,65	0,65	0,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56

Gambaran keterkaitan antara permasalahan, isu strategis daerah, visi, misi, fokus kerja, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045				MEWUJUDKAN JAWA TENGAH MAJU DAN BERKELANJUTAN		Angka Kemiskinan PDRB Per Kapita Indeks Reformasi Birokrasi
			JAWA TENGAH MAJU					
					JATENG MAKMUR		Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat - Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal	- Penurunan tingkat kemiskinan - Perekonomian daerah yang berdaya saing dan			2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan				

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
- Belum optimalnya ketahanan pangan - Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah - Menurunnya daya dukung dan daya tampung; - Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	- berkelanjutan - Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana			6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi				
				4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif				
					JATENG NYAMAN		Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	Indeks Modal Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka
- Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Kekuatan budaya sebagai karakter dan			1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global				

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
	jatidiri masyarakat			5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan				
			JAWA TENGAH BERKELANJUTAN					
					JATENG SIGAP		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Indeks Integritas Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Otonomi Fiskal Daerah
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas - Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas			3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas				
				5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam				

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan				

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.** Strategi ini diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu: Bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), seragam siswa miskin, Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas, bantuan instalasi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin, bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial lainnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.** Strategi ini diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, peningkatan akses pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.** Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan

infrastruktur jalan, program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan.

Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. **Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke deoan dijabarkan sebagai berikut.**

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis sebagai berikut.

1. Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan dinamis melalui:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kapabilitas teknologi pemerintahan;
 - c. peningkatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
 - d. penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi;
 - e. peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan;
 - f. penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;
 - g. peningkatan integritas organisasi dan penyelenggara pemerintahan;
 - h. peningkatan kualitas manajemen digitalisasi kearsipan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah;
 - i. peningkatan kualitas kebijakan daerah;

- j. optimalisasi kelembagaan melalui evaluasi struktur organisasi dan perubahan organisasi perangkat daerah berbasis fungsi dan proses bisnis pembangunan daerah;
 - k. peningkatan partisipasi kepala daerah dalam forum internasional;
 - l. pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; serta
 - m. Penguatan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial melalui:
- a. penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
 - b. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
 - c. pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - e. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - g. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
 - h. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - i. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila, serta
 - j. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
3. Memperkuat otonomi fiskal daerah melalui:
- a. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - b. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - c. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - d. mendorong penerapan elektronifikasi keuangan daerah; serta
 - e. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan sebagai berikut.

- 1. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui:
 - a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;

- b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keberagaman pangan;
 - f. peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - g. mendorong pertumbuhan penanaman modal;
 - h. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - i. penguatan ekosistem riset, IPTEK dan inovasi;
 - j. peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan kemandirian desa, melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa;
 - b. penguatan perwujudan standar pelayanan minimal berbasis swadaya Masyarakat melalui integrasi program pos pelayanan terpadu;
 - c. peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif;
 - d. penguatan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - e. peningkatan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan kerjasama antar desa;
 - f. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
 - g. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;
3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui:
- a. peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran air oleh industri dan UMKM;
 - c. peningkatan ketahanan sumber daya air dengan penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
 - d. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
 - f. peningkatan akses sanitasi limbah domestik yang dikelola secara aman untuk menurunkan pencemaran lingkungan;
 - g. peningkatan keterwujudan penataan ruang.

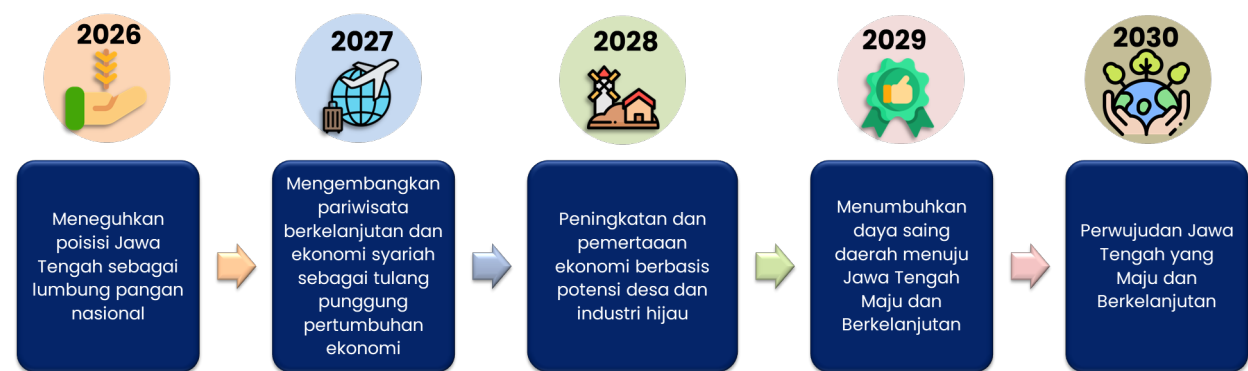
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas, melalui:
 - a. pemenuhan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sarpras pendidikan, penguatan pendidikan karakter, digitalisasi pendidikan, kualitas guru serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal;
 - c. peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada kesesuaian kompetensi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penguatan sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal, dan kerjasama multipihak; serta
 - d. perbaikan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi, kepemimpinan instruksional, dan manajemen kelembagaan serta penguatan kerjasama antar pemerintah (pusat-provinsi-kabupaten/kota), swasta, dan masyarakat;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui:
 - a. peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana sarana kesehatan, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, pengembangan kompetensi SDM, pengintegrasian sistem informasi kesehatan, pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah, pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
 - b. pemberian perlindungan finansial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan paripurna dengan pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan untuk layanan sosial dasar pada kelompok masyarakat dengan kemiskinan, penguatan dan kolaborasi dengan berbagai pengelola dana sosial masyarakat, penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemetaan dan penguatan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial pembangunan di daerah yang bersumber masyarakat, pemetaan dan penguatan regulasi *antifraud* dan konsep pembiayaan strategis di bidang kesehatan;
 - c. perwujudan ketahanan sistem kesehatan masyarakat jawa tengah dengan pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah, peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan, pemetaan dan penataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan, penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional serta penyusunan rencana mitigasi, kontingensi dan rencana operasi berbasis ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat serta pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga melalui:
 - a. penyadaran masyarakat dalam berolahraga;
 - b. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga;

- c. penyediaan prasarana sarana olahraga yang terjangkau;
 - d. peningkatan prasarana sarana olahraga cabang olahraga unggulan;
 - e. pembinaan atlet potensial;
 - f. peningkatan kapasitas tenaga olahraga;
4. Meningkatkan budaya literasi melalui:
 - a. penguatan tata kelola literasi;
 - b. penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung budaya literasi;
 - c. peningkatan kapasitas SDM perpustakaan;
 - d. peningkatan sarpras perpustakaan;
 5. Meningkatkan daya saing pemuda melalui:
 - a. kesadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda;
 - c. pengembangan pemuda;
 6. Meningkatkan pemajuan kebudayaan, melalui:
 - a. peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - b. peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; peningkatan kerjasama lintas sektor dan multipihak; dan optimalisasi pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan;
 7. Meningkatkan ketersediaan arsip daerah sebagai memori kolektif dan jati diri daerah sebagai bagian memori kolektif bangsa;
 8. Meningkatkan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
 9. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek, perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 10. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak;
 11. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi; penguatan sistem perlindungan tenaga kerja; penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan; penuntasan pekerja anak; serta penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

Selanjutnya, dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahun, ditetapkan penahapan kebijakan pembangunan. Penahapan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 3.6.
Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Penjabaran penahapan pembangunan daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Tahap pertama ini juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
 - a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;

- c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
 - e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
 - f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - h. kelembagaan pangan efektif;
 - i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - p. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
- a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
 - m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;

- n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
 - o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - p. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - q. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
 - b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding*;
 - c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
 - d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
 - e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
 - g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
 - h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
 - i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
 - j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
 - k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
 - l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
 - m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
 - n. peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
 - p. pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
 - q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
 - r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
 - s. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip
 - t. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;

- u. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- v. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- w. peningkatan ketahanan keluarga;
- x. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 fokus diarahkan pada kebijakan **“Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan,
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital,
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata,
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital,
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata,
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata,
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata,
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata,
9. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan,
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital.

Tahap kedua ini juga diarahkan untuk **“Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis:
 - a. memperkuat pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
 - b. pengembangan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
 - c. mengembangkan asesmen evaluasi kinerja dan kompetensi sebagai prasyarat distribusi ASN yang akurat;
 - d. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas;
 - e. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;

- f. pengembangan implementasi pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;
 - g. penguatan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - h. kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah efektif;
 - i. pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - k. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
 - l. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - m. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - n. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila,
 - o. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - p. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - q. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - r. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; serta
 - s. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas;
 - t. penguatan kebijakan terkait standarisasi dan fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
 - a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - i. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati;
 - j. peningkatan pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran;
 - k. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan *zero waste tourism* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan;
 - l. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - m. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;

- n. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
 - o. mendorong pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
 - p. penguatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
 - q. mendorong kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
 - r. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - s. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian Guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan;
 - b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerjasama pemerintah-swasta serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - c. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi, kualitas pembelajaran serta pengelolaan SMK *Boarding* dan *Semi Boarding*;
 - d. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
 - e. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
 - f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui pengembangan prasarana sarana kesehatan melalui pembangunan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
 - g. mengembangkan sistem informasi kesehatan;
 - h. pengembangan kompetensi SDM kesehatan;
 - i. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - j. penguatan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
 - k. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
 - l. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan;
 - m. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan;
 - n. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan;
 - o. pengembangan kerjasama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;
 - p. peningkatan kualitas sarpras kebudayaan;
 - q. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan sarpras olahraga cabor unggulan;
 - r. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;

- s. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis;
- t. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun *startup* berbasis syariah;
- u. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- v. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- w. peningkatan ketahanan keluarga;
- x. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 fokus diarahkan pada kebijakan **“Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan dan percepatan kinerja produktivitas sektor-sektor unggulan Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian dalam arti luas secara merata;
2. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
3. penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. penerapan sirkular ekonomi dan dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
5. penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan;
6. peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif;
7. penguatan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa;
8. peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan kerja sama antardesa.

Tahap ketiga ini juga diarahkan untuk **“Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis:
 - a. pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
 - b. peningkatan kualitas keselarasan perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
 - c. peningkatan penerapan perlindungan dan penegakan disiplin untuk menjamin kesejahteraan ASN yang didukung dengan penguatan kinerja dan integritas;
 - d. peningkatan dan pemerataan pengembangan kompetensi dan integritas kepada seluruh penyelenggara pemerintahan;
 - e. peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor;
 - f. peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - g. peningkatan kualitas analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan

- produk hukum serta peningkatan integrasi jaringan dokumentasi informasi hukum;
- h. kelembagaan ekonomi desa dan industri hijau efektif;
 - i. penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
 - j. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
 - k. pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - m. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
 - n. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - o. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
 - p. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - q. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
 - r. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - s. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - t. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - u. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - v. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - w. peningkatan pembinaan dan supervisi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Akselerasi Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
- a. penguatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. penguatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - d. penguatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. penguatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. penguatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. penguatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru;
 - i. peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

- j. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran air oleh industri dan UMKM;
 - k. peningkatan ketahanan air dan energi untuk mendukung penguatan pembangunan sektor ekonomi daerah;
 - l. penerapan sirkular ekonomi dan dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - m. penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan
 - n. penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - o. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - p. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - q. penguatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar dan sarana prasarana pendukung perekonomian desa;
 - r. mendorong produktivitas perekonomian desa berbasis potensi unggulan yang didukung dengan diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi serta hilirisasi pertanian;
 - s. peningkatan kualitas BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya sebagai lembaga ekonomi yang maju dan kompeten mengelola hasil produksi desa;
 - t. peningkatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan dan industri hijau;
 - u. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - v. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
3. Akselerasi Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. penguatan dan pengembangan kerja sama SMA dan SMK dengan *stakeholder* (swasta, masyarakat, perguruan tinggi) secara berkelanjutan;
 - b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerja sama pemerintah-swasta serta pengembangan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - c. peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital serta kurikulum berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics* dan *Arts*);
 - d. peningkatan pendidikan karakter siswa berorientasi potensi, minat dan bakat siswa;
 - e. penguatan tata kelola pendidikan melalui manajemen kelembagaan sekolah dan penguatan refleksi pembelajaran guru;
 - f. pengembangan prasarana sarana kesehatan dan kompetensi SDM kesehatan di layanan kesehatan lanjutan dan primer;
 - g. pengembangan sistem distribusi SDM kesehatan yang efektif;
 - h. pengembangan sistem kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - i. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;

- j. pemetaan dan penataan sumberdaya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
- k. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan;
- l. penguatan perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- m. peningkatan peran SDM dan Lembaga Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan;
- n. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial, peningkatan sarpras olahraga cabor unggulan;
- o. peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan komunitas literasi berbasis desa;
- p. mengoptimalkan penelusuran sumber sejarah yang tidak terdapat dalam arsip sebagai dukungan mewujudkan memori kolektif bangsa;
- q. peningkatan partisipasi dan pembangunan pemuda dalam bidang ekonomi berbasis potensi desa dan ekonomi hijau;
- r. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- s. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- t. peningkatan ketahanan keluarga;
- u. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 fokus diarahkan pada kebijakan **“Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kebugaran dan daya saing olahraga, peningkatan budaya literasi masyarakat, peningkatan daya saing pemuda;
2. peningkatan pemerataan layanan dan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
3. peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga;
4. peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja;
5. pemantapan birokrasi yang berintegritas dan dinamis;
6. peningkatan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial.

Tahap keempat ini juga diarahkan untuk **“Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
 - a. pelayanan publik cepat tanggap;
 - b. pemantapan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset

- c. menumbuhkan inovasi perencanaan mendukung perencanaan berkelanjutan;
 - d. menumbuhkan daya saing melalui mekanisme mutasi dan promosi yang berbasis kinerja dan kompetensi;
 - e. pengembangan kompetensi diarahkan untuk menumbuhkan daya saing penyelenggara pemerintahan dengan mendorong kemudahan akses belajar dengan mengedepankan nilai integritas;
 - f. menumbuhkan kesadaran pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;
 - g. perluasan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - h. peningkatan pelaksanaan penataan regulasi melalui deregulasi dan reregulasi produk hukum serta peningkatan kualitas kebijakan daerah;
 - i. kelembagaan berdaya saing, maju dan berkelanjutan;
 - k. penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
 - l. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
 - m. pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - n. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - o. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
 - p. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - q. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
 - r. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - s. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila,
 - t. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - f. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - g. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - h. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - i. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - j. penguatan pembinaan dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan;
2. Pemantapan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
- a. peningkatan kontribusi dan pemantapan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - c. pemantapan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);

- d. pemantapan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - g. pemantapan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - h. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - i. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - j. pemantapan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - k. pengembangan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim;
 - l. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran air oleh industri dan UMKM;
 - m. peningkatan kualitas layanan dasar desa dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 - n. penguatan ekonomi desa berbasis potensi unggulan, riset, inovasi, dan ekonomi kreatif;
 - o. penguatan peran lembaga ekonomi desa dan akses permodalan usaha;
 - p. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - q. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
 - r. penguatan tata kelola pemerintahan desa;
3. Pemantapan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. pengembangan SMK dan SMA Unggulan berbasis potensi lokal, keahlian spesifik serta STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematic*);
 - b. peningkatan akses pemerataan layanan pendidikan untuk pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan penguatan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemanfaatan alternatif layanan pendidikan dan penguatan kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat serta optimalisasi pemenuhan biaya personil dan operasional sekolah;
 - c. peningkatan mutu pendidikan dengan pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital;
 - d. implementasi pendidikan karakter berbasis nilai agama dan kearifan lokal;
 - e. peningkatan manajemen berbasis sekolah;
 - f. pengembangan sistem kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - g. pengembangan prasarana sarana kesehatan dan kompetensi SDM kesehatan di layanan kesehatan lanjutan dan primer;
 - h. pelaksanaan sistem distribusi SDM kesehatan yang efektif;
 - i. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - j. penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
 - k. peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
 - l. optimalisasi peran SDM dan Lembaga Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan;
 - m. penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;

- n. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan sarpras olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial;
- o. peningkatan ekosistem literasi masyarakat melalui pemantapan sarpras literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing;
- p. peningkatan pengolahan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan;
- q. peningkatan daya saing pemuda;
- r. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- s. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- t. peningkatan ketahanan keluarga;
- u. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 diarahkan dengan tema **“Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan”**, Tahap kelima ini juga diarahkan untuk fokus pada perwujudan kinerja pembangunan daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis;
 - a. pelayanan publik berkualitas prima;
 - b. perwujudan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset yang berkelanjutan;
 - c. perwujudan manajemen ASN berbasis meritokrasi;
 - d. perwujudan kompetensi yang mengedepankan profesionalitas dan nilai-nilai integritas;
 - e. perwujudan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta rendah korupsi yang mendukung Tata Kelola Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;
 - f. perwujudan digitalisasi manajemen kearsipan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang handal;
 - g. perwujudan regulasi yang efektif dan tidak tumpang tindih;
 - h. kelembagaan daerah maju dan berkelanjutan;
 - i. penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
 - j. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
 - k. pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - m. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
 - n. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - o. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;

- p. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - q. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
 - r. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - s. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - t. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - u. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - v. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
 - w. penguatan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
- a. perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi dan sektor-sektor unggulan daerah;
 - b. perwujudan ekonomi desa yang produktif berbasis potensi unggulan dan ekonomi kreatif;
 - c. penguatan peran BUMDes sebagai lembaga yang maju dan kompeten dalam mengelola hasil produksi desa;
 - d. penguatan peran lembaga ekonomi mikro desa dalam meningkatkan akses permodalan;
 - e. pemantapan kerja sama antar desa dan peningkatan peran kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah;
 - f. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM;
 - g. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
 - h. perwujudan inflasi yang terkendali dan stabil yang semakin memperkuat perekonomian daerah;
 - i. perwujudan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung perekonomian daerah;
 - j. penguatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
 - k. penguatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana; serta
 - l. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran air oleh industri dan UMKM;
3. Perwujudan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
- a. perwujudan mutu pendidikan dengan Sekolah Unggulan berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematic*);
 - b. perwujudan pendidikan vokasional berorientasi potensi lokal dan kesejahteraan masyarakat
 - c. perwujudan pemerataan akses pendidikan secara inklusif dalam upaya pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun

- d. perwujudan pendidikan karakter berbasis nilai agama dan kearifan lokal (*Think Globally, Act Locally*)
- e. perwujudan tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparansi dan berorientasi mutu;
- f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui pengembangan prasarana sarana kesehatan dan kompetensi SDM kesehatan di layanan kesehatan lanjutan dan primer;
- g. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau kinerja sistem kesehatan;
- h. pelaksanaan sistem distribusi SDM kesehatan yang efektif;
- i. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
- j. penyusunan rencana mitigasi, kontingensi dan rencana operasi berbasis ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat serta pemerintahan daerah;
- k. perwujudan tata kelola ekosistem kebudayaan yang berkualitas;
- l. penguatan peran SDM, Lembaga dan mitra kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan;
- m. perwujudan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. perwujudan kebugaran masyarakat, daya saing, dan prestasi olahraga;
- o. perwujudan budaya literasi masyarakat yang maju;
- p. perwujudan daya saing pemuda;
- q. perwujudan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- r. perwujudan pembangunan berbasis gender;
- s. perwujudan ketahanan keluarga; serta
- t. perwujudan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 3.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
MEWUJUDKAN JAWA TENGAH MAJU DAN BERKELANJUTAN		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	
		1. Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan dinamis melalui: a. peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi; b. peningkatan kapabilitas teknologi pemerintahan; c. peningkatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset; d. penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi; e. peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan; f. penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi; g. peningkatan integritas organisasi dan penyelenggara pemerintahan; h. peningkatan kualitas manajemen digitalisasi kearsipan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah; i. peningkatan kualitas kebijakan daerah; j. optimalisasi kelembagaan melalui evaluasi struktur organisasi dan perubahan organisasi perangkat daerah berbasis fungsi dan proses bisnis pembangunan daerah; k. peningkatan partisipasi kepala daerah dalam forum internasional; l. pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; serta m. Penguatan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial melalui: - penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; - peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; - pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan; - pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum; - pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; - meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; - penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; - pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional; - penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila, serta - penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
		3. Memperkuat otonomi fiskal daerah melalui: - peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; - penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; - sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; - mendorong penerapan elektronifikasi keuangan daerah; serta - perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas
	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	
		1. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui: - peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan; - peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif; - peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		d. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; e. peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keberagaman pangan; f. peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan; g. mendorong pertumbuhan penanaman modal; h. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; i. penguatan ekosistem riset, IPTEK dan inovasi; j. peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
		2. Meningkatkan kemandirian desa, melalui: a. pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa; b. penguatan perwujudan standar pelayanan minimal berbasis swadaya Masyarakat melalui integrasi program pos pelayanan terpadu; c. peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif; d. penguatan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes); e. peningkatan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan kerjasama antar desa; f. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; g. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;
		3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		4. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui: - peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; - pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran air oleh industri dan UMKM; - peningkatan ketahanan sumber daya air dengan penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan; - peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; - peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; - peningkatan akses sanitasi limbah domestik yang dikelola secara aman untuk menurunkan pencemaran lingkungan; - peningkatan keterwujudan penataan ruang
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	
		1. Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas, melalui: - pemenuhan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan; - peningkatan kualitas sarpras pendidikan, penguatan pendidikan karakter, digitalisasi pendidikan, kualitas guru serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal; - peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada kesesuaian kompetensi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penguatan sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal, dan kerjasama multipihak; serta - perbaikan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi, kepemimpinan instruksional, dan manajemen kelembagaan serta penguatan kerjasama antar pemerintah (pusat-provinsi-kabupaten/kota), swasta, dan masyarakat;

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui: a. peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana sarana kesehatan, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, pengembangan kompetensi SDM, pengintegrasian sistem informasi kesehatan, pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah, pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko; b. pemberian perlindungan finansial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan paripurna dengan pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan untuk layanan sosial dasar pada kelompok masyarakat dengan kemiskinan, penguatan dan kolaborasi dengan berbagai pengelola dana sosial masyarakat, penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemetaan dan penguatan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial pembangunan di daerah yang bersumber masyarakat, pemetaan dan penguatan regulasi <i>antifraud</i> dan konsep pembiayaan strategis di bidang kesehatan; c. perwujudan ketahanan sistem kesehatan masyarakat Jawa Tengah dengan pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah, peningkatan dan penguatan literasi masyarakat di bidang kesehatan, pemetaan dan penataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan, penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional serta penyusunan rencana mitigasi, kontingensi dan rencana operasi berbasis ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat serta pemerintahan daerah
		3. Meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga melalui: a. penyadaran masyarakat dalam berolahraga; b. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga; c. penyediaan prasarana sarana olahraga yang terjangkau; d. peningkatan prasarana sarana olahraga cabang olahraga unggulan; e. pembinaan atlet potensial; f. peningkatan kapasitas tenaga olahraga;
		4. Meningkatkan budaya literasi melalui: a. penguatan tata kelola literasi; b. penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung budaya literasi; c. peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; d. peningkatan sarpras perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		5. Meningkatkan daya saing pemuda melalui: - penyadaran pemuda; - pemberdayaan pemuda; - pengembangan pemuda
		6. Meningkatkan pemajuan kebudayaan, melalui: - peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; - peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat; - penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; peningkatan kerjasama lintas sektor dan multipihak; dan optimalisasi pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan
		7. Meningkatkan ketersediaan arsip daerah sebagai memori kolektif dan jati diri daerah sebagai bagian memori kolektif bangsa
		8. Meningkatkan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial
		9. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek, perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota
		10. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak
		11. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi; penguatan sistem perlindungan tenaga kerja; penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan; penuntasan pekerja anak; serta penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri

3.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.3.1. Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, didukung dengan kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Seluruh program tersebut didorong untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan dituangkan dalam rencana strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

A. Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

1. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
2. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren;
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
5. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
6. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai;
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di Kawasan Industri;
8. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

B. Program Intervensi

Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:

1. Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni;
2. *Smart Response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam “Jateng Nglakoni”;
3. Kantor Gubernur Rumah Rakyat;

4. Digitalisasi Manajemen Arsip;
5. Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD;
6. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa;
7. Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*);
9. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru;
10. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah;
11. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening;
12. Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa;
13. Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal;
14. Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
15. Percepatan penanganan *stunting* melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
16. Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet);
17. Peningkatan Bantuan Keuangan Desa;
18. Jambanisasi 100%;
19. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
20. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
21. Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang);
22. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru.

C. Program Aksi

Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi:

1. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah;
2. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
3. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan;
4. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak;

5. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta;
6. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
7. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
8. Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata;
9. Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*);
10. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
11. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
12. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter;
13. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte);
14. Memastikan Integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi;
15. Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global;
16. Mendorong pembangunan *Giant Sea Wall* (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah);
17. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional;
18. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api;
19. Menyiapkan Sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);
20. Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali;
21. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan;
22. Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau);
23. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
24. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
25. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM;
26. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar;
27. Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian;
28. Pendirian Koperasi Buruh;
29. Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora;
30. Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO;
31. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
32. Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri;
33. Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan;

34. Spesialis keliling, puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
35. Mendorong penyediaan 1 Dokter 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
36. Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit;
37. *Event* olahraga memancing terbesar Asia;
38. Petani milenial gajian;
39. Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi;
40. BOSDa Madrasah Aliyah;
41. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta;
42. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja;
43. Transformasi tata kelola tambang Galian C;
44. Pengembangan Investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya;
45. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah;
46. Pengembangan peterna lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
47. Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal;
48. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD;
49. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional;
50. Pengembangan *Sister Province*;
51. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK;
52. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
53. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa;
54. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah;
55. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
56. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
57. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
58. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
59. Program Kerjasama Forkopimda;
60. Pengembangan pertanian yang terintegrasi;
61. Pemberdayaan masyarakat hutan sosial.

D. Program Taktis

Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima;
2. Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan;
3. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah;

4. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
5. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi;
6. Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha);
7. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
8. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
9. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jateng);
10. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk penyediaan air bersih;
11. Revitalisasi embung;
12. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren;
13. Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
14. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau;
15. Menghadirkan infrastruktur yang carbon neutral;
16. Pengembangan urban farming untuk pertanian kawasan perkotaan;
17. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak;
18. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
19. Subsidi pangan murah;
20. Penguatan dan pembinaan E-Sport Jawa Tengah;
21. Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan;
22. Penyediaan benih yang berkualitas;
23. Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian;
24. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang disabilitas;
25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya;
26. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
27. Pap smear gratis (skrining Ca Serviks);
28. Peningkatan operasional kader posyandu;
29. Peningkatan kualitas hidup lansia;
30. Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba;
31. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah;
32. Penanganan bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
33. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa;
34. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalannya partisipasi berbasis Hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan);
35. Regulasi pengembangan kawasan industri;

36. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha;
37. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah;
38. Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta;
39. Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*market place*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*);
40. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”;
41. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional;
42. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan.

Tabel 3.4.
Penjabaran Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis
1	2
Indeks Reformasi Birokrasi	
	PP. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
	PI. Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni
	PI. Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni”
	PI. Kantor Gubernur Rumah Rakyat
	PI. Digitalisasi Manajemen Arsip
	PA. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah
	PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak
	PA. Pengembangan sister province
	PA. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK
	PA. Program Kerjasama Forkopimda
	PT. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima
	PT. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah
	PT. Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)
	PT. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah
Indeks Integritas Nasional	
	PI. Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD
	PI. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa
	PA. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK
	PA. Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C
Otonomi Fiskal Daerah	
	PI. Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis	
1	2	
	PA.	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal
	PA.	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD
	PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima
Pertumbuhan Ekonomi		
	PP.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
	PP.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri
	PP.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
	PI.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)
	PI.	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru
	PI.	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah
	PI.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening
	PI.	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa
	PI.	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal
	PA.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis
	PA.	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot)
	PA.	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM
	PA.	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter
	PA.	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)
	PA.	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi
	PA.	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global
	PA.	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api
	PA.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan
	PA.	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis	
1	2	
	PA.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya
	PA.	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
	PA.	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian
	PA.	Pendirian Koperasi Buruh
	PA.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora
	PA.	Event olahraga memancing terbesar di Asia
	PA.	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi
	PA.	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya
	PA.	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa
	PA.	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional
	PA.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa
	PA.	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa
	PA.	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah
	PA.	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau
	PA.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata
	PT.	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi
	PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan
	PT.	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)
	PT.	Revitalisasi embung
	PT.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau
	PT.	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
	PT.	Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital
	PT.	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah
	PT.	Penyediaan benih yang berkualitas
	PT.	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis	
1	2	
	PT.	Regulasi Pengembangan kawasan industri
	PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha
	PT.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce)
	PT.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”
Tingkat Pengangguaran Terbuka		
	PP.	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
	PA.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta
	PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan
	PA.	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja
	PA.	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial
	PT.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)
	PT.	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan
	PT.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas
	PT.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila
Indeks Demokrasi Indonesia		
	PP.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
	PA.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan
	PA.	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO
	PA.	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	PA.	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri
	PA.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis	
1	2	
	PT.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan
	PT.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya
Indeks Modal Manusia		
	PP.	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren
	PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
	PP.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi
	PI.	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil
	PI.	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)
	PA.	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
	PA.	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu
	PA.	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit
	PA.	BOSDa Madrasah Aliyah
	PA.	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta
	PA.	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga
	PA.	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan
	PT.	Pap smear gratis (skrining Ca serviks)
	PT.	Peningkatan operasional kader Posyandu
	PT.	Peningkatan kualitas hidup lansia
	PT.	Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba
	PT.	Pelindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah
	PT.	Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
	PT.	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa
	PT.	Cek kesehatan gratis

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis
1	2
Angka Kemiskinan	
	PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
	PP. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
	PI. Peningkatan Bantuan Keuangan Desa
	PI. Jambanisasi 100%
	PI. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari
	PI. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida
	PA. Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir
	PA. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional
	PA. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)
	PA. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM
	PA. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar
	PA. Petani milenial gaji
	PA. Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah
	PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana
	PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin
	PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya
	PT. Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih
	PT. Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren
	PT. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat
	PT. Penataan Drainase dan Pengendalian Banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak
	PT. Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	PP. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis
1	2
	PI. Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)
	PA. Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali
	PA. Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)
	PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa
	PT. Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral
	PT. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional
Inflasi	
	PT. Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok
	PT. Subsidi Pangan Murah
PDRB per Kapita	
	PI. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

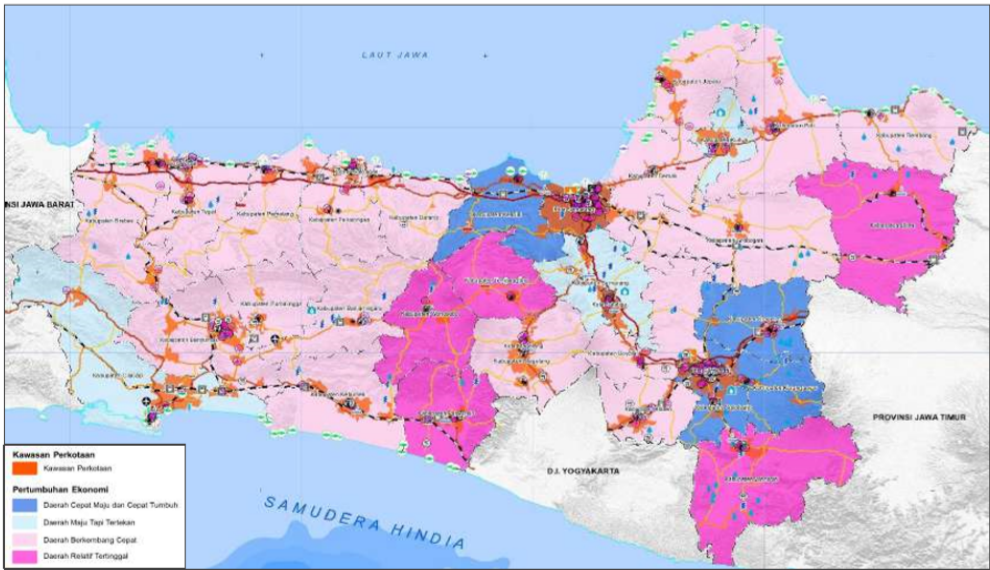
4.1. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH

a. Kondisi Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Perkembangan jumlah penduduk perkotaan di Jawa Tengah diprediksi akan terus meningkat (rasio jumlah penduduk perkotaan Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 45,57 persen dan proyeksi BPS 2045 mencapai 69,34 persen), sehingga membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar perkotaan serta peningkatan kualitas keterkaitan perkotaan - perdesaan (*urban rural linkage*) di seluruh Jawa Tengah.

Penyediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dalam pemerataan pembangunan wilayah. Penyediaan infrastruktur masih terpusat pada daerah perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Perkotaan Cilacap. Daerah tersebut masuk dalam kategori ekonomi cepat maju cepat tumbuh (Kota Semarang dan Surakarta) dan daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Cilacap).

Kategori ekonomi daerah tertinggal memiliki sarana dan prasarana penunjang belum optimal seperti di Kabupaten Blora, Wonogiri, Purworejo, Wonosobo dan Temanggung, sehingga masih diperlukan adanya dukungan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas penghubung antar kawasan pada kawasan yang masih tertinggal, serta peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan.



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Tengah, BAPPEDA, 2025

Gambar 4.1.
Pertumbuhan Ekonomi dan Persebaran Infrastruktur serta
Kawasan Perkotaan

b. Potensi Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

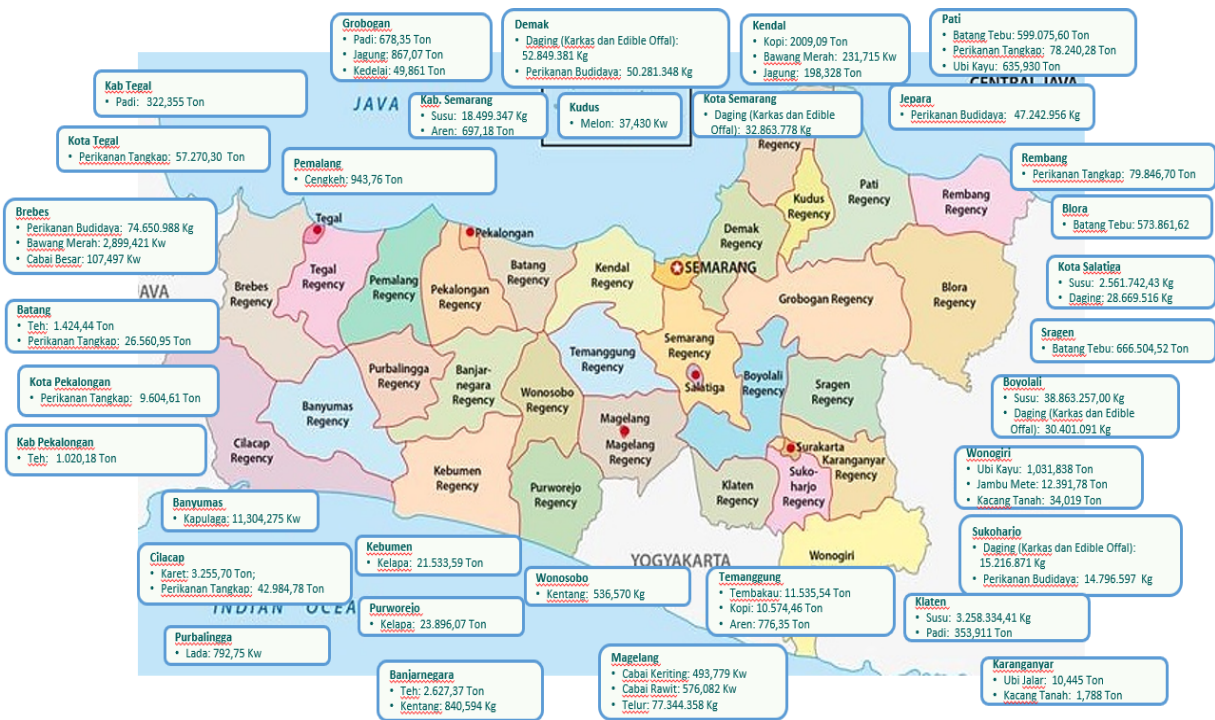
Potensi Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan lapangan usaha ke-3 terbesar yang berkontribusi untuk PDRB Jawa Tengah pada Tahun 2024 yaitu sebesar 13,08 persen, namun

dari sisi pertumbuhan merupakan yang terendah diantara 17 lapangan usaha lainnya yaitu hanya sebesar 1,41 persen.

Berdasarkan kebijakan nasional, Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi penyokong utama lumbung pangan dan berkontribusi dalam perwujudan swasembada pangan nasional. Di Tingkat Nasional, Jawa Tengah merupakan penghasil padi terbesar kedua setelah Jawa Timur, namun pada periode 2020 – 2024 produksi padi mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya penurunan luas panen padi sebesar 91,07 hektar di 2024 atau menurun 5,54 persen dibanding luas panen padi tahun 2023 sebesar 1,64 juta hektar. Adanya bencana banjir dan kekurangan pasokan air (kekeringan) di beberapa sentra produksi padi juga ikut andil sebagai penyebab gagal panen.

Jika dilihat dari sektor pertanian secara luas, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah memiliki komoditas unggulan yang dapat dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2023. Hal ini mendukung visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dimana komoditas unggulan tersebut dapat diintervensi melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Berikut adalah peta potensi pertanian secara geografis di Jawa Tengah tahun 2023.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

Gambar 4.2.
Peta Potensi Pertanian di Jawa Tengah Tahun 2023
Potensi Sektor Perindustrian

Struktur ekonomi Jawa Tengah dari tahun 1993 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebagai penyumbang perekonomian terbesar di Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang sangat penting dalam struktur perekonomian Jawa Tengah, dimana rata-rata kontribusi yang diberikan oleh sektor ini selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar 34 persen per tahun. Berdasarkan pengategoriannya, nilai PDRB sektor industri pengolahan terbesar tahun 2024 adalah industri makanan dan minuman sebesar 47,52 persen, disusul industri tembakau sebesar 18,42 persen, industri batu bara dan pengilangan migas 7,20 persen.



Sumber: RPIP Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 (diolah)

Gambar 4.3.

Peta Potensi Industri Prioritas Sektor Makanan dan Minuman di Jawa Tengah

Potensi Sektor Pariwisata

Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Jawa Tengah pada periode tahun 2020 – 2024 selalu mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 2,99 persen dan 2024 tumbuh menjadi 3,56 persen. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata pada tahun 2024 menjadi yang paling tinggi diantara 17 sektor lapangan usaha lainnya yaitu sebesar 10,03 persen, walaupun angka ini menurun dibandingkan angka 2023 sebesar 11,24 persen dan 2022 sebesar 16,99 persen. Pertumbuhan sektor pariwisata dimaksud disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kunjungan dan rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan baik mancanegara dan nusantara.

Potensi yang menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Tengah karena jumlah, persebaran dan keunikan Daya Tarik Wisata (DTW) yang secara jumlah juga terus mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah DTW Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 1.607 DTW yang terdiri dari 750 DTW Alam, 267 DTW Budaya dan 590 DTW Buatan. Total jumlah DTW meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 982 DTW.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah memedomani Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, dimana tujuan penataan ruang dalam konteks pengembangan wilayah selama dua puluh tahun ke depan adalah **“Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir”**. Guna mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan kebijakan penataan ruang meliputi:

1. peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan;

2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
3. peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
4. pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pengembangan KSP (Kawasan Strategis Provinsi); dan
7. peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, pengembangan wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP). Wilayah pengembangan adalah pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar kabupaten/kota. Sepuluh WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. WP Cibalingmas meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
3. WP Petanglong meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
4. WP Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
5. WP Jekuti meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
6. WP Banglor meliputi Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
7. WP Wonobanjar meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
8. WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
9. WP Gelangmanggung meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
10. WP Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044

Gambar 4.4.
Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJPD Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045, dimana visi daerah Jawa Tengah tahun 2025-2045 adalah **“Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”**. Dari 8 misi pembangunan, terdapat 1 Misi yang langsung terkait dengan pembangunan kewilayahan, yaitu Misi ke-6 terkait **“Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan”**. Arah pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, dimana pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Pada Misi ke-7 terkait **“Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”** menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa (efisiensi biaya perjalanan dan logistik), serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Selain itu terdapat sarana prasarana sumber daya air, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi.

Dalam RPJPD, Ppmbangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kelompok pendapatan, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Pada RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025 – 2029 terdapat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan langkah konkret pencapaian sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus.

Dalam RPJMN 2025–2029 terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan. Indikasi PSN di Jawa Tengah sebagai berikut:

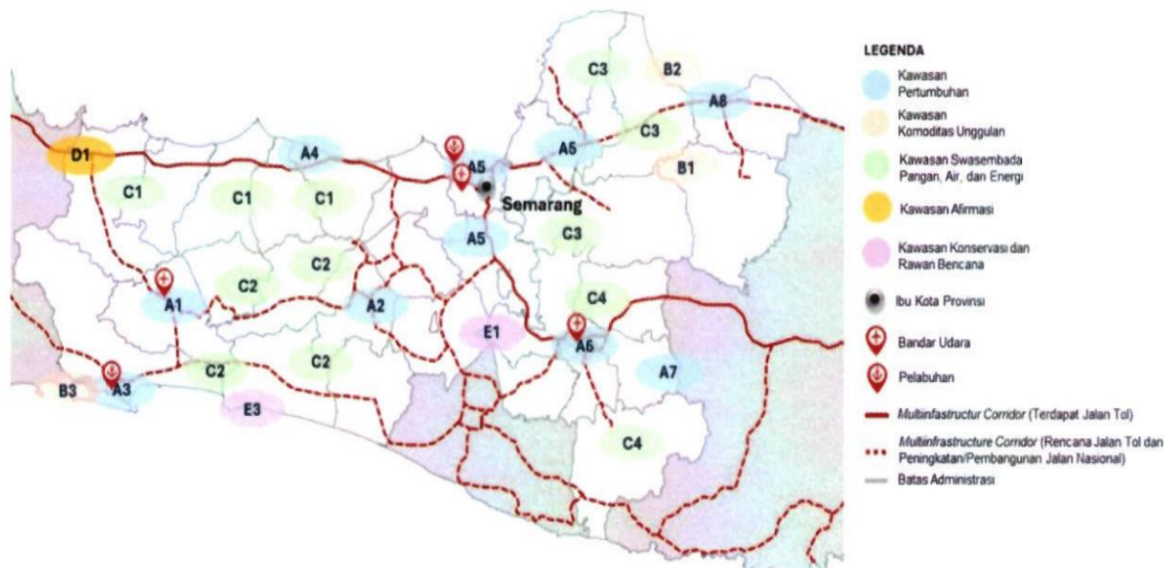
1. Swasembada Pangan: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat (Nasional), Layanan Irigasi Pendukung;
2. Lumbung Pangan Nasional (Nasional), Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi (Nasional)
3. Swasembada Air: *Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa (DKI, Jawa Barat, Jawa timur, Banten dan Jawa Tengah), Bendungan Jragung (Jawa Tengah), SPAM Regional Wosusokas;
4. Swasembada Energi: Bioetanol (Berbasis Tebu) (Lokasi: Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, DIY, Jawa timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan, RDMPRU IV Cilacap (*Rescoping*), *Biorefinery* Cilacap;
5. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Hilirisasi Singkong dan ubi jalar: Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Singkong, Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat 5 pembagian kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;
2. Kawasan komoditas Unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas Tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati-Rembang, dan Cilacap;
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan):
 - a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan dan Batang);
 - b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng-Serayu-Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung – Tuntang – Serang – Lusi – Juwana (Kab. Semarang,

- Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
4. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
 5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu - Merapi, TN Karimunjawa dan *Geopark* Kebumen.

Dari 10 WP semua terdapat lokasi prioritas di dalam wilayah masing-masing sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV, Hal. 97), BAPPENAS, 2025

Gambar 4.5.
Pengembangan Kewilayahan di Jawa Tengah Pada RPJMN 2025-2029

4.2. ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PER WILAYAH PENGEMBANGAN TAHUN 2025 – 2029

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 yang terbagi dalam sepuluh wilayah pengembangan diarahkan dengan kebijakan umum **”Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan”**. Kebijakan tersebut juga dalam rangka untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah serta memberikan kontribusi untuk perwujudan Indonesia Emas 2045. Pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan atau 10 titik aglomerasi Jawa Tengah merupakan implementasi atau penjabaran langsung dari RPJMD Tahun 2025-2029 pada Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; dan Misi 6 Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru juga merupakan bagian dari “Fokus Kerja Jateng Makmur”, dimana merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang berfokus pada: Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan;

Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

Tahapan perwujudan 10 titik aglomerasi pertumbuhan perekonomian baru berbasis WP dalam 5 tahun kedepan (2025 – 2029) secara umum per tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun I (2025): meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah strategis yang mendukung langsung Pertumbuhan Ekonomi untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. Tahun II (2026): meningkatkan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dalam arti luas utamanya pada komoditas unggulan daerah untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional;
3. Tahun III (2027): mengembangkan potensi dan daya saing sektor pariwisata yang berkelanjutan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah;
4. Tahun IV (2028): meningkatkan pemerataan ekonomi berbasis industri hijau dan potensi sumber daya yang ada;
5. Tahun V (2029): memantapkan daya saing daerah di semua sektor (utamanya: pertanian, pariwisata dan perindustrian) untuk mendukung perwujudan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;
6. Tahun VI (2030): Perwujudan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.

Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Program Unggulan dan Program Strategis.

Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi adalah program lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kewenangan di setiap WP yang dinilai paling prioritas dan siap menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi secara jangka menengah ditingkat Jawa Tengah dan/atau Nasional.

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi merupakan pendamping Program Unggulan yang juga berpotensi sebagai penggerak perekonomian ditingkat WP dan/atau lintas WP.

Beberapa pertimbangan dalam menentukan Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di setiap WP adalah sebagai berikut:

1. Merupakan keberlanjutan program-program yang sudah dilakukan utamanya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah;
2. Memedomani RTRW dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Memedomani Arah Pembangunan Kewilayahan sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 (Lampiran IV);
4. Memperhatikan Visi, Misi, Fokus Kerja, Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Program Intervensi, Program Aksi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2025 – 2029;
5. Mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Memperhitungkan potensi lokal unggulan per WP yang dapat berdampak positif pada sektor lain, mempunyai rantai nilai (*value chain*) panjang dan paling tinggi pertambahan nilainya (*value added*).

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing WP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Wilayah Pengembangan (WP)

WP	Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Subosukawono-sraten	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (<i>Event Tourism</i>) dan Wisata Alam serta Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: • Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, tebu daging, susu, dan perikanan budi daya)
Gelangmanggung	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (<i>Cultural Heritage Tourism</i>) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: • Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, telur dan perikanan budidaya) • Pengembangan sektor industri gula, kopi, tembakau, olahan kayu, dan alas kaki
Kedungsepur	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil, Daging, Jamu, dan Pengolahan Ikan) Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: • Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai <i>Global City</i> • Pengembangan <i>Cultural Heritage Tourism</i> (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsk) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, tanaman perkebunan, susu, kedelai dan perikanan tangkap)
Petanglong	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: • Pengembangan <i>Shopping Tourism</i>, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh dan perikanan tangkap)
Cibalingmas	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan <i>Integrated Eco-Tourism</i> Sabuk Gunung Slamet (Baturaden – Serang Purbalingga) dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: • Pengembangan Industri (ikan, gula, jamu, minyak atsiri) Cilacap – Banyumas – Purbalingga

WP	Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
	Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, tebu, serta perikanan budidaya dan tangkap)
Bregasmalang	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: bawang merah, padi, cabe, perikanan tangkap dan budidaya) Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: - Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan) - Pengembangan Integrated <i>Eco-Tourism</i> Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).
Jekuti	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (furniture, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan) Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: - Pengembangan <i>Marine Tourism</i> dan Religi. - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, perikanan tangkap dan budidaya serta garam)
Banglor	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan <i>Ecotourism</i> Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: - Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan - Pengembangan <i>Cultural Heritage Tourism</i> Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, kelapa kopyor, perikanan tangkap dan garam)
Wonobanjar	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan <i>Geo-Tourism</i> (Kawasan Dieng) yang Terintegrasi dengan Kawasan Borobudur. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh, tembakau, kelapa dan alpukat serta sektor kehutanan (kayu sengon)) - Pengembangan sektor industri gula, tembakau dan industri kayu dari barang kayu dan gabus
Keburejo	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan <i>Geo-Tourism</i> (Geopark Kebumen dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kelap, padi, perikanan tangkap dan budidaya) - Inisiasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kebumen - Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, hasil analisis, 2025

Arahan kebijakan per wilayah pengembangan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

4.2.1. WP Subosukawonosraten

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Subosukawonosraten, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (*Event Tourism*) dan Wisata Alam dan Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Mendorong peningkatan status Bandara Adi Soemarmo menjadi bandara internasional (pengembangan sebagai bandara umrah dan haji) dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;
 - 2) Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol ruas Solo – Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo;
 - 3) Mendorong pembangunan fasilitas integrasi transportasi antarmoda dan penyediaan layanan angkutan pemadu moda di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta;
 - 4) Mendorong peningkatan layanan perkeretaapian, diantaranya: KRL Commuter Line Surakarta – Yogyakarta (rencana perpanjangan sampai ke Kutoarjo), KA Wisata Bhatar Kresna (Surakarta – Wonogiri), KA Bandara Adi Soemarmo (BIAS), KA Joglosemarkerto (loop) serta mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta - Surabaya;
 - 5) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta – Sumberlawang via Sangiran dan Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri yang terkoneksi dengan Batik Solo Trans (BST) dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata) serta perindustrian;
 - 6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Sukoharjo dan Tawangmangu;
 - 7) Pemenuhan perlengkapan jalan provinsi pada ruas pendukung kawasan pariwisata Tawangmangu dan Geopark Wonogiri.
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) strategis regional dan nasional diantaranya: Sangiran, Umbul, Geopark Gunung Sewu, Tawangmangu, Candi Cetho-Sukuh;
 - 2) Fasilitasi penyelenggaraan event nasional dan internasional seni budaya, festival dan olahraga;
 - 3) Mengembangkan pola perjalanan yang mendukung perpanjangan tema wilayah pengembangan untuk mendukung pre dan *post tour event*;
 - 4) Menciptakan aktivitas wisata yang unik dalam MICE *itineraries*;
 - 5) Berkolaborasi dengan industri kreatif untuk menciptakan penawaran yang unik untuk mendukung kegiatan even yang berbeda dengan pesaing;

- 6) Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya (*urban renewal* Kota Tua Surakarta, Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegaran) untuk peningkatan daya saing sektor pariwisata;
- 7) Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya dan mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya/sejenisnya;
- 8) Mendorong pembangunan dan pengembangan desa wisata;
- 9) Digitalisasi promosi pariwisata dan penguatan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi;
- 10) Pengembangan Geopark melalui jelajah Geopark Gunung Sewu, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark, serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan geopark global;
- 11) Pendampingan pengembangan Geoheritage Klaten;
- 12) Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Gunung Sewu sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui: visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain.

2. Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki)

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perindustrian, berupa:
 - 1) Pemantapan jaringan jalan Nasional pada ruas Boyolali - Surakarta - Palur - Sragen sampai dengan batas Jawa Timur;
 - 2) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Wonogiri - Perbatasan (DIY dan Jatim), Geyer - Surakarta - Sukoharjo – Wonogiri;
 - 3) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas jalan akses ke perbatasan provinsi (DIY dan Jatim); akses langsung ke jalan nasional (JJLS) dan penghubung antar jalan nasional (Boyolali -Klaten);
 - 4) Mendorong optimalisasi Dry-port Jebres dan Kalijambe Sragen.
- b. Peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, berupa:
 - 1) Pengembangan sentra industri hijau;
 - 2) Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - 3) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
 - 4) Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surakarta.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, daging, susu, perikanan budi daya dan tebu).

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 2) Peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan tebu di Sragen;
 - 3) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu);
 - 4) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
 - 5) Penjaminan kualitas pakan ternak;
 - 6) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 7) Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;

- 8) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
 - 9) Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali, Kampung Patin Sragen);
 - 10) Pengembangan *broodstock* center ikan nila di Klaten;
 - 11) Mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (*urban farming*);
 - 12) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kepoh, Kwangsan dan Padakslorot Kabupaten Karanganyar; Klego Kabupaten Boyolali, Bapang dan Catgawen Kabupaten Sragen; Pundung dan Sidopangus Kabupaten Klaten;
 - 13) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian berupa peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung: Tirtosworo, Bangkan, Kedokan, Selur dan Salam (di Kabupaten Wonogiri) dan Embung Guworejo Sragen.
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
- 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
 - 2) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk;
 - 3) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
 - 4) Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan buyer dari pemerintah, BUMN/D, swasta;
 - 5) Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif berbasis potensi lokal;
 - 6) Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Produktif;
 - 7) Magang Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produk UMKM sektor susu;
 - 8) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
 - 9) Pemberdayaan Aspek Produksi Koperasi (FGD KUD di Solo Raya, Bulog dan MBG tentang Hilirisasi dan ketahanan Pangan);
 - 10) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Gemolong - Sragen - Karanganyar, Karangwuni - Perbatasan DIY.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun ke depan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Subosukawonosraten, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi untuk mendukung penanganan kemiskinan di Subosukawonosraten;
- b. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan;

- c. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal dan mendorong sekolah inklusif.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
- b. Optimalisasi keberadaan pintu tol yang cukup dan peningkatan daya tarik untuk mengurangi dampak jalan tol terhadap perekonomian serta meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang;

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mengoptimalkan persebaran dan pertumbuhan kawasan PKW dan PKL yang persebarannya cukup merata untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
- b. Mendorong dan memfasilitasi rencana penanganan/penataan permukiman yang termasuk kawasan kumuh perkotaan secara terpadu;
- c. Mendorong dan memfasilitasi kajian kelayakan inisiasi rencana pembangunan TPST Regional di Solo Raya;
- d. Mendorong dan memfasilitasi penanganan banjir di wilayah Solo Raya;
- e. Mendorong pemberian disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi (parkir progresif) dan insentif pengguna angkutan umum berupa penyediaan angkutan umum yang terintegrasi, berkualitas dan terjangkau;
- f. Pengembangan SPAM Regional Wosusokas;
- g. Mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan penuntasan penanganan jalan evakuasi;
- h. Mendorong rehabilitasi/pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
- i. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan (20 persen) maupun wilayah desa;
- j. Pemantauan dan pengawasan Sungai Bengawan Solo;
- k. Konservasi Gunung Lawu;
- l. Memperkuat inisiatif imbal jasa lingkungan (*payment for environmental services*);
- m. Mendorong sinergisitas pengelolaan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
- n. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis Masyarakat;
- o. Mendorong Pembangunan infrastruktur PLTP Jenawi.

2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, daging, susu, perikanan budi daya dan tebu)

- f. Inisiasi proses rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten/Kota di WP Petanglong yang terintegrasi dengan KITB dan moda transportasi lainnya;
- g. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Banyuputih Batang sebagai simpul rencana layanan Trans Jateng Petanglong;
- h. Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Banyuputih – Plantungan;
- i. Mendorong Perencanaan Tata Ruang serta Tata Bangunan dan Lingkungan yang baik utamanya pada kawasan penyangga KIT Batang untuk mengantisipasi *urban sprawl* serta kekumuhan;
- j. Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
- k. Kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah Subah dan Pekalongan-Pemalang.

2. Pengembangan *Shopping Tourism*, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Wiradesa-Kajen-Kalibening dan Wonotunggal-Surjo;
 - 2) Mendorong peningkatan aksesibilitas koridor pariwisata Bandar-Dieng;
 - 3) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Kajen-Wonotunggal-Surjo;
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Menciptakan *brand* wisata belanja;
 - 2) Penyusunan basis data industri lokal yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata belanja;
 - 3) Mendorong pengembangan kawasan tematik sebagai lokasi belanja yang representatif, kreatif dan inovatif;
 - 4) Pengembangan pasar-pasar tradisional sebagai destinasi wisata belanja;
 - 5) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - 6) Mengembangkan kampung/desa wisata utamanya pada koridor Bandar-Dieng serta Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya;
 - 7) Fasilitasi pengembangan berbagai even kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain: Syawalan, Balloon Festival, Festival Kesenian;
 - 8) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global;
 - 9) Bimbingan teknik produksi dan pengelolaan usaha bagi wirausaha baru industri komoditas.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, teh dan perikanan tangkap)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan didukung fasilitasi penyediaan sarpras; peningkatan kompetensi; korporasi pertanian; serta pencegahan alih fungsi lahan pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengembangan minapolitan untuk mendorong produksi dan hilirisasi komoditas perikanan tangkap didukung pengembangan pelabuhan perikanan, bantuan sarpras penangkapan ikan, fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
 - 2) Peningkatan sistem irigasi melalui rehabilitasi daerah irigasi Sudikampir;
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan waduk Kedunglanggar, Wonotunggal, Gondang Hilir, Karanggondang, Kradegan, Sidoharjo, Mesoyi, Wonodadi dan Candi;
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
 - 2) Pemasaran dan branding produk;
 - 3) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (perikanan tangkap);
 - 4) Fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
 - 5) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Petanglong, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR, Gen Z dan Milenial bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta penyediaan rumah apung dan adaptasi banjir di pesisir utara Pekalongan;
- b. Pengembangan layanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada RSUD Kraton (PHTC);
- c. Mendorong pemenuhan puskesmas terutama di daerah terisolir di Kabupaten Pekalongan dan Batang;
- d. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal dan mendorong sekolah inklusif;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
- b. Pengembangan kawasan pertumbuhan pada simpul-simpul transportasi.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mengoptimalkan persebaran dan pertumbuhan kawasan PKW dan PKL yang persebarannya cukup merata untuk mengurangi ketimpangan wilayah;

- b. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;
- c. Mendorong pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong;
- d. Pengembangan SPAM Regional Petanglong;
- e. Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan TPST Regional Petanglong, serta pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- f. Pengamanan pesisir utara Petanglong secara berkelanjutan;
- g. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pegunungan Dieng dan rehabilitasi kawasan pesisir utara (Ujungnegoro);
- h. Pengembangan dan penyelesaian sistem pengendali banjir di Pekalongan;
- i. Mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan penuntasan penanganan jalan evakuasi;
- j. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan (20 persen) maupun wilayah desa;
- k. Mendorong Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang.



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.7.

Arahan Kebijakan WP Petanglong

4.2.3. WP Kedungsepur

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Kedungsepur berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil, Daging, Jamu, dan Pengolahan Ikan)

- a. Mendorong peningkatan investasi dan ekosistem industri antar Kawasan Industri di Kota Semarang, Demak dan Semarang, Kawasan Industri Kendal (KIK) dan KI Seafer;
- b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
- c. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
- d. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa melalui optimalisasi Pelabuhan sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global (mendorong percepatan revitalisasi alur pelayaran);
- e. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dan inisiasi proses rencana penyiapan rencana pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang- Perbatasan Jawa Timur;
- f. Mendorong integrasi antarmoda kereta api dan kapal (peningkatan efisiensi logistik);
- g. Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kendal dan didorong peningkatan hierarki dari Pelabuhan regional menjadi terminal dari Pelabuhan Tanjung Mas untuk mendukung KEK Kendal dan percepatan investasi swasta untuk pengembangan Kendal Sea Port (PT Samudra Pelabuhan Indonesia);
- h. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (koridor Semarang-Kendal, Semarang-Bawen dan Semarang-Grobogan) yang terkoneksi dengan Trans Semarang dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan perindustrian (KEK Kendal dan KPI Kabupaten Semarang dan Grobogan);
- i. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Penggaron (simpul integrasi Trans Jateng, Trans Semarang dan Feeder Trans Semarang) serta mendorong revitalisasi Terminal Tipe C yang dilalui koridor angkutan umum aglomerasi perkotaan;
- j. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi yang terhubung dengan Jalan Nasional dan menghubungkan Kendal - Semarang - Grobogan - Kabupaten Semarang;
- k. Kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah Kendal;
- l. Pengembangan sentra industri hijau;
- m. Pengembangan ekspor produk unggulan;
- n. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

2. Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City*

- a. Pembentukan kelembagaan pengelolaan perkotaan serta peningkatan kerjasama antar daerah dalam lingkup WP Kedungsepur;

- b. Memantapkan Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;
- c. Mendorong perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;
- d. Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi dan integrasi moda dengan kawasan permukiman;
- e. Pembangunan ekosistem *Smart City* dan digitalisasi layanan publik;
- f. Mendorong perencanaan tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan yang baik utamanya untuk mengantisipasi *urban sprawl* serta kekumuhan;
- g. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dan industri maupun wilayah desa.

3. Pengembangan *Cultural Heritage Tourism* (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsk)

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng koridor Semarang-Kabupaten Semarang) yang terkoneksi dengan Trans Semarang dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya yang menghubungkan dengan kawasan pariwisata termasuk pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata;
 - 2) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas jalan Semarang-Purwodadi, Salatiga-Kedungjati-Gubug;
 - 3) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Salatiga-Kopeng Semarang-Bandungan-Kaloran, dan Semarang-Cangkiran-Boja;
 - 4) Mendorong peningkatan aksesibilitas koridor pariwisata Candi Gedongsongo, Rawa Pening dsk;
 - 5) Mendorong penataan transportasi kawasan Kota Lama Semarang yang lebih ramah lingkungan (*low emission zone*).
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya melalui penyediaan paket pariwisata yang terintegrasi dalam skala regional;
 - 2) Pengembangan Daya Tarik wisata Religi Masjid Demak dan Penataan Kawasan Kompleks Makam Sunan Kalijogo Kadilangu Demak;
 - 3) Mendorong promosi budaya lokal melalui penyelenggaraan even budaya dan even ziarah (Haul Sunan Demak dan Kalijogo);
 - 4) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - 5) Penyusunan pola perjalanan dan *itinerary* wisata heritage.

4. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, bawang merah, tanaman perkebunan, susu, kedelai, garam dan perikanan tangkap)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Fasilitasi sarpras pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian

- dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; korporasi pertanian; pemanfaatan *urban farming*; pencegahan alih fungsi lahan pertanian; pengembangan pelabuhan perikanan; bantuan sarpras penangkapan ikan dan garam; serta pengelolaan kawasan konservasi;
- 2) Fasilitasi sarpras pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 3) Peningkatan sistem jaringan irigasi (DI Parean) dan peningkatan saluran irigasi pengaraman;
 - 4) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Triharjo-Kendal;
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
- 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
 - 2) Pemasaran dan branding produk;
 - 3) penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
 - 4) fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan, serta pengembangan pojok UMKM hasil olahan ikan;
 - 5) Mendorong pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari di Kabupaten Kendal;
 - 6) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Kedungsepur, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni vertikal untuk MBR, Gen Z dan Milenial bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi dan penyediaan rumah apung dan adaptif banjir di pesisir utara Kabupaten Demak;
- b. Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi (PHTC) dan pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- b. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
- c. Mendorong rehabilitasi daerah irigasi dan embung sebagai upaya dalam mendukung peningkatan produksi pertanian;
- d. Optimalisasi perekonomian desa melalui peningkatan peran BUMDes, dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Jragung;

4.2.4. WP Gelangmanggung

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan Trans Jateng Koridor Borobudur - Kutoarjo yang terhubung dengan moda transportasi kereta api Prameks rute Kutoarjo - Yogyakarta dan inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten/Kota di WP Gelangmanggung;
 - 2) Fasilitasi dan pendorongan reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang – Borobudur – Yogyakarta;
 - 3) Mendorong inisiasi rencana pengembangan simpul *Transport Oriented Development* (TOD) di Kabupaten Temanggung yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY;
 - 4) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Magelang-Kaliangkrik dan Wonotunggal-Surjo;
 - 5) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Magelang-Kaliangkrik, Borobudur-Salaman-Bener (termasuk di dalamnya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan/DRK di Kali Jambe Perbatasan Purworejo - Magelang);
 - 6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Madureso Kabupaten Temanggung;
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Pengembangan karakteristik warisan budaya WP Gelangmanggung pada potensi desa-desa wisata baru;
 - 2) Pengelolaan dan pengembangan sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agro industri sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung.

2. Pengembangan ekonomi kreatif (kriya)

- a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif WP Gelangmanggung;
- b. Mendorong kerjasama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan seperti kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, susu, telur dan perikanan budidaya)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) melalui:
 - 1) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; sedangkan pada sektor perikanan melalui pengembangan *broodstock* ikan lele dan gurami, serta domestikasi ikan endemik lokal (ikan beong) di Magelang;
 - 2) Peningkatan sistem jaringan irigasi (DI Soropadan);
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Geblok dan mendorong pembangunan Bendungan Pasuruhan.
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), pada sektor pertanian melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, pemasaran dan branding produk pertanian; sedangkan pada sektor perikanan melalui fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
 - 2) Pengembangan industri hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi;
 - 3) Perluasan tujuan ekspor dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor unggulan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Gelangmanggung, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Pengelolaan dan revitalisasi sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agroindustri dan sektor pendukung pariwisata sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung;
- b. Mendorong pengembangan layanan kesehatan pada kawasan pariwisata (*wellness and health tourism*);
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan di seluruh Kabupaten/Kota WP Gelangmanggung;
- b. Mendorong perluasan tujuan ekspor antar wilayah pengembangan dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor, utamanya pada komoditas agro WP Gelangmanggung;
- c. Mendorong pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif WP Gelangmanggung, sekaligus kerja sama dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung;

- d. Pengembangan potensi destinasi wisata baru (alam, budaya (termasuk religi), buatan) di WP Gelangmanggung.
- 3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
- a. Mendorong optimalisasi konektivitas antar wilayah dalam WP Gelangmanggung dengan memperhatikan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
- b. Penyediaan perlengkapan jalan Parakan-Secang;
- c. Fasilitasi Pembangunan TPST Regional Magelang;
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- e. Mendorong sinergisitas pengelolaan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
- f. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat.



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.9.
Arahan Kebijakan WP Gelangmanggung

4.2.5. WP Wonobanjar

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Wonobanjar berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Pengembangan *Geo-Tourism* (Kawasan Dieng) yang Terintegrasi dengan Kawasan Borobudur

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Pemenuhan fasilitas keselamatan dan peningkatan kondisi jalan pada ruas jalan sabuk Gunung Sumbing penghubung Wonosobo – Banjarnegara;
 - 2) Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Purwokerto – Wonosobo;
 - 3) Inisiasi Rencana Penataan Transportasi di Kawasan Pariwisata Dieng;
 - 4) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan layanan angkutan umum perkotaan dan perdesaan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk diintegrasikan dengan kawasan pariwisata;
 - 5) Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi pendukung akses dan konektivitas Pengembangan koridor wisata Dieng-Borobudur di antaranya ruas Wonosobo-Dieng;
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas Destinasi Wisata KSPN Dieng dan Geopark Dieng;
 - 2) Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Dieng diantaranya melalui visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain;
 - 3) Pengembangan desa pariwisata;
 - 4) Pengembangan daya tarik wisata lokal sebagai unggulan provinsi: Budaya Rambut Gimbang Dieng;
 - 5) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya;
 - 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian resiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;
 - 7) Pengembangan Geopark melalui jelajah Geopark Dieng, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark Dieng serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan geopark global.

2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh, tembakau, cabai, alpukat, sektor kehutanan (kayu sengon), daging, serta perikanan budidaya

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Pengembangan *Good Agriculture Practice* (GAP) budidaya tanaman kentang yang berkelanjutan salah satunya menggunakan metode teras bangku;
 - 2) Mendorong pendampingan masyarakat dalam budidaya kentang yang berkelanjutan;

- 3) Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
 - 4) Mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian (sistem kolaborasi pertanian swasta);
 - 5) Pemasangan bangunan sipil teknis pada daerah konservasi DAS yang menjadi sentra pertanian kentang;
 - 6) Peningkatan kesiapsiagaan dan pelibatan masyarakat pada daerah rawan longsor yang menjadi sentra pertanian kentang;
 - 7) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI);
 - 8) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung;
 - 9) Penyelenggaraan pendidikan pada SMK untuk peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan dengan jurusan mekanisasi pertanian dan agribisnis pengolahan hasil pertanian;
 - 10) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana diantaranya alat mesin pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; Peningkatan produksi dan hilirisasi produk perikanan melalui *restocking* benih ikan dan penataan budidaya di Waduk Wadaslintang, pengembangan sarpras perikanan budidaya, pelatihan diversifikasi olahan ikan, serta fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran.
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), pada sektor pertanian melalui:
- 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, pemasaran dan *branding* produk pertanian; sedangkan pada sektor perikanan melalui fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
 - 2) Pengembangan industri hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi;
 - 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
 - 4) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.
- 3. Pengembangan sektor industri gula, tembakau dan industri kayu dari barang kayu dan gabus**
- Dilaksanakan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, melalui:
- a. Pengembangan ekspor produk unggulan
 - b. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Wonobanjar, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional tematik agrobisnis dan pariwisata dan mendorong sekolah inklusif;
- b. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;
- c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- d. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Fasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Pondok Pesantren dan Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
- c. Mendorong investasi yang mendukung potensi wilayah yang sejalan kebijakan *geopark*.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Inisiasi “kajian kelayakan” rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Cibalingmas-Wonobanjar Koridor Purbalingga - Banjarnegara) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya (Trans Jateng Koridor Purwokerto - Purbalingga dan Trans Banyumas);
- b. Pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek - Wonosobo – Banjarnegara – Klampok sebagai pusat ekonomi;
- c. Mendorong pemulihan DAS Serayu dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- e. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- f. Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Candradimuka;
- g. Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Dieng;
- h. Mendorong pengembangan pabrik ekstraksi litium dari fluida panas bumi di Dataran Tinggi Dieng;
- i. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat.

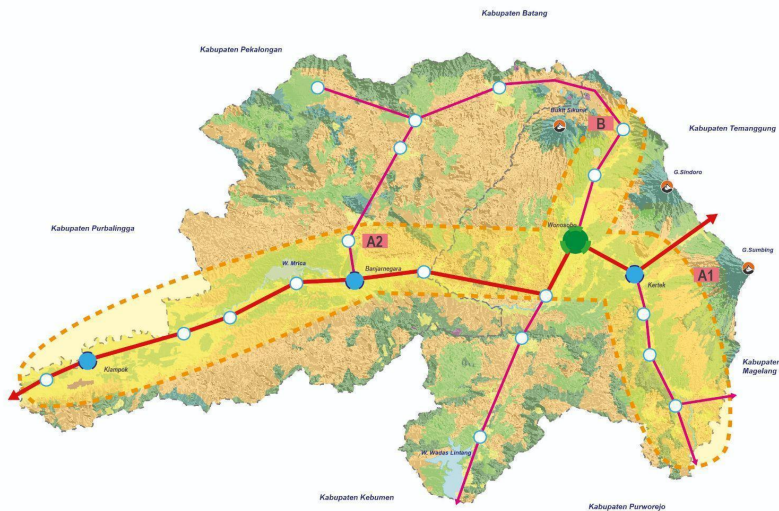
WP WONOBANJAR

PROGRAM UNGGULAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan Geo-Tourism (Kawasan Dieng) yang Terintegrasi dengan Kawasan Borobudur

PROGRAM STRATEGIS PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Program Unggulan Strategis: Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh, tembakau, cabai, alpukat, sektor kehutanan (kayu sengon), daging, serta perikanan budidaya



Koridor Strategis

Banjarnegara - Wonosobo

1. Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Purwokerto – Wonosobo

2. Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Kretek-Kepil dan Sapuran-Kaliangkrik

3. Peningkatan kualitas Destinasi Wisata KSPN Dieng dan Geopark Dieng

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian resiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu

5. Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam

Keterangan

PKW

PKL

Desa Kota

Gunung

Permukiman

Kawasan Peruntukan Industri

Perkebunan

Pertanian

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Konservasi

Kawasan Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

A. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi

Pertanian Bawang Merah dan Nanas

A1

Teh, Tembakau, Cabai, Alpukat, Daging, dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Wonorejo

A2

Alpukat, Daging, dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Banjarnegara

B. Pariwisata

B

KSPN Dieng dan Geopark Dieng

Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.10.

Arahan Kebijakan WP Wonobanjar

4.2.6. WP Keburejo

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Keburejo berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Pengembangan **Geo-Tourism (Geopark Kebumen dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY**

a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:

1) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Kutoarjo – Borobudur yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api (Prameks Yogyakarta – Kutoarjo) serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata (Borobudur) dan perindustrian;

2) Penyelesaian pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perekonomian (sebagai DTW dan Sentra Oleh-Oleh UMKM serta Pusat Kuliner Khas Kebumen dan Purworejo);

Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 / Bab IV - 29

- 3) Fasilitas dorongan perpanjangan layanan Kereta Api Prameks dari semula Yogyakarta – Kutoarjo menjadi Yogyakarta – Kutoarjo – Kebumen;
- 4) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan Mandiraja – Gombong;
- 5) Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi pendukung akses dan konektivitas untuk pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang; akses ke Jalan Nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY;
- 6) Mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan keselamatan jalan wisata Pantai-Geopark Kebumen Karangbolong- KSPN Dieng;
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Pengembangan daya tarik wisata Geopark Kebumen dan Pantai;
 - 2) Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Kebumen sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain;
 - 3) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya;
 - 4) Pengembangan desa wisata Geopark Kebumen;
 - 5) Pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang;
 - 6) Pengembangan Geopark melalui jelajah Geopark Kebumen, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan geopark global.

2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kelapa, tanaman pangan, garam, daging, perikanan tangkap, dan budidaya)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Loning Kragilan – Purworejo;
 - 2) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung DAS Kalong – Kebumen;
 - 3) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana diantaranya: alat mesin pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; Pengembangan korporasi produksi;
 - 4) Mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian (sistem kolaborasi pertanian swasta).
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitas pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; pengembangan pelabuhan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitas kemasan dan jejaring pemasaran.

3. Inisiasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kebumen

- a. Fasilitasi promosi investasi kawasan industri Kebumen;
- b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha.

4. Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan

Dilakukan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, melalui:

- a. Pengembangan ekspor produk unggulan;
- b. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Keburejo, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- b. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potesi unggulan dan mendorong sekolah inklusif;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
- c. Mendorong investasi yang mendukung potensi wilayah yang sejalan kebijakan geopark.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mendorong optimalisasi SPAM Regional Keburejo;
- b. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- c. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- d. Mendorong sinergi pengelolaan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
- e. Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir selatan;
- f. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- g. Mendukung dan memfasilitasi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

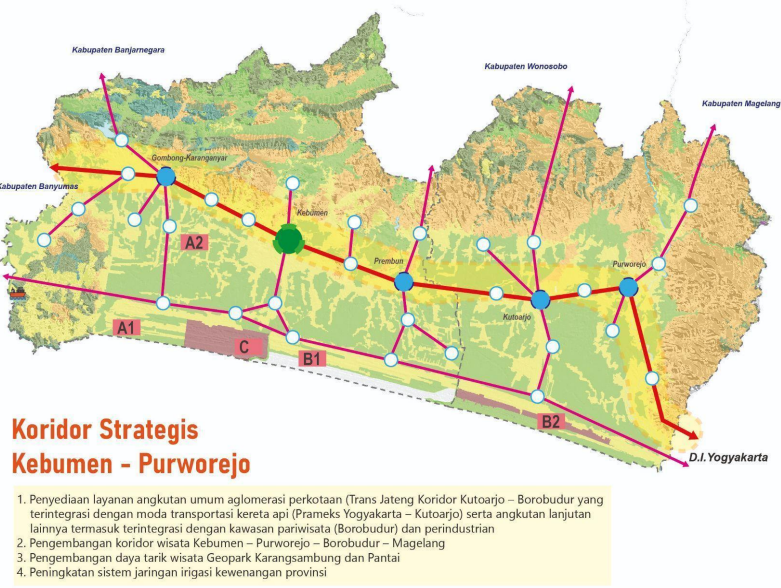
WP KEBUREJO

PROGRAM UNGGULAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan Geo-Tourism (Geopark Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY

PROGRAM STRATEGIS PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

- 1. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kelapa, tanaman pangan, garam, daging, perikanan tangkap, dan budidaya)
- 2. Inisiasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kebumen



Keterangan

PDR	Kawasan Peruntukan Industri	A. Pariwisata	B. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Pertanian Bawang Merah dan Nanas
PIL	Perkebunan	A1 Geopark Karangsambung	B1 Kelapa di Kabupaten Kebumen
Desa Kota	Kawasan Industri Produksi	A2 Wisata Pantai	B2 Garam di Kabupaten Purworejo
Prabukhan	Kawasan Industri Komersial	C. Industri	
	Kawasan Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya	Kawasan Industri Kebumen	

Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.11.

Arahan Kebijakan WP Keburejo

4.2.7. WP Jekuti

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Jekuti berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (furniture, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan)**
 - a. Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Jekuti) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten di WP Jekuti yang terintegrasi dengan angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;
 - b. Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban;
 - c. Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi pendukung akses sentra industri di Jepara, Kudus, dan Pati;
 - d. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Jepara-Kudus;
 - e. Dukungan Pembangunan jalan tol Demak- Kudus- Pati- Rembang – Tuban;
 - f. Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - g. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
 - h. Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

2. Pengembangan *Marine Tourism* dan Religi

- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, dengan:
 - 1) Mendorong penyediaan layanan penerbangan komersial ke Karimunjawa dan mendorong pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa sebagai generator aktivitas perekonomian nasional;
 - 2) Mendorong peningkatan frekuensi dan layanan penyeberangan ke Karimunjawa;
 - 3) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya ruas Kudus – Margoyoso;
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, dengan:
 - 1) Mendorong pembangunan *Waterfront City* di Kepulauan Karimunjawa;
 - 2) Mendorong *event sport tourism* berskala internasional;
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Legonlele dan Pulau Parang;
 - 4) Mendorong pengembangan DTW Religi (Menara Kudus dan Gunung Muria) serta DTW Alam (Pesisir Pantai Jepara);
 - 5) Mendorong promosi budaya lokal melalui penyelenggaraan event budaya (Barikan Kubro) dan event ziarah (Haul Sunan Muria dan Kudus);
 - 6) Pengembangan desa wisata di Koridor Jepara - Kudus – Pati.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, daging, perikanan tangkap, dan budidaya serta garam)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bakalan;
 - 2) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan budidaya ikan nila salin dan Keramba Jaring Apung (KJA), pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas SDM dan sarpras pergaraman, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran;
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Jekuti, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
- b. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi unggulan dan mendorong sekolah inklusif;
- c. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pelibatan lintas sektor;
- d. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Pengembangan dan fasilitasi perizinan berusaha yang sesuai dengan program konservasi dan peruntukan penataan ruang;
- b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mitigasi dan penanggulangan bencana banjir di wilayah Jekuti;
- b. Mendorong sinergi pengelolaan kawasan konservasi Gunung Muria dan Cagar Biosfer Karimunjawa - Jepara – Muria;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembangunan SPAM Regional Dadimuria;
- d. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- e. Peningkatan infrastruktur jalan menuju mantab dalam rangka meningkatkan keterhubungan antar daerah (Jepara - Keling; Pati - Kayen - Sukolilo; Pati - Tayu; Jepara - Kedungmalang - Pecangan; Jati - Klambu).

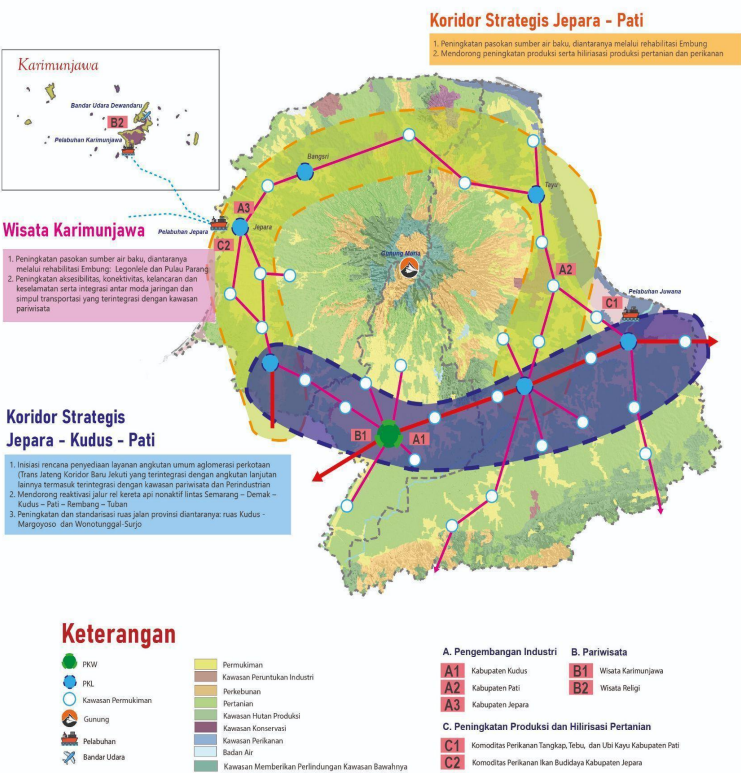
WP JEKUTI

PROGRAM UNGGULAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (furniture, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan)

PROGRAM STRATEGIS PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

- 1. Pengembangan Marine Tourism dan Religi
- 2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, daging, perikanan tangkap, dan budidaya serta garam)



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.12.

Arahan Kebijakan WP Jekuti

4.2.8. WP Banglor

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Banglor berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan Ecotourism**

- a. Mendorong pengembangan Bandara Ngloram Cepu Blora sebagai pintu masuk Jawa Tengah dari sisi timur dan sebagai generator aktivitas perekonomian;
- b. Mendorong integrasi angkutan umum di Bandara Ngloram dan Stasiun Kapuhan termasuk inisiasi penyediaan layanan kereta api komuter yang terpadu dengan wilayah Jawa Timur;
- c. Mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui peningkatan dan standarisasi ruas Jalan Provinsi yang menghubungkan Rembang - Blora (Todanan-Ngawen) dan Blora - Grobogan (Singget - Doplang - Cepu);
- d. Rehabilitasi mangrove dan pemulihan DAS Serang;
- e. Pengembangan layanan komunikasi berbasis teknologi untuk mendukung monitoring hutan dan ekowisata;
- f. Peningkatan produk baik pemasaran dan kualitas produk di kawasan pariwisata;
- g. Pendampingan dalam penetapan Geoheritage Blora.

2. Pengembangan Sektor Industri Garam, Gula Dan Pengolahan Ikan

- a. Pengembangan sentra industri hijau;
- b. Pengembangan ekspor produk unggulan;
- c. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
- d. Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
- e. Mempersiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra-kerja melalui *link and match* dengan dunia industri;
- f. Pengembangan potensi lokal daerah berbasis teaching factory pengolahan hasil pertanian.

3. Pengembangan Cultural Heritage Tourism Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai

- a. Standarisasi ruas jalan penghubung Rembang – Blora;
- b. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan penghubung Rembang – Blora;
- c. Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang–Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban;
- d. Mendorong pemenuhan fasilitas dan peningkatan hierarki Pelabuhan Sluke dari Pelabuhan pengumpan regional menjadi Pelabuhan pengumpul;
- e. Pengembangan ekowisata secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Karang Jahe;
- f. Mendorong dan memfasilitasi inisiasi rencana pengembangan jalan tol Demak-Kudus-Rembang-Pati-Tuban;
- g. Rehabilitasi hutan mangrove di wilayah pesisir.

4. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, tembakau, kelapa kopyor, daging, perikanan tangkap dan budidaya, serta garam)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan budidaya udang vaname di Rembang dan ikan lele di Blora, pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas SDM dan sarpras pergaraman, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran;
 - 2) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Pasedan, Trenggulun, Kaliombo Kabupaten Rembang, dan Embung Karangjati Kabupaten Blora;
 - 4) Pembangunan *Long Storage*: Waru Gunung, Ranggalamulyo, Sungai Pang Kabupaten Rembang;
 - 5) Mendukung dan memfasilitasi Pembangunan Bendungan Karangnongko dan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora;
 - 6) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan

pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Banglor, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- b. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi unggulan dan mendorong sekolah inklusif;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- b. Pengamanan pesisir utara Kabupaten Rembang secara berkelanjutan;
- c. Rehabilitasi kawasan pesisir;
- d. Mendorong peningkatan kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten;
- e. Pengembangan dan kawasan perkotaan Rembang melalui penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang;
- f. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Randugunting;
- g. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- h. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau;
- i. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan dan pembangunan rumah murah bersanitasi baik di kawasan perkotaan Rembang.

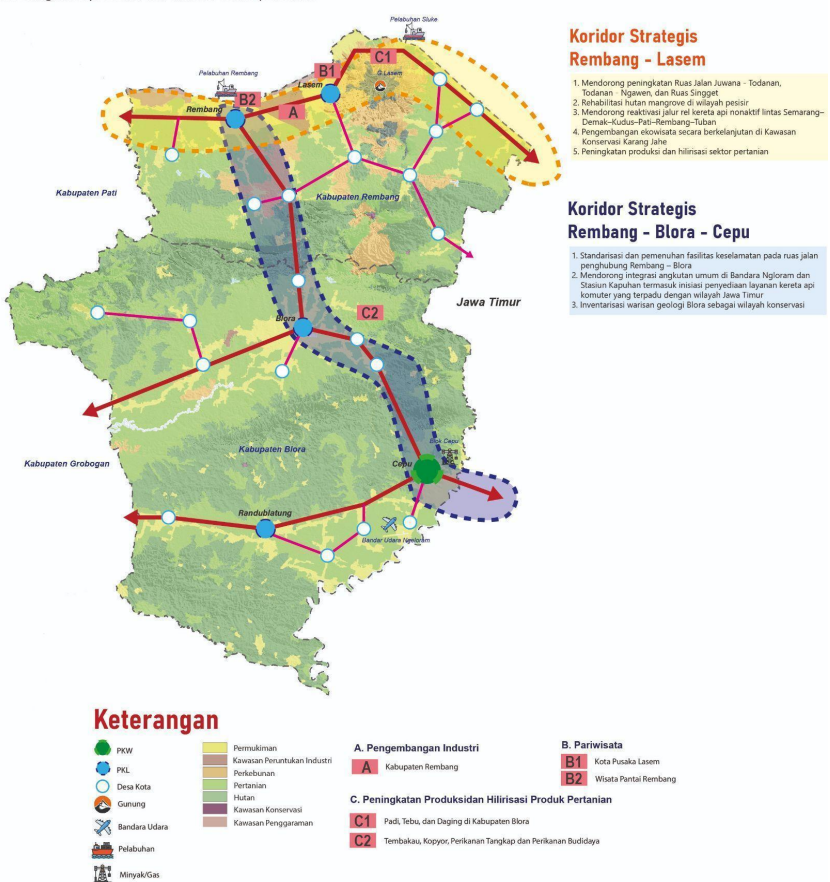
WP BANGLOR

PROGRAM UNGGULAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan Ecotourism

PROGRAM STRATEGIS PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan
2. Pengembangan Cultural Heritage Tourism Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai
3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.13.
Arahan Kebijakan WP Banglor

4.2.9. WP Cibalingmas

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Cibalingmas berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. **Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Baturaden – Serang Purbalingga dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan)**
 - a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Peningkatan dan standarisasi ruas Jalan Provinsi yang terhubung dengan Jalan Nasional serta kawasan *Eco Tourism* Baturaden dan Segara Anakan (Buntu-Slarang, Menganti-Kesugihan);
 - 2) Pengembangan transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar kota/wilayah untuk mempermudah/mendukung akses pariwisata diantaranya melalui penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Purwokerto – Purbalingga) yang terkoneksi dengan Trans Banyumas dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata dan perindustrian;

- 3) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Purbalingga (simpul layanan Trans Jateng);
 - 4) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Purwokerto – Baturaden dan Adipala-Bodo Karangbolong;
 - 5) Mendorong pengembangan dan optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga dengan rencana dukungan daerah melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi menuju Bandara dan inisiasi perpanjangan layanan Trans Jateng ke Bandara (jika sudah terdapat layanan penerbangan regular);
 - 6) Mendorong optimalisasi Bandara Tunggul Wulung sebagai *home base flying school*;
 - 7) Mendorong penyediaan infrastruktur perkeretaapian (reaktivasi rel non aktif Banyumas – Purbalingga – Wonosobo);
 - 8) Mendorong pembangunan jalan tol Cilacap-Pejagan.
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
- 1) Mendorong kerjasama antar *stakeholder* untuk pengembangan pariwisata sabuk Gunung Slamet;
 - 2) Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing;
 - 3) Mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan Industri Kecil menengah mendukung Pariwisata;
 - 4) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - 5) Fasilitasi pengembangan berbagai event kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain: Sedekah Bumi/Laut, Festival Perahu, Festival Gunung Slamet, Festival Budaya dan lainnya;
 - 6) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global.

2. Pengembangan Industri (ikan, gula, jamu, minyak atsiri) Cilacap – Banyumas – Purbalingga

- a. Mendorong perwujudan Kawasan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
- c. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap-Banyumas-Purbalingga melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
- d. Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Cibalingmas Koridor Cilacap - Banyumas) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya (Trans Jateng Koridor Purwokerto - Purbalingga dan Trans Banyumas) termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;

- e. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
- f. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana Tanjung Intan sebagai Pelabuhan Ekspor dan Impor, melalui optimalisasi dan pemenuhan fasilitas Pelabuhan;
- g. Mendorong revitalisasi *dryport* Banyumas;
- h. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Industri berbasis lingkungan;
- i. Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
- j. Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi ruas jalan Adipala - Bodo/Ayah dan Jladri - Karangbolong - Bodo/Ayah untuk mendukung logistik dan aksesibilitas jalur selatan Jawa Tengah;
- k. Pengembangan ekspor produk unggulan;
- l. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
- m. Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cilacap.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, cabai, durian, susu, garam, serta perikanan budidaya (sidat) dan tangkap)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Peningkatan pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan prasarana pertanian;
 - 2) Peningkatan sistem jaringan irigasi diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Banjaran-Banyumas, Serayu, Tajum, Banjarcahyana, Lokbok/Maganti (Kewenangan Pusat);
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, di antaranya mendorong pembangunan Bendungan Matenggeng dan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas;
 - 4) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
 - 5) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
 - 6) fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 7) Penyediaan benih/bibit berkualitasP
 - 8) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 9) Pengembangan pelabuhan perikanan;
 - 10) Pengelolaan kawasan konservasi;
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;

- 2) Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, *cold storage* dan sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan;
- 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Cibalingmas, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- b. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap;
- b. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/ Industri Kecil Menengah dan sektor pariwisata;
- c. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- b. Mendorong sinergi pengelolaan kawasan konservasi Gunung Slamet dan Segara Anakan;
- c. Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir selatan;
- d. Mendorong optimalisasi fungsi Kabupaten Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
- e. Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Maslancip;
- f. Pembangunan IPLT Regional Purbalingga – Banjarnegara;
- g. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- h. Mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang berkelanjutan;
- i. Mendorong Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap;
- j. Mendorong Pembangunan infrastruktur PLTP Baturraden.



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.14.
Arahan Kebijakan WP Cibalingmas

4.2.10. WP Bregasmalang

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Bregasmalang berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, bawang merah, cabe, nanas, daging, telur, garam, serta perikanan budidaya dan tangkap)**
- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
- 1) Peningkatan pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan prasarana pertanian;

2) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Beji-Brebes, Mejugong-Pemalang;

3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan waduk Bantarkawung (Pemali) Kabuaten Brebes;

4) Pengendalian banjir sistem Sungai Cisanggarung, Sungai Tanjung, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan dan Sungai Kluwut Kabupaten Brebes;

- 5) Penanganan abrasi Pantai Losari – Brebes;
 - 6) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 7) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
 - 8) Penjaminan kualitas pakan ternak;
 - 9) Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
 - 10) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 11) Pengembangan pelabuhan perikanan;
 - 12) Pengembangan budidaya rumput laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir tambak dalam budidaya nila salin.
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
- 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
 - 2) Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, *cold storage* dan sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.
- 2. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan)**
- a. Mendorong percepatan investasi Klaster Industri Brebes - Tegal- Pemalang melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
 - b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
 - c. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
 - d. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Industri berbasis lingkungan;
 - e. Mendorong pemenuhan RTH klaster kawasan industri;
 - f. Mendorong revitalisasi dan optimalisasi Pelabuhan Pengumpul Tegal sebagai pelabuhan umum;
 - g. Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - h. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.
- 3. Pengembangan *Integrated Eco-Tourism* Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua)**
- a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi pendukung akses Wisata Guci (Morongso-Tuwel);
 - 2) Penyediaan perlengkapan jalan ruas Randudongkal – Jatinegara;

- 3) Mendorong peningkatan aksesibilitas (jalan kabupaten) menuju pariwisata Guci dan Kaligua;
 - 4) Mendorong penyedia moda transportasi umum yang terkoneksi dengan kawasan wisata;
 - 5) Mendorong peningkatan frekuensi layanan angkutan umum massal berbasis rel kereta api (fasilitasi peningkatan layanan KA Komuter Kaligung dan Kereta Api Regional Joglosemarkerto);
 - 6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Bumiayu Kabupaten Brebes;
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
- 1) Mendorong pengembangan desa/ kampung wisata baru, serta daya tarik dan event wisata;
 - 2) Mendorong Kerjasama antar *stakeholder* untuk pengembangan pariwisata Sabuk Gunung Slamet (Guci-Kaligua);
 - 3) Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan serta pendidikan kejuruan (SMK) mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing;
 - 4) Mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan industri kecil menengah mendukung pariwisata;
 - 5) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - 6) Fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan event kebudayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain Pekan Kebudayaan Daerah, Festival Budaya Pantura, Tegal Pesisir Karnival, Karawitan, Kirab Budaya dan sebagainya;
 - 7) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global;
 - 8) Pendampingan dalam penetapan Geoheritage Bumiayu.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Bregasmalang, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
- b. Mendorong sekolah inklusif;
- c. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
- d. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat Kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

- a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/ Industri Kecil Menengah dan sektor pariwisata;
- b. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Pengembangan SPAM Regional Bregas;
- b. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- c. Mendorong rehabilitasi kawasan pesisir;
- d. Mendorong sinergisitas pengelolaan kawasan konservasi Gunung Slamet;
- e. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat
- f. Mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang berkelanjutan;
- g. Mendorong Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang.



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 4.15.
Arahan Kebijakan WP Bregasmalang

BAB V

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dimana rencana tahun 2030 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tampung SMA-SMK-SLB, bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan perlengkapan bagi siswa miskin SMA-SMK-SLB, penyediaan sarana mobilitas bagi siswa SLB, peningkatan sarpras pendidikan, pengembangan potensi siswa SMA-SMK-SLB, penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan SMA-SMK-SLB, pemanfaatan *platform* pendidikan untuk digitalisasi pendidikan, peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA-SMK-SLB, peningkatan manajemen pengelolaan SMA-SMK-SLB, peningkatan kompetensi guru berlisensi industri serta peningkatan kualitas pembelajaran selaras DUDI dan berbasis *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics* (STEAM).

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berbasis karakter, *soft skill* dan potensi lokal melalui penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal pilihan.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis data dan analisis dalam bentuk rekomendasi teknis.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar; deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia; peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif; pemberian PMT bagi balita *wasting*, *underweight*, *stunting* dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); pemberian suplemen bagi ibu hamil anemia dan lansia; peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal; pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi balita, anak usia sekolah, usia dewasa dan lansia; deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (hipertensi, *diabetes melitus*, kanker); skrining narkoba untuk pengemudi, anak sekolah, dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria); pengawasan kualitas air dan udara; peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 pilar; pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD/RSJD dan UPT milik Dinas Kesehatan; pengintegrasian sistem kesehatan nasional; peningkatan balkesmas menjadi rumah sakit tipe D; peningkatan mutu BALABKES PAK menjadi BALABKESMAS Tingkat III; peningkatan cakupan imunisasi lengkap 14 antigen dan imunisasi rutin lengkap; peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana, serta pengembangan sarana dan prasarana di RSUD/RSJD dan UPT milik Dinas Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk penanganan kesehatan prioritas dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pembinaan pengawasan industri farmasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif serta pelaksanaan program pemeriksaan spesialis keliling (*spelling*) di masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *Flood Forecasting And Warning System (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada inisiasi, pembangunan dan pengembangan SPAM regional (lintas kabupaten/kota), pembangunan SPAM perdesaan, SPAM desalinasi, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada fasilitasi pembangunan TPST regional (lintas kabupaten/kota) dan pembangunan prasarana sarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala regional (lintas kabupaten/kota), pembangunan SPALD-S skala komunal, serta peningkatan kapasitas pengelolaan prasarana sarana sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar 7 (tujuh) meter dengan MST 8 ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah di antaranya pada koridor Sabuk Gunung Sumbing Wonosobo - Banjarnegara, Pemalang - Banyumas, Brebes - Tegal, Pemalang - Batang, Semarang - Purwodadi, Rembang - Blora; serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan

pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan Kajian Kewilayahan, Kawasan Strategis Provinsi, dan Tematik, Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka pencapaian 1 KK 1 rumah layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah susun.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan, pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta penataan permukiman di kawasan pesisir.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan satgas linmas.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di daerah rawan bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Unit LIDi), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*Specified Skilled Worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antar kerja antar daerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Selain itu, juga diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota melalui pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait hubungan industrial dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan, dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rawan pangan dan penanggulangan *stunting* pada daerah prioritas *stunting*, serta implementasi pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee

Program ini diarahkan pada fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya)

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional dan fasilitasi sarpras pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi admindukcapil, sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTPel di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam mengelola data kependudukan dalam rangka memudahkan pengelolaan data kependudukan secara efisien, memastikan validitas data, serta menggunakan

data kependudukan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antar desa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerjasama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembaharuan data profil desa/kelurahan, penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kerjasama ekonomi antardesa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa operasionalisasi dan pengembangan Trans Jateng meliputi keberlanjutan operasionalisasi 7 koridor Trans Jateng eksisting, peningkatan integrasi jaringan konektivitas Trans Jateng dengan “Trans Kabupaten/Kota” dan moda transportasi lainnya, modernisasi layanan (peremajaan armada bus, sistem pemantauan operasional dan pembayaran secara digital serta halte/ruang tunggu penumpang), pengembangan kapasitas kelembagaan (PPK BLUD), peningkatan kerjasama pembiayaan (CSR BUMN/BUMD) dalam penyediaan sarana prasarana Trans Jateng, dan inisiasi rencana penyiapan koridor baru untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan peningkatan peran dan keterlibatan kabupaten/kota) serta inisiasi rencana penyediaan layanan Trans Jateng “*Executive*”; pengelolaan terminal penumpang Tipe B berupa penyelesaian pembangunan (Terminal Kutoarjo Kabupaten Purworejo) dan peningkatan terminal (diprioritaskan pada Terminal Tawangmangu, Sukoharjo, Penggaron, Purbalingga, Banyuputih, Madureso, dan Bumiayu); penyediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan utamanya pengadaan dan pemasangan, penggantian serta pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan perlengkapan jalan lainnya (APILL, RPPJ, ZOSS, *guardrail*, rambu, marka dan lain-lain) di jalan provinsi diprioritaskan pada ruas pendukung sentra produksi pertanian, pariwisata (*Geopark*, Borobudur, Dieng, Tawangmangu dan Sabuk Gunung Slamet), perindustrian dan kawasan perbatasan; Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); pemenuhan secara bertahap sarana penunjang pemeliharaan LPJU di setiap balai wilayah (berupa *crane / skylift*) serta fasilitasi optimalisasi bandara.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai dan pengadaan/pemasangan lampu penerangan, rambu sungai, dan fasilitas keselamatan lainnya pada penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota; pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi koordinasi optimalisasi pelabuhan utama (pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas) dan pengumpul, serta pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen/P3D dan transisinya); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi pendorongan implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya mendorong reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif dan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kereta api komuter.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa

pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *Computer Security Response Team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra penginderaan, dan *jamming*. Upaya peningkatan

keamanan informasi melalui penerapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di Provinsi Jawa Tengah.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola layanan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah, serta Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota, peningkatan kelestarian arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), peningkatan kualitas layanan kearsipan Provinsi Jawa Tengah

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui penenggelaman Terumbu Karang Buatan/TKB, penanaman bibit mangrove, serta cemara laut; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perijinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Jawa Tengah melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui kerja sama dengan *stakeholder*, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/*Certificate of Analysis*), diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi; kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penguatan promosi dan fasilitasi *event*.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kab/kota kreatif; dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor; pembentukan korporasi; subsidi suku bunga kredit; asuransi petani; pembentukan *food estate*; optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan; peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan; revitalisasi kebun benih; penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian. Program ini juga diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB), fasilitasi *Good Breeding Practices* (GBP), fasilitasi *Good Farming Practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha,

serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (SUPRA).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Mangkunegoro I, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pendampingan masyarakat penyangga kawasan konservasi; inisiasi kawasan konservasi baru melalui peningkatan/perubahan fungsi kawasan hutan; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial.

d. Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi; mengidentifikasi zona pemanfaatan dan konservasi pada kawasan non CAT; sinergi dengan *stakeholder* lainnya dalam penegakan regulasi daerah terkait air tanah, dan monitoring terjadinya *land subsidence*/amblesan tanah; penyusunan studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; penyusunan regulasi pengelolaan air tanah di Jawa Tengah; pengembangan Sistem Aplikasi Geologi dan Air Tanah. Program ini juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya kelestarian warisan geologi/*Geoheritage* di Jawa Tengah sebagai upaya perlindungan kawasan geologi melalui pelaksanaan jelajah *geopark/geoheritage*, pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark* serta perkuatan mitra dan kolaboratif ke jaringan *geopark* global. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat dampak kejadian bencana geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada peningkatan transformasi tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui optimalisasi sinergi Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem layanan pertambangan minerba melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan), pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk pembinaan dan apresiasi terhadap pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*, kegiatan penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin) bersama aparat penegak hukum dan *stakeholder* terkait lainnya; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumihutan dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan peningkatan desa mandiri energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, hidro, gas rawa, dan tenaga surya; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT; monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi; penyusunan regulasi daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED); meningkatkan edukasi dan

peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi; identifikasi Desa Mandiri Energi dengan pemberian penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; dukungan terhadap Program Eco-Pesantren melalui pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan di pondok pesantren. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mendorong upaya konservasi energi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada gedung pemerintah dan dunia usaha bersama *stakeholder* terkait, sosialisasi pelaksanaan konservasi energi serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekspor melalui fasilitasi penerbitan dokumen pendukung ekspor yaitu SKA serta mendorong penertiban legalitas berusaha sektor perdagangan melalui penerbitan rekomendasi teknis untuk usaha perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya. Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA, pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor dan pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk optimalisasi sarana-sarana perdagangan yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai perdagangan. Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar

rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan stok barang pokok penting (bapokting) yang beredar. Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diharapkan dapat memperluas pasar internasional produk-produk unggulan Jawa Tengah yang potensial ekspor. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *Export Coaching Program* (ECP), *Coaching Program For New Exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *One On One Meeting* dengan Atase Perdagangan (Atdag)/*Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepedulian serta keamanan bagi konsumen dan dapat membantu mengurai permasalahan yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha perdagangan. Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diharapkan mampu meningkatkan citra sekaligus memperluas pasar dalam negeri untuk produk dalam negeri. Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sektor industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri. Program ini diarahkan pada penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi melalui peningkatan SDM industri agro melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri melalui penumbuhan dan perluasan berusaha sektor industri. Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi dan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan informasi industri yang lebih akurat dan akuntabel sehingga dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan yang lebih implementatif. Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk Izin Usaha Industri/IUI, Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**, yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, evaluasi dan penataan kelembagaan; fasilitasi penyusunan analisis jabatan; evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta manajemen akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah dengan memperluas jejaring internasional dan meningkatkan konektivitas global; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerjasama daerah baik didalam negeri maupun luar negeri; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan termasuk fasilitasi dan koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah *Non Litigasi* dan HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD.

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang perekonomian dan SDA; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan

manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB) serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui upaya pengadaan sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN termasuk pemerintah desa ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Riset dan Inovasi**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Pengelolaan Penghubung

Rencana program prioritas unsur pengelolaan penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak

lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

5.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan indikator yang dipilih dari indikator tujuan dan/atau sasaran pembangunan daerah. IKU pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Koordinator
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66-9,00	8,70-8,53	8,51-8,17	8,38-7,81	8,20-7,48	8,00-7,13	8,00-7,13	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,11	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	81,78	82,60	83,41	84,23	85,04	85,04	Sekretariat Daerah
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	n/a	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	86,80 - 90,22	86,91 - 91,95	87,20 – 90,45	88,61 - 90,82	88,61 - 90,82	Sekretariat Daerah
5	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,47	65,72	66,79	67,88	68,90	69,83	69,83	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,90 - 5,60	5,00 - 6,00	6,00 - 7,00	6,30 - 7,30	6,70 - 7,70	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00	Sekretariat Daerah
7	Indeks Modal Manusia	Angka	n/a	0,59	0,61	0,62	0,63	0,65	0,65	0,65	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56	Sekretariat Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2030, yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,46	75,68	75,73	75,78	75,83	75,87	75,92	75,92
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	n/a	0,32	5,32	6,69	14,03	20,30	27,64	27,64
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	n/a	0,482	0,487	0,492	0,497	0,502	0,507	0,507
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,72	14,06	16,05	17,8	19,42	20,96	22,43	22,43
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,51* (SEB, capaian 2022)	17,00	18,46	19,94	21,44	22,96	25,96	25,96
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	25* (SEB, capaian 2022)	25* (SEB, capaian 2022)	29,00	30,50	32,00	35,00	36,00	36,00
7	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	802,05	826,11	883,94	945,82	1.040,40	1.169,00	1.250,83	1.250,83
8	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	131	212,71	203,21	192,72	182,5	172,56	162,86	162,86
9	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	8,63	8,23	7,83	7,43	7,03	6,64	6,25	6,25
10	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,34	85,47	85,60	85,85	86,10	86,34	86,57	86,57
11	Kapasitas Air Baku	m3/detik	5,2 (baseline RPJPN)	5,2 (baseline RPJPN)	5,82	6,45	7,07	7,70	8,32	8,32
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	n/a	39,46	41,48	43,5	45,51	47,53	49,55	49,55
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi	%	64,31	64,31	64,61	64,91	65,21	65,51	65,81	65,81
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Angka	69,11	70,14	70,44	70,74	71,04	71,34	71,64	71,64
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi	%	52,37	52,38	52,42	52,46	52,50	52,54	52,58	52,58
16	Indeks Risiko Bencana	Angka	99,61	96,18	94,75	93,33	91,90	90,48	89,05	89,05

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Persentase Penurunan Emisi GRK									
	- Kumulatif	%	n/a	5,65	6,57	7,27	7,99	8,74	9,51	9,51
	- Tahunan	%	n/a	12,35	15,84	17,05	18,86	20,68	22,51	22,51
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53	8,51 - 8,17	8,38 - 7,81	8,20 - 7,48	8,00 - 7,13	8,00 - 7,13
2	PDRB per Kapita	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,0	56,0 - 59,8	61,0 - 65,3	67,0 - 71,8	73,0 - 78,4	73,0 - 78,4
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,90 - 5,60	5,00 - 6,00	6,00 - 7,00	6,30 - 7,30	6,70 - 7,70	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56
5	Rasio Gini	Angka	0,364	0,362 - 0,367	0,360 - 0,365	0,358 - 0,363	0,356 - 0,361	0,355 - 0,360	0,354 - 0,359	0,354 - 0,359
6	Indeks Modal Manusia	Angka	n/a	0,59	0,61	0,62	0,63	0,65	0,65	0,65
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,93	75,24	75,46	75,68	75,90	76,12	76,50	76,50
8	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	74,00	84,41	82,59	80,70	78,85	77,00	76,00	76,00
9	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	n/a	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	13,00
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90,00	92,00	92,00	93,00	93,00	94,00	94,00	94,00
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,00	88,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,83	99,03	99,23	99,43	99,63	99,83	99,90	99,90
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	n/a	85,71 - 88,57	87,86 - 90,71	90,00 - 92,86	92,15 - 95,00	94,29 - 97,14	94,76 - 97,63	94,76 - 97,63
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	n/a	28,57 - 34,29	34,29 - 39,29	40,00 - 44,29	45,72 - 49,29	51,43 - 54,29	52,42 - 55,22	52,42 - 55,22
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	n/a	71,28 - 73,78	72,49 - 74,99	73,69 - 76,19	74,90 - 77,40	76,10 - 78,60	76,35 - 78,82	76,35 - 78,82

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	n/a	64,75 - 67,25	65,65 - 68,15	66,55 - 69,05	67,45 - 69,95	68,35 - 70,85	69,03 - 71,56	69,03 - 71,56
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,47	8,58 - 8,60	8,69 - 8,71	8,80 - 8,81	8,90 - 8,92	9,01 - 9,02	9,14 - 9,15	9,14 - 9,15
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	12,97 - 13,00	13,03 - 13,06	13,09 - 13,11	13,15 - 13,17	13,21 - 13,22	13,29 - 13,30	13,29 - 13,30
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,82	8,18	8,43	8,67	8,92	9,17	9,41	9,41
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	n/a	66,89	67,71	68,52	69,34	70,15	70,47	70,47
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	n/a	30,84	34,09	37,33	40,58	43,82	47,07	47,07
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	n/a	20,00	21,75	23,50	25,25	27,00	28,75	28,75
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	n/a	62,31	62,86	63,40	63,95	64,69	65,04	65,04
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	n/a	73,81	74,08	74,34	74,61	74,87	75,14	75,14
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,308	0,307	0,302	0,299	0,295	0,292	0,286	0,286
C	Aspek Daya Saing Daerah									
1	Inflasi	%	1,67	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	n/a	57,59	61,4	65,46	69,79	74,41	79,34	79,34
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65	35,24	35,83	36,42	37,31	37,31
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	8,20	8,20	8,20	8,00	8,00	7,90	7,90	7,90
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65	35,24	35,83	36,42	37,31	37,31
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,56	3,50	3,60	3,72	3,84	3,94	4,04	4,04
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	593,17	630,06	660,43	697,48	733,89	775,72	818,38	818,38
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	n/a	12,61	12,50	12,38	12,27	12,16	12,04	12,04

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	n/a	3,01	3,05	3,08	3,11	3,15	3,18	3,18
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	n/a	6,01	6,23	6,45	6,67	6,89	7,12	7,12
11	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	n/a	2,98	3,19	3,31	3,43	3,59	3,70	3,70
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	n/a	2,00	2,005	2,01	2,015	2,02	2,025	2,025
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	n/a	1,44	1,62	1,82	2	2,19	2,38	2,38
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	n/a	42,00	44,05	46,10	48,15	50,20	52,25	52,25
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,82	59,75 - 63,97	60,24 - 64,55	60,73 - 65,12	61,21 - 65,70	61,70 - 66,27	62,19 - 66,85	62,19 - 66,85
16	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,70
17	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	n/a	43,10	45,57	48,50	51,53	53,74	56,40	56,40
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	18,55	21,31	21,60	21,87	22,17	22,38	22,55	22,55
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	n/a	6,00	6,12	6,24	6,39	6,47	6,56	6,56
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Angka	n/a	7,38	7,23	7,09	6,94	6,79	6,67	6,67
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,53	30,55	30,63	30,75	30,86	30,94	31,00	31,00
22	Ekspor Barang dan Jasa	%	10,74	10,97	11,12	11,27	11,43	11,58	11,77	11,77
23	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	n/a	2,41	2,45	2,49	2,53	2,57	2,62	2,62
24	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	71,76	72,80	74,32	75,84	77,36	78,88	80,40	80,40
25	Persentase Desa Mandiri	%	24,42	25,85	27,27	28,68	30,05	31,41	32,77	32,77
26	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,47	94,27	94,29	94,3	94,31	94,33	94,34	94,34
27	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,614	6,660	6,786	6,901	7,015	7,122	7,242	7,242
28	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	61,57	64,07	68,79	74,21	79,14	84,07	89,00	89,00
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,29	1,38	1,38	1,39	1,40	1,41	1,42	1,42

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	40,88	23,66	24,11	24,84	26,15	28,32	28,32	28,32
31	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,41	0,42	0,42
32	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Nilai	3.287.253,22	3.700.540,29	3.846.660,00	4.354.768,00	4.987.435,00	5.752.445,95	8.811.843,00	8.811.843,00
33	Total Kredit/PDRB	%	25,02	23,20	25,13	27,15	29,32	31,74	34,30	34,3
34	Inklusi Keuangan	%	75,02	92,00	92,74	93,37	93,91	94,34	94,68	94,68
D	Aspek Pelayanan Umum									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,11	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	81,78	82,60	83,41	84,23	85,04	85,04
3	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	n/a	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	86,80 - 90,22	86,91 - 91,95	87,20 – 90,45	88,61 - 90,82	88,61 - 90,82
4	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,47	65,72	66,79	67,88	68,90	69,83	69,83
5	Kapasitas Institusi	Angka	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	4,77	4,77
6	Indeks Reformasi Hukum	Angka	91,40	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,42	4,50	4,55	4,59	4,62	4,65	4,69	4,69
8	Indeks Pelayanan Publik	Angka	n/a	4,55	4,56	4,57	4,58	4,60	4,62	4,62
9	Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	99,80	100	100	100	100	100	100	100
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	n/a	n/a	75,43	n/a	n/a	78,04	n/a	78,04
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Kategori	n/a	n/a	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Kategori	n/a	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	78,98	79,28 - 79,3	79,65 - 79,69	80,03 - 80,09	80,40 - 8,48	80,78 - 80,88	81,15 - 81,27	81,15 - 81,27
E	Indikator Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKU PD / IKK)									
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
	Pendidikan									
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,86	12,97 - 13,00	13,03 - 13,06	13,09 - 13,11	13,15 - 13,17	13,21 - 13,22	13,29 - 13,30	13,29 - 13,30

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th	%	71,60	72,20	72,70	73,10	73,50	73,90	74,30	74,30
	Angka Partisipasi Sekolah 4-18 tahun Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Khusus	%	56,70	57,20	57,70	58,20	58,70	59,20	59,70	59,70
	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment nasional untuk literasi dan numerasi	%	61,09	62,95	64,95	66,95	68,45	69,95	70,95	70,95
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	89,88	90,38	90,88	91,38	91,88	92,38	92,88	92,88
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	71,60	72,20	72,70	73,10	73,50	73,90	74,30	74,30
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	56,70	57,20	57,70	58,20	58,70	59,20	59,70	59,70
	Kesehatan									
	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	74,93	75,24	75,46	75,68	75,90	76,12	76,50	76,50
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	74,00	84,41	82,59	80,70	78,85	77,00	76,00	76,00
	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 100.000 KH	12,14	12,00	11,80	11,60	11,40	11,20	11,00	11,00
	Angka populasi bebas PTM	%	28,50	34,20	40,00	45,70	51,40	100	100	100
	Angka populasi bebas PM	%	14,30	20,00	31,40	42,80	57,10	71,40	91,40	91,40
	Proporsi kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar	%	n/a	85,00	87,00	89,00	91,00	92,00	93,00	93,00
	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian KLB dan Bencana	%	71,00	77,00	82,00	88,00	94,00	100	100	100
	Cakupan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	%	60,00	65,71	74,28	82,85	91,42	100	100	100
	Persentase Penurunan Kasus Stunting	%	n/a	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,10	0,10
	Net Death Rate (NDR) RSUD Dr. Moewardi	permil	46,17	55,00	54,90	54,85	45,72	54,75	54,70	54,70

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Net Death Rate (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	permil	30,14	30,135	30,13	30,125	30,12	30,11	30,11	30,11
	Net Death Rate (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH	permil	33,34	33,20	33,10	33,00	32,90	32,80	32,70	32,70
	Net Death Rate (NDR) RSUD dr. Rehatta	permil	11,00	10,90	10,80	10,70	10,60	10,50	10,40	10,40
	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	permil	4,07	4,06	4,02	3,98	3,96	3,92	3,90	3,90
	Net Death Rate (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin	permil	3,09	3,00	2,98	2,96	54,80	2,92	2,90	2,90
	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	permil	13,19	13,10	13,05	13,00	12,95	12,90	12,60	12,60
	Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit Mata Soeparjo Rustam	permil	33,34	33,20	33,10	33,00	32,90	32,80	32,70	32,70
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1.000 Penduduk	1,24	1,30	1,50	1,70	1,80	2,00	2,10	2,10
	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,47	94,27	94,29	94,3	94,31	94,33	94,34	94,34
	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	%	61,56	64,36	64,38	64,39	64,40	64,42	64,43	64,43
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	47,09	47,9	47,98	48,06	48,14	48,23	48,31	48,31
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	40,86	34,15	35,83	37,51	39,20	40,88	42,56	42,56
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,72	14,06	16,05	17,80	19,42	20,96	22,43	22,43

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	49,42	61,65	72,82	80,78	88,64	94,27	100	100
	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	%	61,78	62,08	62,39	62,70	63,01	63,33	63,35	63,35
	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	61,57	64,07	68,79	74,21	79,14	84,07	89,00	89,00
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	22,96	23,81	24,65	25,5	26,35	27,19	28,04	28,04
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	71,76	72,80	74,32	75,84	77,36	78,88	80,40	80,40
	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	%	63,60	60,31	62,40	64,49	66,58	68,68	70,77	70,77
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	84,07	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50	85,50
	Indeks Risiko Bencana	Angka	99,61	96,18	94,75	93,33	91,90	90,48	89,05	89,05
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80,00	80,00	84,00	86,00	88,00	91,00	100	100
	Sosial									

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Populasi PPKS	%	n/a	10,13	10,01	9,70	9,44	8,70	8,36	8,36
	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin	%	n/a	9,60	9,48	9,17	8,91	8,59	8,27	8,27
	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase PPKS Fakir Miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	n/a	n/a	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,35
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
	Tenaga Kerja									
	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR)	%	70,21	69,06	69,54	70,03	70,55	71,08	71,40	71,40
	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	73,76	74,07	74,39	74,70	75,02	75,34	75,65	75,65
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	61,82	59,69	60,05	60,45	60,87	61,32	62,00	62,00
	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	9,03	9,54	10,00	10,47	11,00	11,53	12,05	12,05
	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp	55,47	56,00	56,40	56,90	57,20	57,60	58,00	58,00
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	68,57	68,57	85,71	91,43	94,29	97,14	100	100
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	9,03	9,54	10,00	10,47	11,00	11,53	12,05	12,05
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	55,47	56,00	56,40	56,90	57,20	57,60	58,00	58,00
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	19,07	19,25	19,43	19,62	19,80	19,98	20,17	20,17
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	73,76	71,05	71,07	71,08	71,10	71,12	71,14	71,14

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	9,96	10,00	10,51	10,93	11,12	11,71	12,20	12,20
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,308	0,307	0,302	0,299	0,295	0,292	0,286	0,286
	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,31	93,41	93,51	93,61	93,71	93,81	93,91	93,91
	Indeks Perlindungan Anak	Angka	n/a	65,00	65,35	66,70	67,20	67,50	67,50	67,50
	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10,37	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00
	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	n/a	14,00	71,00	85,00	95,00	100	100	100
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	n/a	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00
	Persentase kabupaten/kota yang mempunyai puspa aktif	%	n/a	25,71	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	60,76	60,76	62,00	64,00	66,00	67,00	67,50	67,50
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	77,86	77,86	79,00	81,00	82,00	83,00	83,50	83,50
	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pangan									
	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,34	85,47	85,60	85,85	86,10	86,34	86,57	86,57
	Prevalence of Undernourishment (PoU)	%	8,63	8,23	7,83	7,43	7,03	6,64	6,25	6,25
	Persentase cadangan pangan	%	65,43	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35
	Pertanahan									
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Lingkungan Hidup									
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,03	68,71	68,82	68,92	69,02	69,13	69,23	69,23
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,73	84,91	84,93	84,94	84,96	84,98	84,99	84,99
	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,32	0,3238	0,3234	0,323	0,3226	0,3222	0,3219	0,3219
	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33	3,32	3,32
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	n/a	0,482	0,487	0,492	0,497	0,502	0,507	0,507
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	53,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Angka	84,38	85,50	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	87,50
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase Desa Mandiri	%	24,42	25,85	27,27	28,68	30,05	31,41	32,77	32,77
	Rata-rata nilai Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah	Angka	0,7376	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	n/a	73,81	74,08	74,34	74,61	74,87	75,14	75,14
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,03	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	63,90	64,25	64,50	64,75	65,00	65,30	65,50	65,50

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	69,46	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,60	70,60
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,79	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,40	8,40
	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	n/a	68,00	71,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	30,30	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	42,00
	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	30,38	27,10	27,50	28,00	28,50	29,00	29,50	29,50
	Perhubungan									
	Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,614	6,660	6,786	6,901	7,015	7,122	7,242	7,242
	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,264	0,274	0,302	0,327	0,351	0,375	0,401	0,401
	Presentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99,9830	99,9836	99,9842	99,9845	99,9849	99,9853	99,9857	99,9857
	Komunikasi dan Informatika									
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,42	4,50	4,55	4,59	4,62	4,65	4,69	4,69
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	14,90	12,99	13,52	13,68	13,87	14,08	14,23	14,23
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	n/a	2,00	2,16	2,34	2,53	2,74	2,88	2,88
	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	n/a	10,39	10,49	10,59	10,71	10,82	10,91	10,91
	Rasio Kewirausahaan	%	n/a	3,21	3,53	3,85	4,23	4,77	5,05	5,05
	Penanaman Modal									
	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	%	30,50	30,55	30,63	30,75	30,86	30,94	31,00	31,00
	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%	14,83	6,25	6,40	6,80	7,00	7,60	8,00	8,00
	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	14,83	6,25	6,40	6,80	7,00	7,60	8,00	8,00

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kepemudaan dan Olahraga									
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0,385	0,387	0,389	0,390	0,391	0,392	0,393	0,393
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n/a	59,00	60,25	61,05	61,55	62,15	62,60	62,60
	Statistik									
	Tingkat Kematangan Layanan Tata Kelola Data	Angka	n/a	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,95	4,95
	Persandian									
	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Angka	n/a	3,95	4,03	4,08	4,15	4,23	4,25	4,25
	Kebudayaan									
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	n/a	62,31	62,86	63,4	63,95	64,69	65,04	65,04
	Angka Melek Budaya	Angka	52,61	53,82	55,32	56,82	58,32	59,82	61,32	61,32
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perpustakaan									
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	15,14	15,45	15,76	15,99	16,32	16,73	17,16	17,16
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Angka	73,91	75,10	76,70	78,50	80,50	83,00	85,60	85,60
	Kearsipan									
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Angka	96,07	96,17	96,27	96,37	96,47	96,57	96,67	96,67
	Persentase Arsip Bernilai Sejarah yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%	n/a	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah (LKD Provinsi)	Angka	97,09	97,19	97,29	97,39	97,49	97,59	97,69	97,69
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	51,409	51,919	52,429	52,939	53,449	53,959	54,469	54,469

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pilihan									
	Kelautan dan Perikanan									
	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	%	5,46	1,0 - 2,0	2,0 - 2,3	2,0 - 2,3	2,0 - 2,3	2,0 - 2,3	2,0 - 2,3	2,0 - 2,3
	Persentase Luasan Mangrove yang Berkualitas Baik	%	n/a	66,72	66,88	67,03	67,19	67,34	67,50	67,50
	Produksi Perikanan	Ton	968.353,80	952.717,50	954.029	969.649,90	985.589,40	1.001.857,10	1.018.462,80	4.929.588,20
	Produksi Garam	Ton	629.952,95	539.293,69	541.775,75	544.457,81	547.139,84	549.821,93	552.503,98	2.735.699,31
	Pariwisata									
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,56	3,60	3,73	3,95	4,18	4,90	4,60	4,60
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	n/a	12,61	12,50	12,38	12,27	12,16	12,04	12,04
	Pengeluaran Wisatawan (selama di Jateng)	Rp	7.510.765,23	7.642.319.59	8.243.953,56	8.645.935,07	8.798.697,32	89.572.261,89	9.121.889,54	9.121.889,54
	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	66.344.465	84.344.465	102.344.465	120.344.465	138.344.465	156.344.465	174.344.465	174.344.465
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	n/a	6,22	4,82	5,61	5,22	5,70	5,50	5,50
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	n/a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Tingkat hunian akomodasi	%	n/a	41,55	43,50	45,20	46,80	48,00	49,50	49,50
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	n/a	3,60	3,73	3,95	4,18	4,40	4,60	4,60
	Pertanian									
	Produksi Tanaman Pangan	Ton	12.588.346	12.688.953	12.756.970	12.817.380	12.877.929	12.939.439	13.001.002	13.001.002
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	1.057.770	873.990	887.100	900.406	913.912	927.621	941.535	941.535

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	3.925.759	3.864.207	3.867.976	3.871.747	3.875.523	3.879.303	3.883.086	3.883.086
	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Peternakan	%	1,09	1,00	1,25	1,5	1,75	2,00	2,25	2,25
	Produksi Daging	Kg	930.177.944	899.513.420	913.315.317	927.340.024	941.591.202	956.072.572	970.787.917	970.787.917
	Produksi Susu	Liter	74.040.121	75.064.496	76.017.815	76.990.844	77.984.025	78.997.818	80.024.789	80.024.789
	Produksi Telur	Kg	902.097.949	916.430.165	931.002.576	945.819.241	960.884.277	976.201.870	991.776.277	991.776.277
	Kehutanan									
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	48,37	59,46	59,47	59,48	59,49	59,5	59,51	59,51
	Luas Tutupan Lahan	Angka	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan	%	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	1,04	0,21	0,78	0,81	0,85	0,89	0,93	5,51
	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	516	351	360	365	370	375	380	380
	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,65	3,63	3,63	3,64	3,64	3,65	3,65	3,65
	Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan	%	2,19	2,15	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Persentase Penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	63,37	57,00	55,00	58,00	58,00	60,00	60,00	60,00
	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	131	212,71	203,21	192,72	182,5	172,56	162,86	162,86
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	18,55	21,31	21,6	21,87	22,17	22,38	22,55	22,55
	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	802,05	826,11	883,94	945,82	1.040,40	1.169,00	1.250,83	1.250,83
	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Angka	1	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perdagangan									

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,16	4,20	4,30	4,50	4,70	4,90	5,10	5,10
	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Milyar	230.872,97	261.315,00	272.562,00	284.793,00	297.723,00	311.426,00	325.997,00	325.997,00
	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah	%	n/a	7,38	7,23	7,09	6,94	6,79	6,67	6,67
	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	9,086	4,05	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,50
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	73,32	91	91,05	91,07	91,07	91,08	91,09	91,09
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Barang (Rata-Rata)	5,26	7,38	7,23	7,09	6,94	6,79	6,67	6,67
	Perindustrian									
	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	3,52	3,80	3,95	4,10	4,25	4,40	4,55	4,55
	PDRB Sektor Perindustrian	Rp. Milyar	615.195,96	649.000,00	675.350,00	703.086,00	732.387,00	763.373,00	796.183,00	796.183,00
	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	18,72	31,42	31,43	31,44	31,45	31,46	31,47	31,47
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	80,72	80,73	80,74	80,75	80,76	80,77	80,78	80,78
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Sekretariat Daerah									
	Indeks Kualias Kebijakan	Angka	66,31	66,35	66,40	66,50	66,60	66,70	66,80	66,80
	Sekretariat DPRD									
	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90,00	91,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Perencanaan									
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	Angka	93,89	93,91	94,19	94,44	94,64	94,84	95,20	95,20
	Skor Aspek Sinergi IPPN	Angka	27,53	27,55	27,75	28,00	28,20	28,40	28,60	28,60
	Skor Aspek Kualitas Perencanaan IPPN	Angka	56,36	56,36	56,44	56,44	56,44	56,44	56,60	56,60
	Skor Aspek Keterhubunngan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Angka	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kuangan									
	Persentase Pertumbuhan Penerimaan PAD	%	11,64	-11,94	-8,72	-2,95	3,35	9,80	16,35	16,35
	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,75	97,8	97,85	97,90	97,95	98,00	98,05	98,05
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Angka	n/a	3,09	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,14
	Kepegawaian									
	Indeks Sistem Merit	Angka	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86
	Pendidikan dan Pelatihan									
	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07	3,08	3,10	3,15	3,18	3,20	3,25	3,25
	Penelitian dan Pengembangan									
	Nilai Kapabilitas Inovasi	Angka	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,70
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	72,85	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	75,50

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengelolaan Penghubung									
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	86,00	85,00	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan									
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3,471	3,497	3,524	3,55	3,576	3,603	3,629	3,629
	Level Kapabilitas APIP	Angka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,096	3,134	3,171	3,209	3,246	3,284	3,321	3,321
	Unsur Pemerintahan Umum									
	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD	Angka	n/a	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,05	3,05
	Indeks Harmonisasi Indonesia	Angka	n/a	7,35	7,37	7,39	7,41	7,43	7,43	7,43
	Indeks Ketahanan Politik	Angka	n/a	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,15	3,15

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2029-2030 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Jawa Tengah secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu “Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam tiga sasaran daerah yaitu: 1) terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis, 2) terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, 3) terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan **kaidah pelaksanaan** meliputi:

1. **konsistensi perencanaan dan pendanaan**, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level keluaran dan memastikan pelaksanaannya, serta penguatan mekanisme proses utamanya yang dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
2. **keterkaitan perencanaan pembangunan** daerah dengan nasional yang digambarkan dengan keterkaitan RPJMD dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen RKPD setiap tahunnya, serta menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

3. **penerapan *cascading*** dalam penyusunan RPJMD dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran tujuan dan sasaran daerah berdasarkan visi dengan tetap memperhatikan misi, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, disertai indikator kinerja pembangunan yang disusun dengan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, result oriented/relevant*, dan *time-bound* (SMART), dimana seluruh indikator RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD;
4. **kerangka pengendalian** yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen Renstra PD, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya, serta mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja PD, serta (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
5. **mekanisme perubahan** yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD; penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan, dimana sistem elektronik terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, dan tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama;
6. **komunikasi publik** untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, dimana komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pihak swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia.

Selanjutnya sebagai **pedoman transisi**, pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam RPJMD ini sudah memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2030, sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Tahun 2030-2034 disusun.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Jawa Tengah dalam kerangka “**Ngopeni Nglakoni Jateng**”, dalam rangka mewujudkan “**Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045**”.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI